



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi dalam penanggannya memerlukan langkah secara sistematis, terencana, dan bersinergi melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung diperlukan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Bupati melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berwenang menetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
6. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi kondisi umum Daerah;
 - c. bab III berisi profil kemiskinan Daerah;
 - d. bab IV berisi prioritas program dan anggaran penanggulangan kemiskinan;
 - e. bab V berisi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan;
 - f. bab VI berisi sistem monitoring dan evaluasi; dan
 - g. bab VII berisi penutup.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung pencapaian target program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- (4) Ketentuan mengenai dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Juli 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang komprehensif. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997:137).

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).

Instansi yang bertugas menetapkan tingkat kemiskinan di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS kemiskinan adalah keadaan seseorang dimana terjadi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Hendriwan, 2003). Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, *Sustainable Development Goals* (SDG's) mempunyai tujuan global mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Sasaran global dalam mengakhiri segala bentuk kemiskinan pada tahun 2030 adalah mengurangi setidaknya proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional. Tujuan SDG's disikapi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan telah diterbitkan kebijakan operasional berupa Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan tersebut memuat Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 4 (empat) pokok strategi yaitu (1) perbaikan program perlindungan sosial; (2) peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (4) pembangunan inklusif; yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah.

Penyusunan RPKD Kabupaten Temanggung didahului dengan analisis terhadap kondisi wilayah yang dilanjutkan dengan analisis profil kemiskinan wilayah. Hasil kajian profil kemiskinan daerah melalui analisis karakteristik makro maupun mikro kemudian dipergunakan untuk menganalisis akar masalah kemiskinan, keterkaitan dengan kondisi fiskal serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, analisis wilayah dilakukan untuk menentukan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Dalam RPKD ini termuat strategi dan program dalam intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Temanggung “TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2025-2029.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah untuk :

- a. Mengintegrasikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha, dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung;
- b. Meningkatkan pemahaman, peran, dan komitmen pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, pembangunan daerah Kabupaten Temanggung,

serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) khususnya tujuan mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;

- c. Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan melalui pendekatan multisektor; dan
- d. Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

1.4 Kedudukan

Kedudukan Dokumen RPKD Kabupaen Temanggung merupakan dokumen yang terkait dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati Temanggung yang memuat kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan. Secara khusus, strategi dan rencana penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan kegiatan yang dijabarkan setiap tahun dalam dokumen RPKD yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari dokumen RPJMD. Dokumen RPKD menjadi pedoman dan acuan seluruh pemangku kepentingan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Oleh sebab itu, strategi, rencana aksi dan sasaran RPKD tidak hanya menjadi rencana kerja dan program pemerintah, tetapi juga menjadi “gerakan bersama” semua pihak. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RPKD akan dapat terwujud sesuai dengan batas waktu yang telah direncanakan.

1.5 Sistematika RPKD

Sistematika RPKD Kabupaten Temanggung menyesuaikan dengan format Petunjuk Teknis Penyusunan RPKD yang disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2014, yakni disusun sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merupakan narasi singkat terhadap materi analisis kondisi kemiskinan sampai dengan bagian kaji ulang dan integrasi kebijakan RPKD.

BAB I PENDAHULUAN

Uraian singkat tentang mengapa RPKD penting bagi daerah, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan kedudukan RPKD.

BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Uraian yang memuat gambaran umum kondisi daerah berupa data demografi dan data geografi Kabupaten Temanggung.

BAB III PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Memuat informasi tentang data statistik kemiskinan makro Kabupaten Temanggung, analisis perbandingan antar waktu dan antar wilayah serta prioritas bidang (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, sosial, pembangunan desa, ketenagakerjaan, dan pertanian). Dalam bab ini juga memuat isu strategis, analisis determinan kemiskinan, analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi.

BAB IV PROGRAM PRIORITAS DAN ANGGARAN

Memuat informasi tentang gambaran anggaran Kabupaten Temanggung, strategi dan program dalam intervensi penanggulangan kemiskinan

BAB V LOKASI PRIORITAS

Memuat penentuan wilayah prioritas bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, sosial, pembangunan desa, ketenagakerjaan, dan pertanian.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Memuat rencana sistem monitoring dan evaluasi yang berisikan indikator kinerja, target, dan capaian dari setiap program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) didalam RPKD. sebagai bagian dari penetapan indikator kinerja daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. (masuk dalam tujuan penyusunan RPKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat kesimpulan terhadap hasil analisa dan rekomendasi.

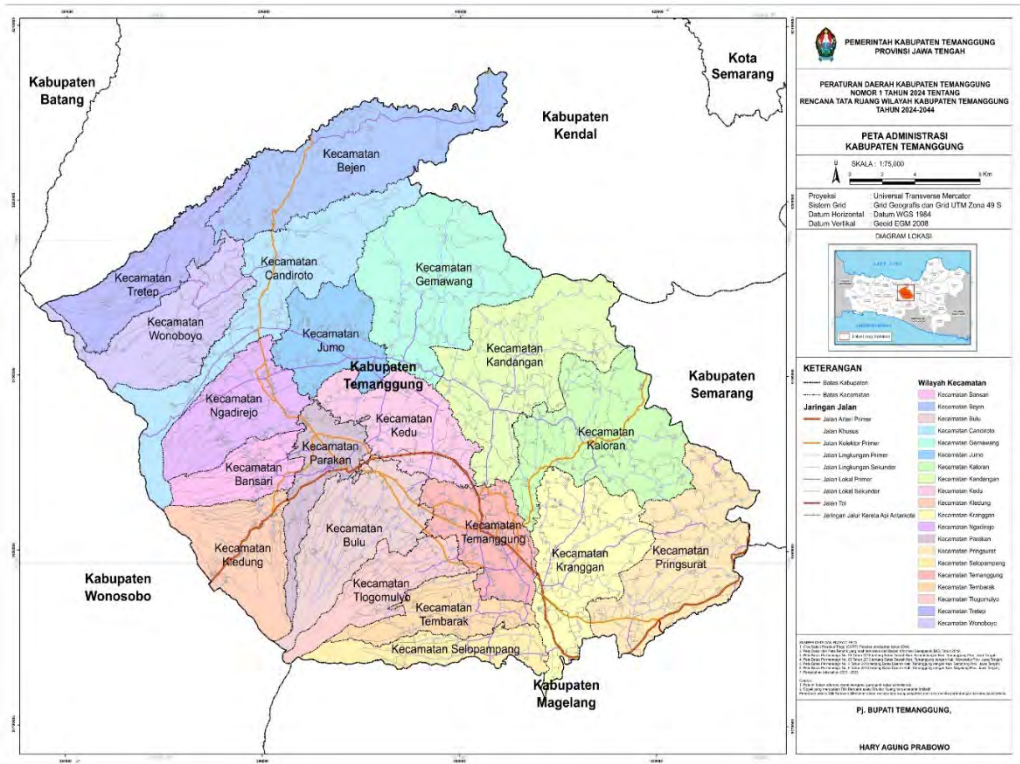
BAB II

KONDISI UMUM

2.1 Letak Geografis

2.1.1 Wilayah Administrasi dan Batas wilayah

Kabupaten Temanggung secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah administrasi seluas kurang lebih 86.483 hektare dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pengembangan Gelangmanggung (Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung) dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

2.1.2 Letak Astronomis dan Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 7°32'14"–7°32'35" Lintang Selatan dan 110°46'23"–110°46'30" Bujur Timur. Letak Geografis Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Hal ini terlihat dengan adanya pertumbuhan area industri pada jalur Semarang-Yogyakarta sehingga pada PDRB, kontribusi sektor pengolahan menjadi yang tertinggi. Banyaknya

industri maka akan menyerap tenaga kerja yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Kemiringan Lahan

Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0%–70% serta berada pada ketinggian 400->1.500 mdpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Hal tersebut terlihat dari tinggi masyarakat Kabupaten Temanggung yang masih bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyaknya masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian menunjukkan bahwa daerah dengan sektor pertanian sebagai salah satu penunjang perekonomian masyarakat, yang memiliki kecenderungan tingkat kemiskinan yang tinggi.

2.2 Karakteristik Wilayah

Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung). Kawasan ini di dukung oleh potensi pariwisata yaitu pelestarian Kawasan Borobudur sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi-Merbabu-Telomoyo dan Gunung Sindoro-Sumbing.

Kabupaten Temanggung dengan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pendukung pengembangan wilayah koridor Borobudur-Dieng dan Gelangmanggung serta Kawasan perkotaan Muntilan – Mungkid - Kota Magelang - Temanggung. Selain itu pengembangan wilayah dilakukan Upaya peningkatan pada sektor pertanian dan kehutanan, pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan.

Potensi komoditas utama pada Kabupaten Temanggung berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Selain tiga sektor tersebut, Kabupaten Temanggung juga memiliki sektor potensial yang juga berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian daerah yaitu sektor pariwisata. Salah satu komoditas utama di Kabupaten Temanggung yaitu sektor pengolahan meliputi industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau.

2.3 Demografi

2.3.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk Per Kecamatan

Jumlah penduduk pada tahun 2023 Semester II adalah 817.483 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 412.163 jiwa (50,42%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 405.320 jiwa (49,58%) dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101,41. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran	
		Pria	%	Wanita	%	Kecamatan	%
1	Parakan	27.263	50.06	27.193	49.94	54.456	6.68
2	Kledung	14.576	50.70	14.171	49.30	28.747	3.53
3	Bansari	12.381	50.16	12.301	49.84	24.682	3.03
4	Bulu	25.548	50.99	24.559	49.01	50.107	6.15
5	Temanggung	42.01	49.55	42.771	50.45	84.781	10.40
6	Tlogomulyo	12.127	50.85	11.723	49.15	23.85	2.93
7	Tembarak	16.436	50.88	15.867	49.12	32.303	3.96
8	Selopampang	10.288	48.77	10.805	51.23	21.093	2.59
9	Kranggan	25.368	49.44	25.939	50.56	51.307	6.30
10	Prinsurat	26.892	49.70	27.22	50.30	54.112	6.64
11	Kaloran	23.409	50.05	23.358	49.95	46.767	5.74
12	Kandangan	27.248	50.35	26.866	49.65	54.114	6.64
13	Kedu	30.801	50.54	30.148	49.46	60.949	7.48
14	Ngadirejo	29.247	50.45	28.724	49.55	57.971	7.11
15	Jumo	15.364	50.27	15.202	49.73	30.566	3.75
16	Gemawang	17.368	50.52	17.012	49.48	34.38	4.22
17	Candiroto	16.699	50.08	16.646	49.92	33.345	4.09
18	Bejen	11.13	50.08	11.095	49.92	22.225	2.73
19	Tretep	11.14	50.90	10.744	49.10	21.884	2.69
20	Wonoboyo	13.823	50.75	13.417	49.25	27.24	3.34
	Kabupaten Temanggung	409.118	50.21	405.761	49.79	814.879	100.00

Sumber: BPS, 2024

2.3.2 Sebaran Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia > 65 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% sejak Tahun 2023.

Tabel 2. 2
Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	29,639	28,543	58,182
5-9	28,509	27,583	56,092
10-14	30,001	28,445	58,446
15-19	30,607	28,921	59,528
20-24	30,156	28,719	58,875
25-29	29,897	28,304	58,201
30-34	29,479	28,986	58,465
35-39	29,572	28,258	57,830
40-44	27,626	27,394	55,020
45-49	28,854	29,359	58,213
50-54	28,335	28,658	56,993
55-59	26,409	27,480	53,889
60-64	21,635	22,433	44,068
65-69	17,090	17,988	35,078
70-74	11,800	12,553	24,353
75+	9,509	12,137	21,646
Jumlah/Total	409,118	405,761	814,879

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% sejak Tahun 2023. Namun hal tersebut turut pula membawa tantangan yang harus dihadapi terutama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tantangan terkait bonus demografi adalah sebagai berikut:

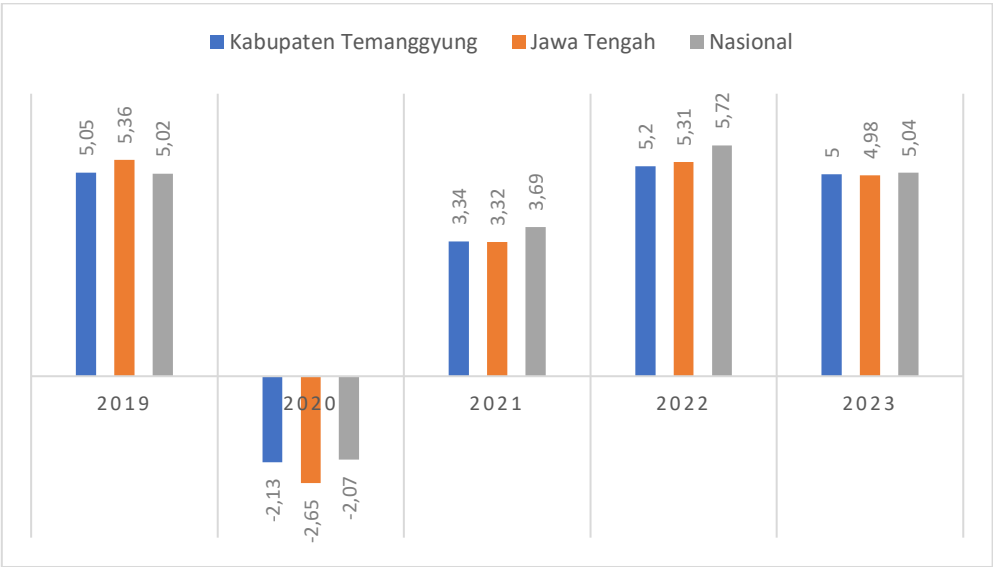
- a. Masalah pengangguran dimana bonus demografi meningkatkan jumlah penduduk kelompok usia muda, Jika kelompok usia muda berpendidikan rendah, kurang keterampilan dan tidak tersedia

- lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran kelompok usia muda
- Tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, Jika kurang mencukupi maka akan menyebabkan adanya sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehingga berakibat pada kurangnya daya saing di pasar kerja dan menciptakan pengangguran
 - Kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja, hal ini terjadi apabila lulusan sekolah dan mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kurangnya pasar kerja akan berdampak pada terciptanya pengangguran
 - Pertumbuhan penduduk kelompok usia muda menempatkan pada kebutuhan tentang sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dan mewujudkan generasi muda yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

2.4 Perekonomian

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Hal tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah:



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2. 2
Realisasi dan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung



Tahun 2019-2023

Berdasarkan perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kecenderungan perubahan pertumbuhan ekonomi pada periode 2019-2020 memiliki persamaan yakni menurun pada posisi 0 yang mana perubahan ekonomi Kabupaten Temanggung. Tahun 2023 melambat -0,02 sedangkan pada Tingkat provinsi nasional juga melambat. Melambatnya pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2020 menurut lapangan usaha di Kabupaten Temanggung disebabkan menurunnya lapangan usaha pertanian dari 2,92% menjadi 1,28% dan sektor jasa lainnya dari 10,95% menjadi 8,83%.

Menurunnya lapangan usaha sektor pertanian berpengaruh negatif dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena produktivitas di sektor pertanian masih rendah, sehingga belum cukup mampu untuk menjadi sumber penghasilan yang memadai bagi masyarakat petani yang berakibat masyarakat mencari pendapatan dari lapangan usaha lain yang lebih menjanjikan. Hal tersebut selaras dengan pendapat dari Kuncoro (2006) bahwa penyebab kemiskinan adalah karena adanya penduduk yang masih menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten dan metode produksi tradisional.

2.4.2 Pertumbuhan PDRB

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB suatu daerah dapat menunjukan tinggi rendahnya suatu wilayah untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara efektif dan kemampuan dalam penyediaan komponen produksi sehingga berdampak pada kemiskinan.

Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2019-2023 menurut pertumbuhan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)

Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.269,02	3.331,08	3.358,51	3.456,66	3.500,84
B	Pertambangan dan Penggalian	116,31	118,76	126,77	121,77	125,574

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
C	Industri Pengolahan	3.971,38	3.947,19	4.025,97	4.069,85	4.245,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,70	14,10	14,78	15,56	16,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,74	13,00	13,73	13,76	14,36
F	Konstruksi	764,99	749,62	806,12	836,12	901,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.445,11	3.314,95	3.559,94	3.712,94	3.928,94
H	Transportasi dan Pergudangan	771,94	533,79	548,56	907,26	978,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267,28	249,09	264,11	303,84	341,79
J	Informasi dan Komunikasi	332,03	378,99	401,67	410,67	456,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	466,12	475,46	491,70	494,23	508,6
L	Real Estate	134,95	134,87	137,94	145,94	158,14
M,N	Jasa Perusahaan	58,37	54,68	56,33	59,51	64,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	402,52	396,03	395,00	401,33	421,83
P	Jasa Pendidikan	669,62	668,34	671,96	682,91	730,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178,40	192,22	193,28	198,27	214,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	339,57	318,57	321,56	356,76	388,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14.483,26	15.214,06	15.387,93	16.187,37	16.997,53

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai PDRB Temanggung tahun 2023 atas dasar harga konstan sebesar 16,98 triliun rupiah, naik dari tahun 2022 yang sebesar 15,38 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Temanggung mulai bangkit kembali pasca pandemi covid-19 dan bahkan mampu tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi sebelum covid-19. Sektor Industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 25,92%. Kenaikan nilai PDRB selaras pula dengan penurunan angka

kemiskinan di Kabupaten Temanggung hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Temanggung semakin baik disertai daya beli masyarakat yang meningkat.

Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Pertumbuhan lapangan usaha Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (Persen)
Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	Pertumbuhan 2019	Pertumbuhan 2020	Pertumbuhan 2021	Pertumbuhan 2022	Pertumbuhan 2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	1,9	0,82	2,92	1,28
B	Pertambangan dan Penggalian	4,24	2,11	6,74	-3,94	3,12
C	Industri Pengolahan	4,39	-0,61	2	1,09	4,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,18	2,92	4,82	5,28	5,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,68	2,04	5,62	0,22	4,36
F	Konstruksi	8,15	-2,01	7,54	3,72	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	-3,78	7,39	4,3	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	9,29	-30,85	2,77	65,39	7,9

Kategori	Uraian	Pertumbuhan 2019	Pertumbuhan 2020	Pertumbuhan 2021	Pertumbuhan 2022	Pertumbuhan 2023
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,41	-6,81	6,03	15,04	12,49
J	Informasi dan Komunikasi	15,69	14,14	5,98	2,24	11,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	2	3,42	0,51	2,91
L	Real Estate	7,21	-0,06	2,28	5,8	8,36
M,N	Jasa Perusahaan	10,22	-6,32	3,02	5,65	8,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	-1,61	-0,26	1,6	5,11
P	Jasa Pendidikan	8,16	-0,19	0,54	1,63	6,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,21	7,75	0,55	2,59	8,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,33	-6,18	0,96	10,95	8,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,85	-2,13	3,34	5,2	5

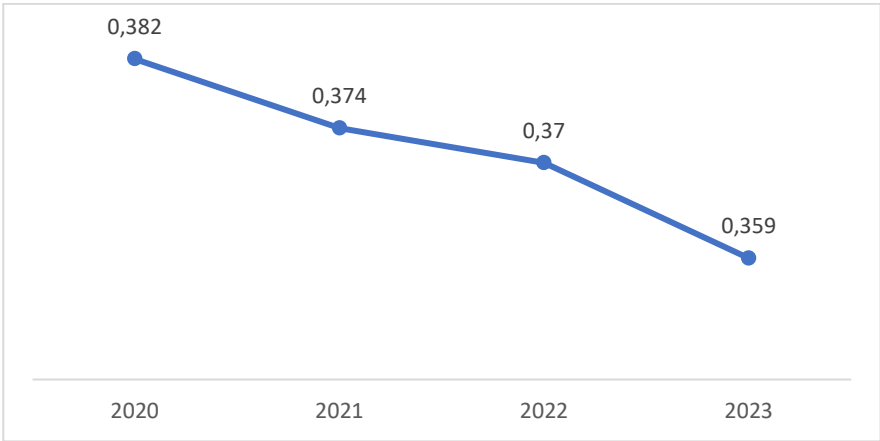
Sumber:BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan harga konstan 2010 pada tabel di atas nilai PDRB Temanggung pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,20 persen dan melambat pada Tahun 2023 menjadi 5,00 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif dimana 10 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5-10%, sedangkan lapangan usaha lainnya tercatat kurang dari 5% (<5%).

2.4.3 Ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, termasuk salah satunya kemiskinan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengurangi manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin.

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Adapun realisasi rasio gini Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

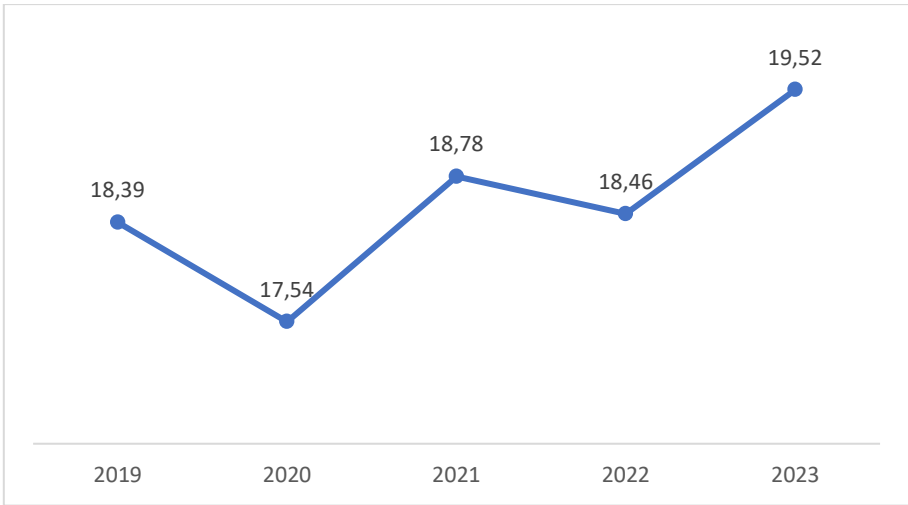


Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2. 3
Rasio Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023

Rasio gini Kabupaten Temanggung mengalami penurunan seiring dengan kondisi perekonomian yang berangsur pulih sehingga pemerataan pendapatan juga dapat meningkat. Ketimpangan pendapatan perlu menjadi perhatian, agar ketimpangan yang terjadi tidak tinggi sehingga masyarakat mampu menghadapi ketimpangan tersebut dan jauh dari lingkaran kemiskinan.

Selain rasio gini, ukuran lain yang sering digunakan sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk adalah distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Berikut gambaran distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 berdasar kriteria Bank Dunia yaitu:



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2. 4
Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Perkembangan distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung menurut kriteria Bank Dunia dalam kurun waktu 2019-2023 berfluktuasi dan menurun cukup tajam pada tahun 2020, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan.

2.4.4 Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi mencerminkan kestabilan nilai jual mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel, sedangkan Kabupaten Temanggung tidak masuk ke dalam daerah sampel sehingga angka inflasi Temanggung mengikuti inflasi Jawa Tengah.

Tabel 2. 5
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

LOKASI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Temanggung	2,89	2,66	1,9	2,18	5,63	2,89
Jawa Tengah	2,82	2,81	1,56	1,28	5,63	2,89
Nasional	3,13	2,72	1,9	1,6	5,51	2,61

Sumber:
 BPS
 Jawa
 Tengah

Tahun 2024

Laju inflasi di Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi salah satunya dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja, sehingga sangat berpengaruh pada pengeluaran masyarakat dan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2023 inflasi di Tingkat Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino.

Penurunan inflasi di Kabupaten Temanggung memiliki hubungan positif dengan penurunan angka kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa adanya

peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya standar hidup masyarakat sehingga dapat hidup diatas garis kemiskinan.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN TEMANGGUNG

3.1 Konsep Kemiskinan

Konsep dan definisi kemiskinan merupakan titik tolak pembahasan yang penting, karena konsep kemiskinan melatarbelakangi pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kemiskinan dan pilihan indikator-indikator untuk memantau kondisi kemiskinan. Pengertian dan definisi tentang kemiskinan sangat beragam sesuai evolusi ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami pengertian kemiskinan secara komprehensif.

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan.

Indonesia telah menetapkan berbagai prioritas terkait penanggulangan kemiskinan. Prioritas tersebut dituangkan dalam isu strategis pada dokumen perencanaan, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dalam Dokumen Perencanaan
Pusat dan Daerah

RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029	RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
Visi Indonesia pada RPJMN 2025-2029 adalah Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 Misi Indonesia Emas 2045: - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Visi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045 Misi RPJMD Jawa Tengah: - Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global; - Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan; - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas; - Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan	Visi Kabupaten Temanggung pada RPJMD 2025-2029 adalah Temanggung untuk semua (sejahtera, berkelanjutan, mudah, inklusif, aman). Misi RPJMD Temanggung: - Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas - Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan - Mempromosikan Kelestarian Lingkungan - Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif



4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk

mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

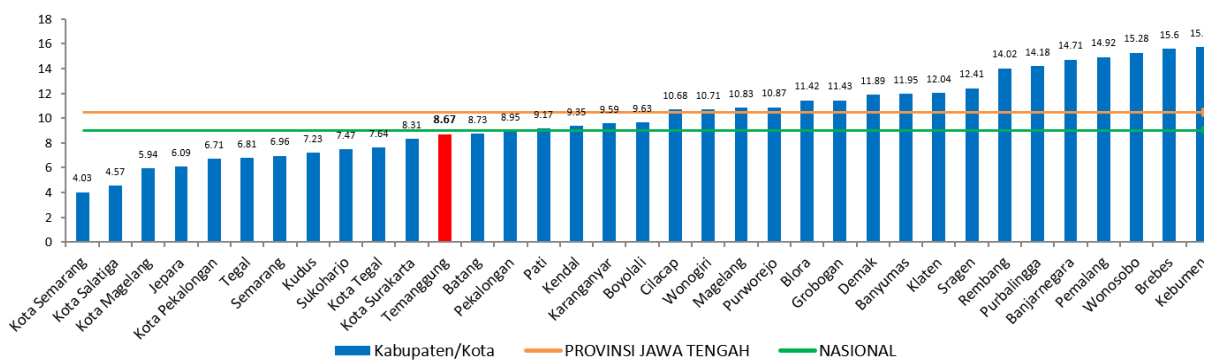
Pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah maupun RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, pengentasan kemiskinan masuk menjadi misi rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini berarti bahwa kemiskinan menjadi prioritas pada perencanaan pembangunan daerah. Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.

3.2 Indikator Kemiskinan

3.2.1 Presentase Penduduk Miskin (PO) dan Miskin Ekstrem

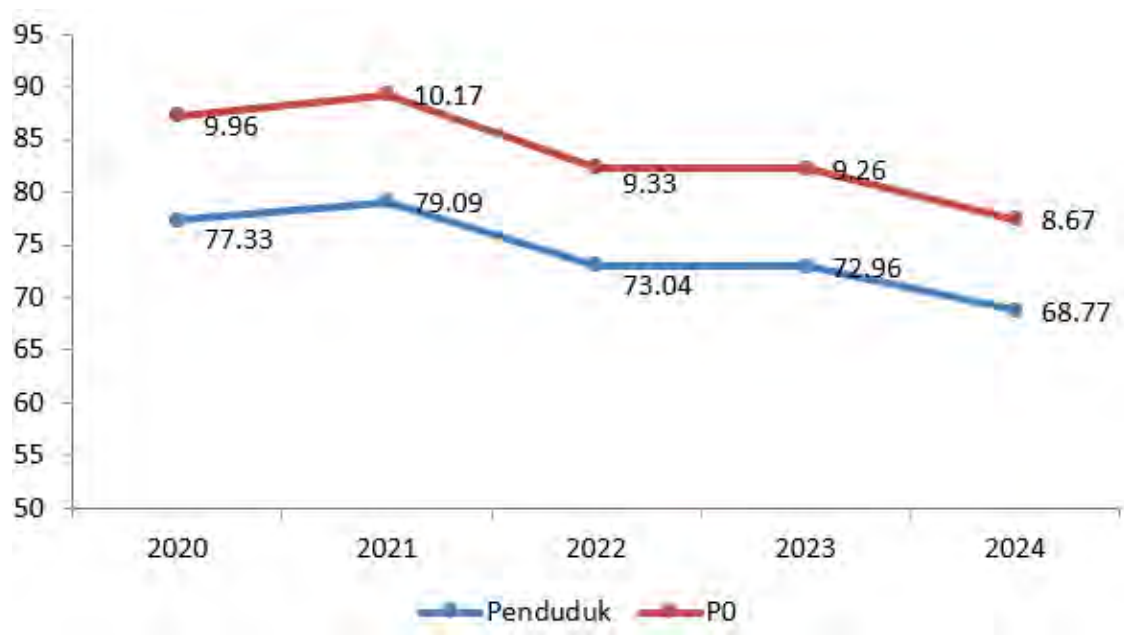
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 8,67% atau sebesar 68.770 jiwa masih hidup dibawah garis kemiskinan. Angka ini lebih rendah dari Nasional yaitu sebesar 9,03% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,47%. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung berada di urutan ke 13 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah dan urutan ke 2 di Kawasan Gelangmanggung (Kabupaten Magelang sebesar 10,83% dan Kota Magelang sebesar 5,94%) sebagaimana gambar berikut:

Sumber: BPS, 2024



Gambar 3.1
Posisi relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung

Persentase kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif fluktuatif dari tahun 2020-2024. Puncak peningkatan angka kemiskinan terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2022, terjadi penurunan angka kemiskinan berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mulai ada pemulihan ekonomi yang berdampak pada penurunan persentase kemiskinan hingga tahun 2023. Presentase tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebesar 9,26% dan mengalami penurunan pada tahun 2024, presentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung adalah sebesar 8,67%. Berikut adalah gambar perkembangan Presentase Kemiskinan Kabupaten Temanggung mulai dari tahun 2020-2024:



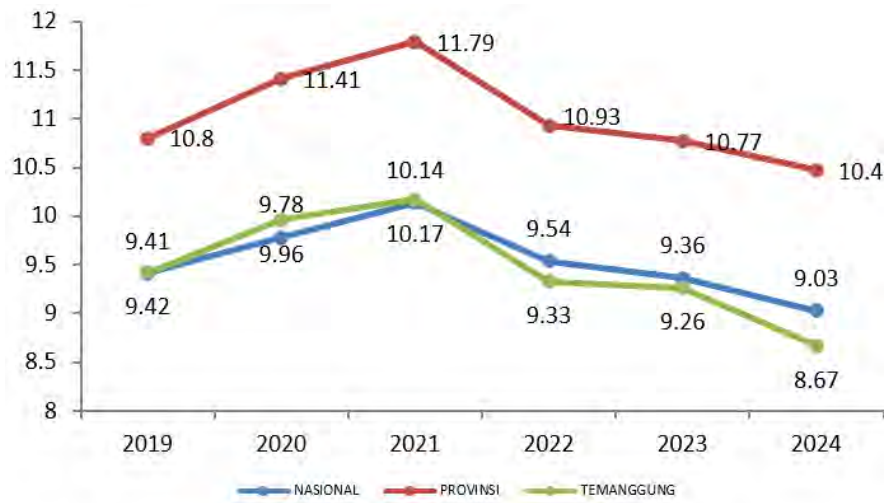
Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024

Dilihat dari sisi relevansi, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan

Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka dari itu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mendukung dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi. Perubahan angka kemiskinan Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2024 menurun sebesar 1,29% sementara Nasional 0,75% dan Provinsi Jawa Tengah 0,94% hal ini menunjukkan

efektifitas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah relevansi tingkat kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Teemanggung:

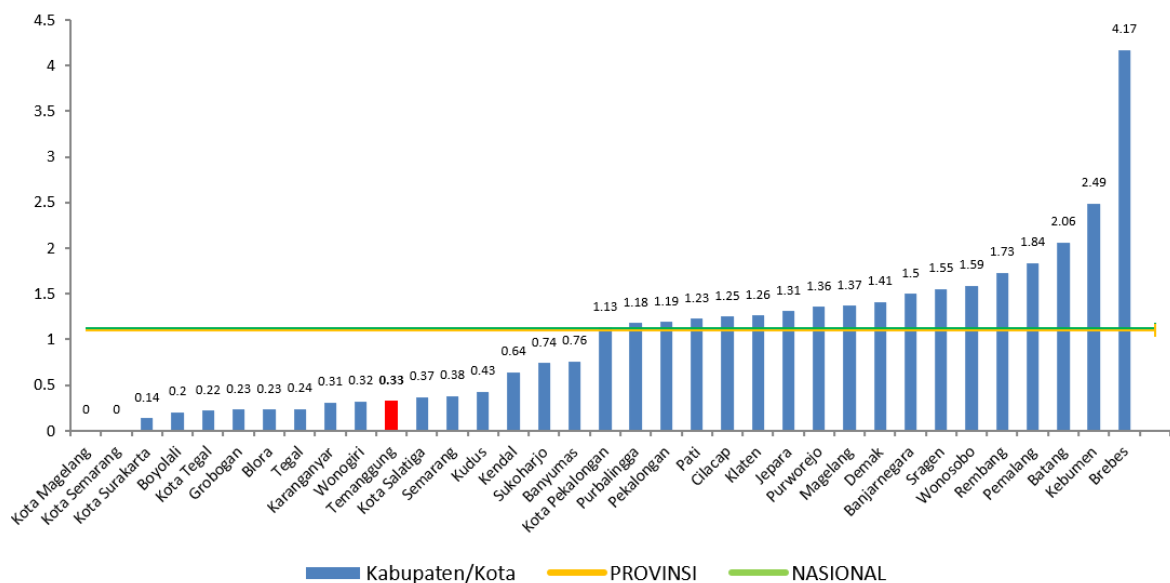


Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.3
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024

3.2.2 Kemiskinan Ekstrem

Selain kemiskinan, Presiden Republik Indonesia menyampaikan arahan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem (US\$1,9 PPP) hingga nol persen tercapai pada 2024, lebih cepat enam tahun dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung terus mengalami penurunan dan pada 2024 mencapai angka 0,26%. Pada tahun tersebut Kabupaten Temaggung lebihbaik dari capaian Nasional sebesar 1,12% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,1% serta menempati urutan ke 11 dari 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah. Posisi relatif tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Kemenko PMK, 2024

Gambar 3.4
Posisi relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Temanggung

Capaian tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sebesar 0,33% lebih rendah dari Nasional sebesar 1,12% dan Provinsi Jawa Tengah 1,1% hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut menandakan bahwa upaya Kabupaten Temanggung berkomitmen dalam penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden. Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Temanggung dari tahun 2021-2023 sebesar 1,74% sedangkan Nasional 1,02% dan Provinsi sebesar 1,17% sehingga dapat disimpulkan Kabupaten Temanggung lebih efektif dalam melakukan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Relevansi tingkat kemiskinan ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Temanggung tahun 2021-2024 sebagaimana berikut:



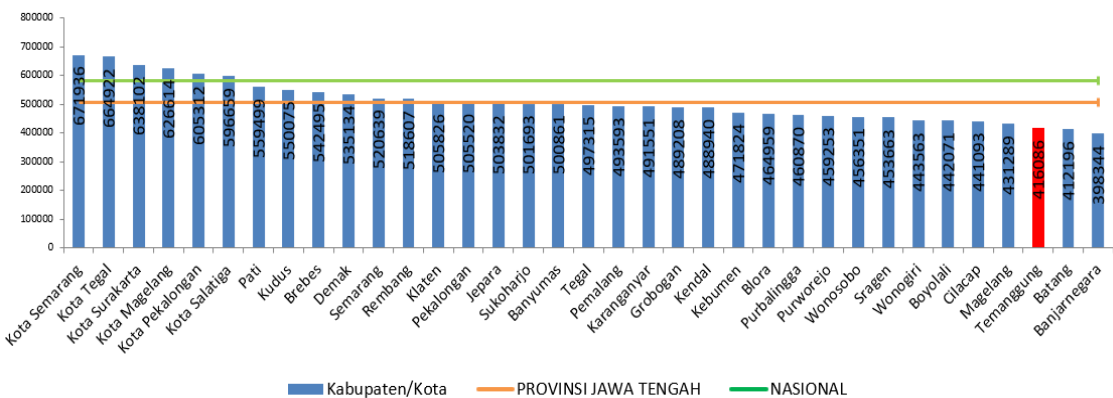
Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.5
Relevansi Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung tahun 2021-2023

Meskipun jumlah penduduk miskin ekstrem menurun, untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024 masih diperlukan upaya pengentasan kepada sekitar 2.580 jiwa di Kabupaten Temanggung.

3.2.3 Garis Kemiskinan (GK)

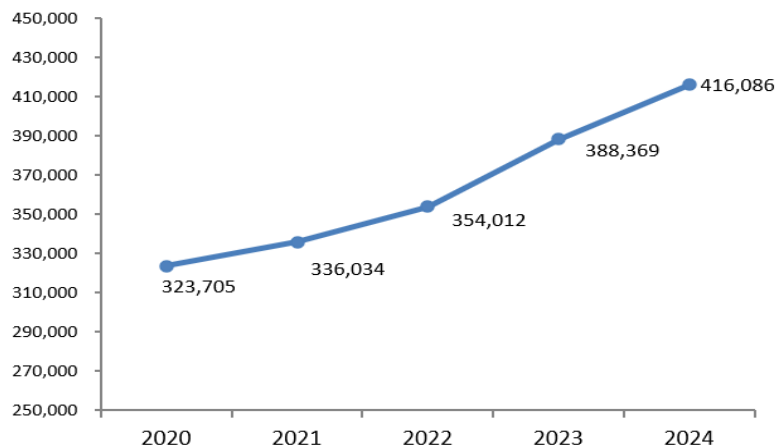
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yaitu Rp 416.086 dan Provinsi Jawa Tengah Rp 507.001. GK Kabupaten Temanggung berada pada posisi 33 dari 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah posisi relatif GK Kabupaten Temanggung.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.6
Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung

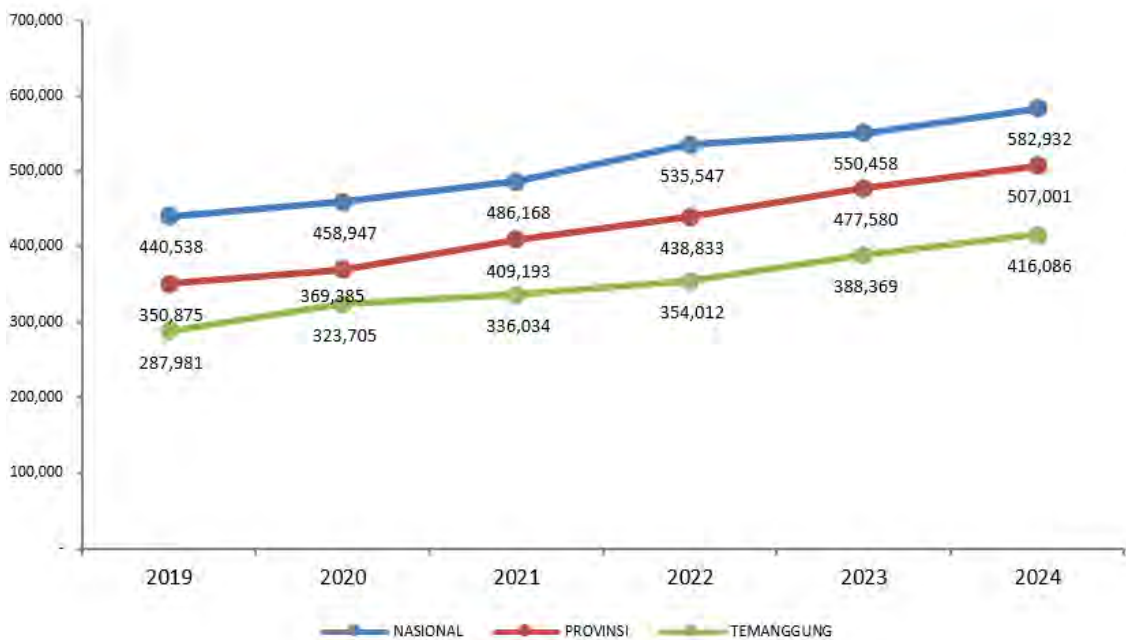
Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir walaupun saat pandemi Covid 19. Berikut adalah perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2024:



Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.7
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024

Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung terus mengalami kenaikan pada kurun waktu 5 tahun terakhir hingga pada tahun 2024 sebesar Rp. 416.086 dan berada di urutan ke 33 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah serta lebih rendah dari Nasional sebesar Rp. 582.932 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 507.001. Hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa pengeluaran masyarakat Temanggung masih rendah. Berikut adalah relevansi garis kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Temanggung:



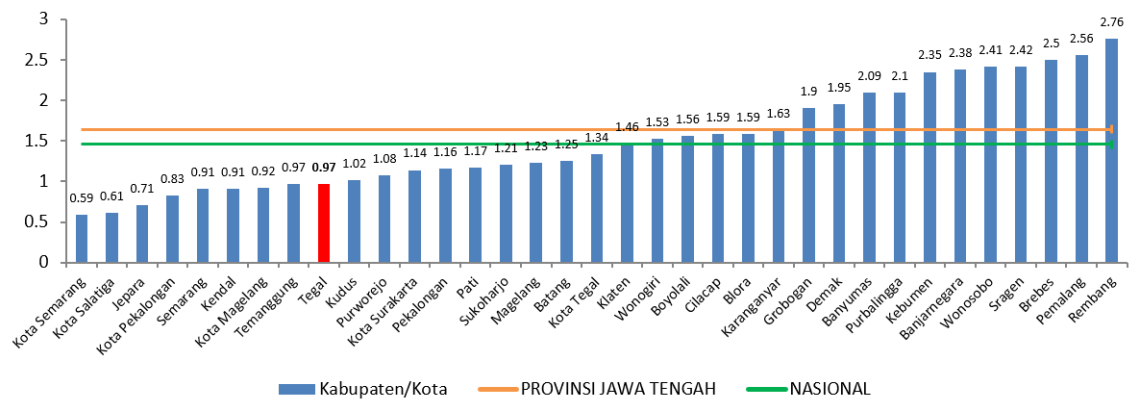
Sumber : BPS, 2024

Gambar 3.8
Perkembangan Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa efektifitas peningkatan garis kemiskinan, Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 hingga 2024 naik sebesar Rp. 92.381 masih lebih rendah dibanding Nasional Rp. 123.985 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 137.616 sehingga efektifitas peningkatan garis kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari Kabupaten Temanggung. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan efektif dan efisien sehingga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

3.2.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

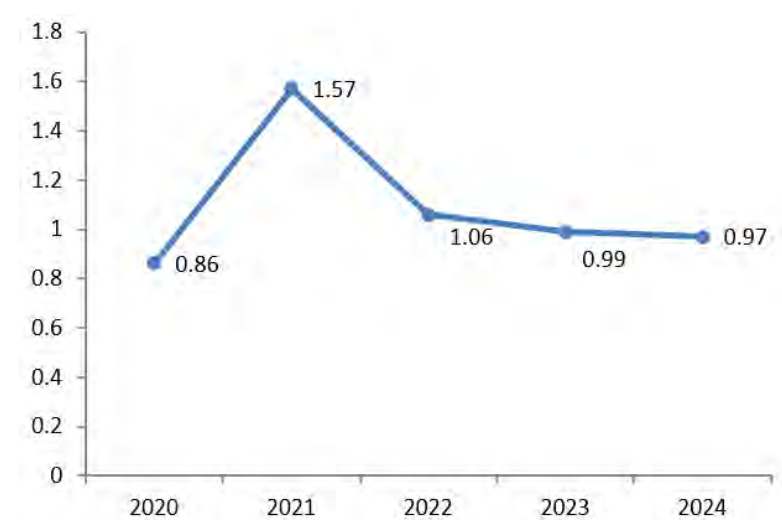
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran masing – masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 0,97 rendah dari P1 Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,46 serta Nasional sebesar 1,64 dan berada posisi ke 8 diatara 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah dan berada pada posisi ke 2 di Kawasan Gelangmanggung (Kota Magelang sebesar 0,92 dan Kabupaten Magelang sebesar 1,23). Berikut adalah posisi relatif Kabupaten Temanggung di Provinsi Jawa Tengah:



Sumber : BPS, 2024

Gambar 3.9
Posisi Relatif Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung

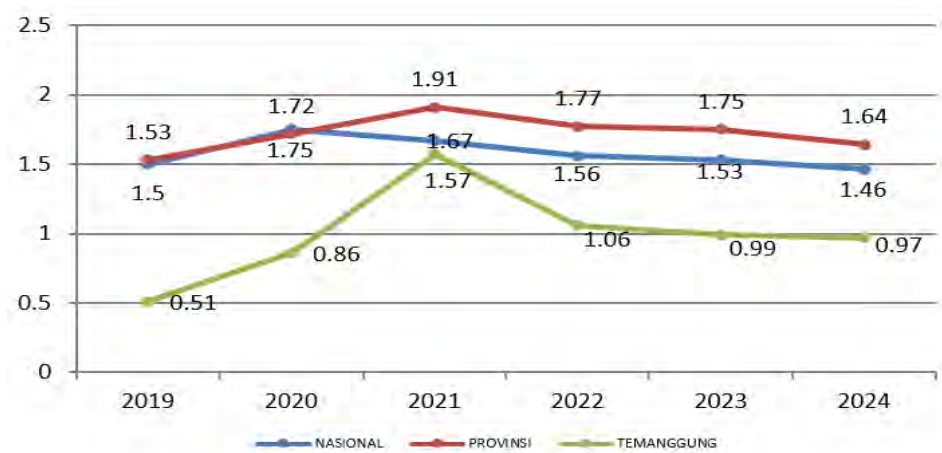
Perkembangan kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020-2021 P1 Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 0,86 menjadi 1,57. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid 19 yang terjadi. Namun pada tahun 2022 dan 2023 P1 mengalami penurunan menjadi 1,06 dan 0,99. Pada tahun 2024 P1 di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan namun tidak signifikan yaitu menjadi 0,97. Walaupun mengalami peningkatan yang tidak besar, hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk terus berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Berikut adalah perkembangan P1 Kabupaten Temanggung.



Sumber : BPS, 2024

Gambar 3.10
Perkembangan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Dilihat dari relevansi P1 Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir cenderung berbeda dan tidak relevan. Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa tengah mengalami puncak peningkatan pada tahun 2021, tetapi pada tahun tersebut P1 Nasional mengalami penurunan. Pada kurun waktu 2022 hingga 2024 P1 Nasional dan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, namun tidak relevan dengan P1 Temanggung yang mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 sedangkan mengalami peningkatan pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukan bahwa kesenjangan pengeluaran antar kelompok penduduk miskin semakin meningkat.



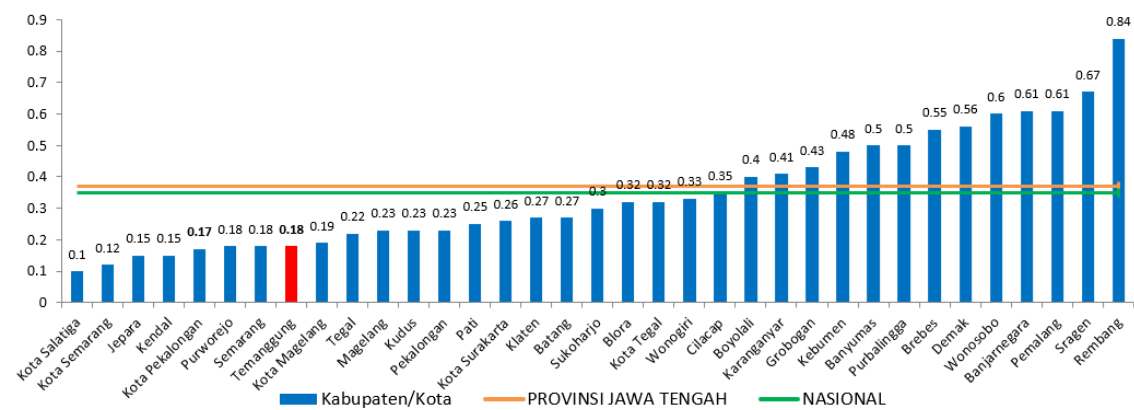
Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024,diolah

Gambar 3.11
Perkembangan Indeks Kedalaman Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa efektivitas P2 dari tahun 2020-2024 Nasional mengalami penurunan sebesar 0,29, Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,08 sedangkan Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan 0,46. Hal ini menunjukan bahwa efektifitas P1 Nasional dan Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari Kabupaten Temanggung.

3.2.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

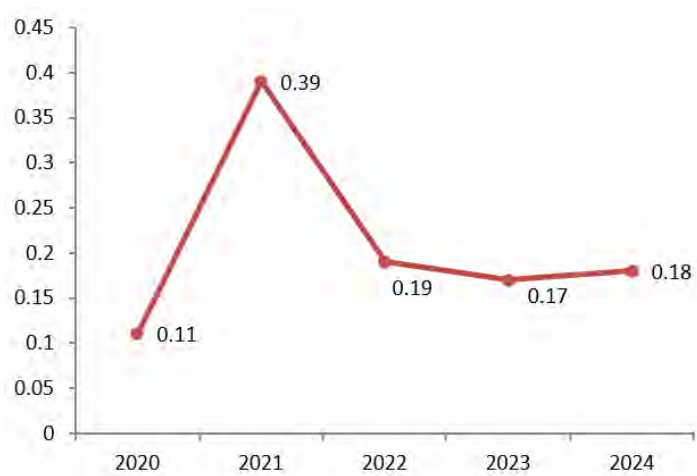
Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan ukuran yang menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 0,18 rendah dari P2 Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37 serta Nasional sebesar 0,35 dan berada posisi ke 8 diatara 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah dan berada pada posisi ke 1 di Kawasan Gelangmanggung (Kota Magelang sebesar 0,19 dan Kabupaten Magelang sebesar 0,23). Berikut adalah posisi relatif Kabupatenn Temanggung di Provinsi Jawa Tengah:



Sumber : Data diolah, 2024

Gambar 3.12
Posisi Relatif Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung

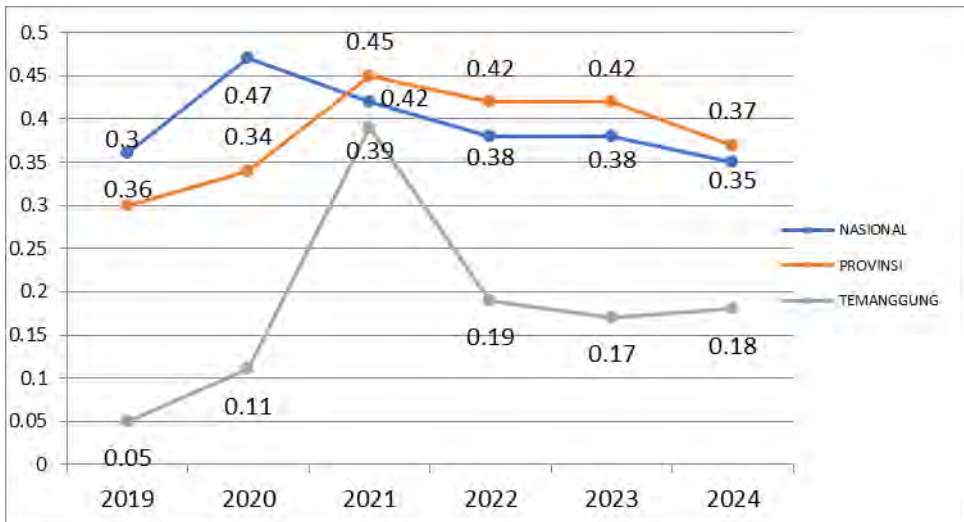
Perkembangan kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020-2021 P2 Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan hal ini dampak dari pandemi Covid 19 yang terjadi, namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 0,19 dan 0,17. Pada tahun 2024 P2 di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan namun tidak signifikan menjadi 0,18, walaupun mengalami peningkatan yang tidak besar namun hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk terus berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Berikut adalah perkembangan P2 Kabupaten Temanggung:



Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024,diolah

Gambar 3.13
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Dilihat dari relevansi P2 Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir cenderung berbeda dan tidak relevan. Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa tengah mengalami puncak peningkatan pada tahun 2021, tetapi pada tahun tersebut P2 Nasional mengalami penurunan. Pada kurun waktu 2022 hingga 2024 P2 Nasional dan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, namun tidak relevan dengan P2 Temanggung yang mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.14
Perkembangan Indeks Kedalaman Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa efektivitas penurunan P2 dari tahun 2020-2024 pada tingkat Nasional mengalami penurunan sebesar 0,12, Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,05, sedangkan Kabupaten Temanggung

mengalami peningkatan 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas P2 Nasional dan Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari Kabupaten Temanggung.

3.2.6 Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan

Kondisi kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami perbaikan setelah melalui masa-masa sulit pasca pandemi COVID-19. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dan berbagai pihak telah berhasil mengubah kondisi kemiskinan. Capaian indikator makro penanggulangan kemiskinan tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Makro

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Nasional Tahun 2024	Capaian Provinsi Tahun 2024	Capaian Kabupaten Tahun 2024	Analisis (posisi relatif dan perkembangan antar waktu)
1	Persentase penduduk miskin (P0)	9,03%	10,47%	8,67%	- Posisi relatif P0 Kabupaten Temanggung berada di bawah provinsi dan nasional - Perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin Kabupaten Temanggung relatif sedikit pada tahun 2019, namun naik pada tahun 2020-2021 akibat pandemi covid19 dan kembali menurun pada 2022-2024.
2	Jumlah Penduduk miskin	25.219.200 jiwa	3.704.330 jiwa	68.770 jiwa	- Perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin Kabupaten Temanggung relatif sedikit pada tahun 2019, namun naik pada tahun 2020-2021 akibat pandemi covid19 dan kembali menurun pada 2022-2024.
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	1,46	1,64	0,97	- Posisi relatif P1 Kabupaten Temanggung berada di bawah provinsi dan nasional - Perkembangan antar waktu P1 Kabupaten Temanggung relatif sedikit pada tahun 2019, namun naik pada tahun 2020-2021 akibat pandemi

No	Indikator	Capaian Nasional Tahun 2024	Capaian Provinsi Tahun 2024	Capaian Kabupaten Tahun 2024	Analisis (posisi relatif dan perkembangan antar waktu)
					covid19 dan kembali menurun pada 2022-2024. - Perkembangan P1 Kabupaten Temanggung efektif dan efisien mendukung penurunan angka kemiskinan Jateng dan nasional
4	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,35	0,37	0,18	- Posisi relatif P2 Kabupaten Temanggung berada di bawah provinsi dan nasional. - Perkembangan antar waktu P2 Kabupaten Temanggung trennya relatif sedikit pada tahun 2019, namun naik pada tahun 2020-2021 akibat pandemi covid19 dan kembali menurun pada 2022-2023. Namun mengalami kenaikan sebesar 0,01 pada 2024. - Perkembangan P2 Kabupaten Temanggung efektif dan efisien mendukung penurunan angka kemiskinan Jateng dan nasional
5	Garis Kemiskinan (GK)	Rp582.392	Rp507.001	Rp416.086	- Posisi relatif GK Kabupaten Temanggung masih berada di bawah Provinsi Jateng dan nasional - Perkembangan antar waktu GK Kabupaten Temanggung trennya meningkat dari tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2024, diolah

Akan tetapi, Kabupaten Temanggung masih dihadapkan dengan tantangan signifikan dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan data diatas, tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses pendidikan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, serta infrastruktur yang belum memadai, berkontribusi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat.

Profil kemiskinan diatas memberikan gambaran secara makro yang dapat digunakan sebagai analisis pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara umum. Gambaran makro tersebut dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan hingga ke level terkecil serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Gambaran makro dapat pula menjadi *early warning system* secara geografis bagi pemerintah daerah dalam pemetaan potensi, gangguan dan ancaman dalam pembangunan daerah khususnya penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan dalam intervensi penanggulangan kemiskinan dibutuhkan data mikro sebagai data sasaran yang memuat informasi *by name by address* secara detail agar intervensi tersebut tepat sasaran dan terukur. Data tersebut dapat memberikan informasi kebutuhan sehingga terlihat bentuk intervensi yang dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan.

Data mikro kemiskinan tersebut di kelola oleh Dinas Sosial yang kemudian menjadi prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor. Dengan menjadikan data mikro kemiskinan sebagai fondasi perencanaan dan intervensi, dapat dikembangkan kebijakan yang lebih inklusif, mengurangi kesenjangan, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, data mikro juga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam merancang strategi penanggulangan kemiskinan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi lokal, pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih efektif dan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat, guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

3.2.7 Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Gini

3.2.7.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Apabila pertumbuhan ekonomi rendah maka kemiskinan akan rentan terjadi. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berimbang pada kaum miskin apabila pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Pada kurun waktu 2019 hingga 2023 ekonomi Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif, penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020 sebesar -2,13% dari sebelumnya sebesar 5,05% pada tahun 2019 serta naik pada tahun 2021 menjadi 3,34% dan 2022 menjadi 5,2% namun pada tahun 2023 mengalami

penurunan menjadi 5%. Berikut perbandingan perkembangan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung:



Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024,diolah

Gambar 3.15
Relevansi Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan gambar diatas relevansi antara Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi cenderung sejalan dari tahun 2019 hingga 2022, pada tahun 2020 terjadi puncak peningkatan tingkat kemiskinan serta penurunan drastis pertumbuhan ekonomi dampak dari Pandemi Covid 19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan dan Tingkat Kemiskinan menurun hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh aktif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Namun pada tahun 2023 tingkat kemiskinan menurun di angka 9,33% sedangkan pertumbuhan ekonomi melambat di angka 5%. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya kebijakan yang dilakukan mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui program sosial dan kualitas hidup seperti pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, serta adanya dinamika perekonomian seperti pada sektor pertanian dan industri yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar tetap terjamin dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat meskipun pertumbuhan ekonomi melambat.

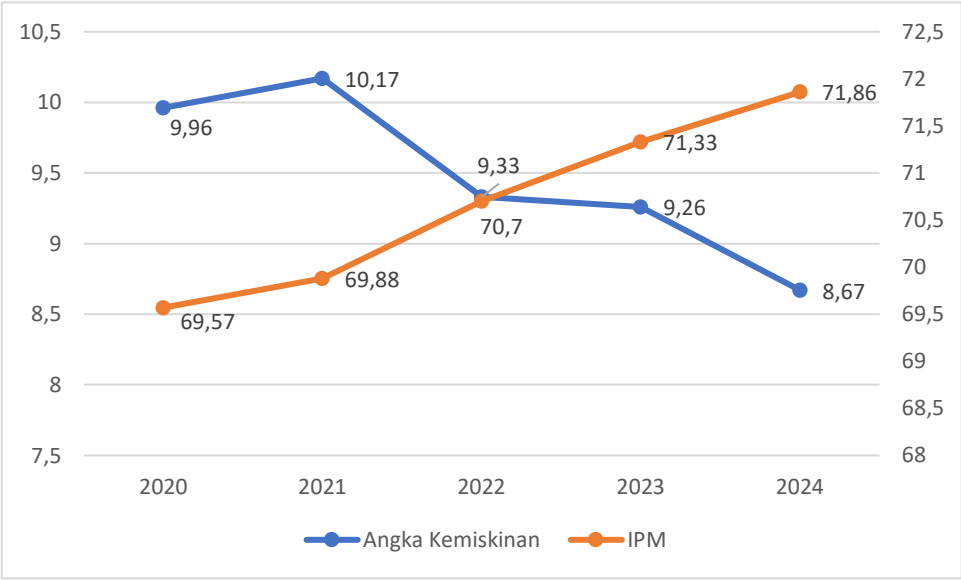
3.2.7.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mencerminkan kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Ketika IPM suatu wilayah rendah, dapat diartikan bahwa masih ada keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan penghasilan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menjadi akar permasalahan kemiskinan.

Kemiskinan tinggi sering kali menjadi penghambat utama dalam peningkatan IPM. Keluarga miskin mengalami kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, menyekolahkan anak-anak mereka, atau memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Anak-anak dari keluarga miskin dimungkinkan terpaksa bekerja daripada bersekolah, sehingga terjebak dalam pendidikan rendah yang akhirnya membatasi peluang kerja di masa depan. Selain itu, kesehatan yang buruk akibat kurangnya akses terhadap makanan bergizi dan layanan medis membuat produktivitas menurun, sehingga dapat memperparah kemiskinan.

Sebaliknya, rendahnya IPM juga memperburuk kemiskinan. Kesehatan yang buruk mengurangi usia harapan hidup dan kemampuan bekerja. Pendidikan yang rendah membatasi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih layak, sementara pendapatan rendah membuat masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam kurun waktu 2020-2024 IPM Kabupaten Temanggung cenderung mengalami pertumbuhan yang selaras dengan angka kemiskinan. Ketika IPM naik, angka kemiskinan menurun. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan mengalami peningkatan dari 9,96 menjadi 10,17 akan tetapi IPM turut mengalami peningkatan dari 69,57 menjadi 69,88. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2021 peningkatan IPM tidak selalu berarti penurunan angka kemiskinan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah dimensi IPM tidak mencakup seluruh aspek kemiskinan, seperti ketimpangan sosial-ekonomi atau dampak guncangan ekonomi jangka pendek. Faktor eksternal seperti pandemi menciptakan tekanan ekonomi besar, terutama pada kelompok rentan, meskipun ada kemajuan dalam kesehatan dan pendidikan. Selain itu, distribusi pembangunan yang tidak merata dapat meningkatkan IPM secara agregat, tetapi tidak mengurangi kemiskinan pada kelompok tertentu. Perbandingan perkembangan tingkat kemiskinan dan IPM Kabupaten Temanggung tersaji pada grafik berikut:



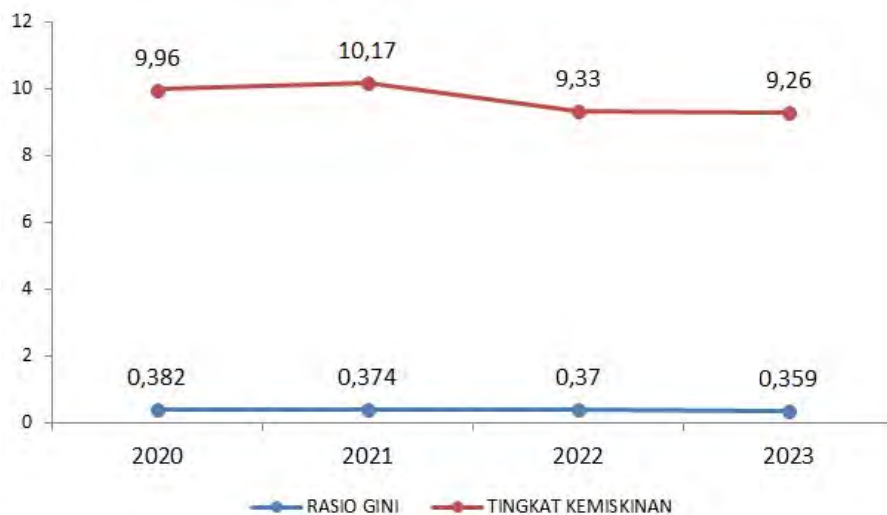
Sumber : BPS Temanggung, 2025

Gambar 3.16
Relevansi Tingkat Kemiskinan dan IPM

3.2.7.3 Gini Rasio

Rasio Gini mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat, sedangkan kemiskinan mengacu pada persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan yang tinggi, seperti tercermin dari rasio Gini yang meningkat, dapat memperburuk kemiskinan, bahkan dalam masyarakat yang pendapatan rata-ratanya terus meningkat. Hal ini terjadi karena kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara kelompok masyarakat miskin tidak mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Sebaliknya, ketimpangan yang rendah, seperti yang tercermin dari rasio Gini yang lebih kecil, dapat membantu menurunkan angka kemiskinan. Ketika pendapatan lebih merata, dapat diartikan bahwa kelompok masyarakat yang berada di lapisan ekonomi bawah memiliki peluang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki kondisi hidup. Rasio Gini Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 2020-2023 menunjukkan keselarasan dengan penurunan angka kemiskinan sebagaimana gambar berikut:



Sumber : BPS Temanggung, 2025

Gambar 3.17
Relevansi Rasio Gini dengan Tingkat Kemiskinan

Dilihat dari gambar diatas perkembangan Gini Rasio dan Tingkat Kemiskinan dari tahun 2020-2023 relatif selaras menurun, namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan meningkat dikarenakan pandemi Covid 19 sementara rasio gini tetap turun. Pada tahun 2022 hingga 2023 rasio gini dan tingkat kemiskinan sama-sama mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukan hubungan positif yang berarti upaya dalam pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan berjalan dengan efektif sehingga menurunkan rasio gini dan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2020, Rasio Gini Kabupaten Temanggung berada pada angka 0,382. Pada saat yang sama, angka kemiskinan mencapai 9,96. Pada tahun 2021, Rasio Gini turun menjadi 0,374, sedangkan angka kemiskinan naik menjadi 10,17. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan Rasio Gini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan yang sebagian besar didorong oleh bantuan sosial dan penurunan penghasilan di kalangan kelas menengah ke atas. Di sisi lain, peningkatan angka kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti hilangnya penghasilan pada kelompok rentan sebagai dampak ekonomi pada saat pandemi serta adanya kenaikan harga barang pokok yang memperbesar tekanan pada kelompok miskin.

Pada tahun 2022, tren positif berlanjut. Rasio Gini menurun lagi menjadi 0,37, sekaligus disertai penurunan angka kemiskinan menjadi 9,33%. Hingga tahun 2023, Rasio Gini Kabupaten Temanggung terus turun ke angka 0,359, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 8,67%. Capaian ini mencerminkan keselarasan antara upaya redistribusi pendapatan dengan penurunan kemiskinan.

3.3 Isu Strategis Daerah

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun hal tersebut masih menjadi salah satu isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa Isu lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat:

3.3.1 Isu Strategis Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi yang penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat sehingga menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Isu terkait pemerataan pendidikan masih menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah karena dengan adanya pendidikan yang merata dalam suatu wilayah maka akan membuat masyarakatnya menjadi produktif dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 12,62 tahun yang tergolong masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang putus sekolah terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, dan belum banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 7,53 tahun yang tergolong masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih perlu adanya perhatian dari pemerintah.

Capaian kedua indikator diatas menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih perlu komitmen dan upaya keras dari Pemerintah karena pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing sehingga dapat berdampak dalam peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

3.3.2 Isu Strategis Bidang Kesehatan

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan, dan mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu

investasi dalam pembangunan daerah agar menciptakan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Temanggung tergolong tinggi, pada tahun capaian 2024 UHH sebesar 75,94 tahun namun ada beberapa permasalahan di bidang kesehatan seperti masih adanya bayi dan balita dengan gizi buruk, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB), serta masih tingginya Penyakit Tidak Menular (PTM).

Berdasarkan permasalahan diatas bidang kesehatan menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Temanggung baik dari pembangunan sarana prasarana pendukung maupun sumberdaya kesehatannya. Dengan terjaminnya derajat kesehatan manusia yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kompeten, dan berdaya saing sehingga dapat bersaing di pasar kerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

3.3.3 Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 2,35% dengan jumlah penganggur sebesar 11.823 orang. Hal tersebut dapat berdampak buruk untuk perekonomian di masyarakat dan berpeluang besar menambah warga miskin di Kabupaten Temanggung karena warga yang tidak mempunyai pekerjaan tidak akan mendapat penghasilan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

3.3.4 Isu Strategis Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan yang didukung dari sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran ketahanan pangan sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional maupun daerah, dengan mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagian besar bekerja di sektor pertanian hal tersebut terlihat dari potensi komoditas utama salah satunya dari sektor pertanian. Hal tersebut didukung dengan sumber daya alam yang berlimpah.

Salah satu isu dalam bidang pertanian adalah pertanian yang efektif, efisien, dan bernilai ekonomi tinggi. Dengan adanya pertanian yang efektif maka

dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat serta menjamin ketersediaan bahan pangan. Pertanian membutuhkan perhitungan efisiensi dari minimalisasi biaya penggunaan input dalam usaha tani untuk mencapai output tertentu.

Dalam menciptakan pertanian yang efektif, efisien, dan bernilai ekonomi tinggi beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Temanggung diantaranya yaitu belum optimalnya produktivitas pertanian, belum optimalnya pemanfaatan alat mesin pertanian, belum memadainya sarana pergudangan/penyimpanan produk-produk pertanian dan bibit tanaman unggul dan masih terbatasnya jaringan irigasi dalam kondisi baik.

3.3.5 Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan karena meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar akses perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

Gambaran kemiskinan salah satunya dapat terlihat dari permasalahan rumah tidak layak huni, ketersediaan listrik, ketersediaan jaringan air minum dan sanitasi layak. Beberapa hal tersebut masih dapat ditemui di Kabupaten Temanggung, di sisi lain masih adanya kawasan permukiman kumuh dimana menjadi kawasan tempat tinggal sebagian besar penduduk miskin. Belum meratanya aksesibilitas antar wilayah juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi isu berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Temanggung.

3.3.6 Isu Strategis Bidang Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Persentase banyaknya PPKS yang terlayani atau tertangani menjadi hal yang harus ditangani dengan berbagai permasalahan seperti keterbatasan fasilitas pelayanan PPKS, keterbatasan anggaran pada Pemerintah Daerah serta permasalahan kevalidan data sasaran dikarenakan banyaknya sumberdata terkait kemiskinan serta keaktifan dari kelurahan/desa dalam proses pendataan.

3.3.7 Isu Strategis Bidang Pembangunan Desa

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi alam, sumber daya manusia dan tata kelola pemerintah desa yang baik.

Kemandirian Desa dapat diukur dengan Indeks Desa yang Mandiri yang dapat memberikan gambaran terhadap perkembangan suatu Desa dimana dalam hal ini status /klasifikasi paling adalah Desa Mandiri.

Dalam hal ini jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebanyak 101 Desa dari total 266 Desa. Hal ini berarti masih banyak desa yang harus meningkatkan tingkat kemandiannya beriringan dengan program-program nyata terkait pembangunan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi dasar-dasar menjadi desa berstatus mandiri. Maka dari itu kemandirian desa masih menjadi isu yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

3.4 Determinan Kemiskinan Daerah

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan ekonomi semata. Sebagai fenomena sosial yang multidimensional, kemiskinan mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi maka perlu menganalisis indikator utama kemiskinan non-konsumsi agar dapat mengetahui apa-apa saja masalah pada setiap bidang yang dihadapi oleh daerah yang mempengaruhi kondisi kemiskinan daerah secara umum. Kemiskinan multidimensi ini meliputi kemiskinan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dasar, bidang pembangunan desa, bidang ketenagakerjaan, bidang ketahanan pangan serta bidang sosial.

Determinan kemiskinan daerah menjelaskan akar masalah yang dihadapi pada masing-masing bidang kemiskinan yang diketahui berdasarkan analisis dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan. Determinan kemiskinan juga menjelaskan daerah prioritas intervensi wilayah sebagai bahan intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

3.4.1 Bidang Pendidikan

a. Masalah Utama Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang dapat mendukung upaya penurunan kemiskinan, oleh karena itu indikator-indikator pada bidang pendidikan masuk menjadi indikator kemiskinan non konsumsi. Pendidikan tidak akan langsung berdampak pada penurunan kemiskinan, namun dengan pendidikan yang berkualitas penduduk miskin akan memiliki peluang lebih tinggi untuk keluar dari jurang kemiskinan.

Masalah utama pada bidang pendidikan adalah belum meratanya akses pendidikan di Kabupaten Temanggung. Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, agama, suku, atau daerah tempat tinggal.

Upaya untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan diantaranya adalah :

1. Membangun infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan
2. Meningkatkan kualitas pendidik
3. Melaksanakan program bantuan pendidikan
4. Menyediakan sarana angkutan gratis kepada siswa.

Akses pemerataan pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa kaitan utama antara keduanya:

1. **Komponen Utama IPM:** IPM mengukur tiga dimensi utama: kesehatan (diukur dengan usia harapan hidup), pendidikan (diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita per tahun). Akses pemerataan pendidikan secara langsung mempengaruhi dua dari tiga dimensi ini: pendidikan dan standar hidup layak.
2. **Pendidikan dan IPM:** Salah satu komponen penting dalam penghitungan IPM adalah indikator pendidikan, yang mencakup rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pemerataan pendidikan yang baik berarti lebih banyak individu mendapatkan akses ke pendidikan dasar dan lanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ini akan berdampak positif pada nilai IPM.
3. **Dampak pada Kesehatan dan Standar Hidup Layak:** Pendidikan yang merata dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang berkontribusi pada penghasilan yang lebih tinggi dan kesehatan yang lebih baik. Individu yang terdidik cenderung memiliki akses lebih baik ke layanan kesehatan, informasi kesehatan, dan peluang kerja yang lebih baik, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan IPM.
4. **Siklus Pembangunan:** Pemerataan pendidikan membantu memutus siklus kemiskinan. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, individu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan, pada gilirannya, dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan IPM secara keseluruhan.

5. **Pengembangan Keterampilan dan Inovasi:** Pendidikan yang merata meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja, yang penting untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang berkembang dengan baik berkontribusi pada pendapatan per kapita yang lebih tinggi, pengeluaran riil per kapita per tahun yang tinggi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang semakin baik, dan kondisi hidup yang lebih baik, yang secara langsung mempengaruhi IPM.
6. **Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan:** Pendidikan juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan kesejahteraan, seperti pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang lebih inklusif dan adil cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi karena faktor-faktor tersebut mendukung kesejahteraan umum.
7. **Pengurangan Ketimpangan:** Pemerataan pendidikan membantu mengurangi ketimpangan dalam akses dan peluang, yang dapat meningkatkan IPM di seluruh populasi. Dengan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, kita dapat meningkatkan hasil pendidikan, kesehatan, dan standar hidup bagi kelompok yang kurang beruntung.

Secara keseluruhan, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan berkontribusi secara signifikan pada peningkatan IPM dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup di masyarakat.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung mencapai 7,53 tahun yang berarti rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung di bawah capaian Jawa Tengah (8,02 tahun) dan capaian Nasional (8,85 tahun). Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung tahun 2024 mencapai 12,62 tahun yang artinya tingkat anak-anak Temanggung memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,62 tahun (Diploma I). Capaian HLS Temanggung pada Tahun 2024 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah (12,86 tahun) dan Nasional (13,21 tahun). Rendahnya RLS dan HLS disebabkan karena di Kabupaten Temanggung masih terdapat siswa yang putus sekolah, terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, dan belum banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

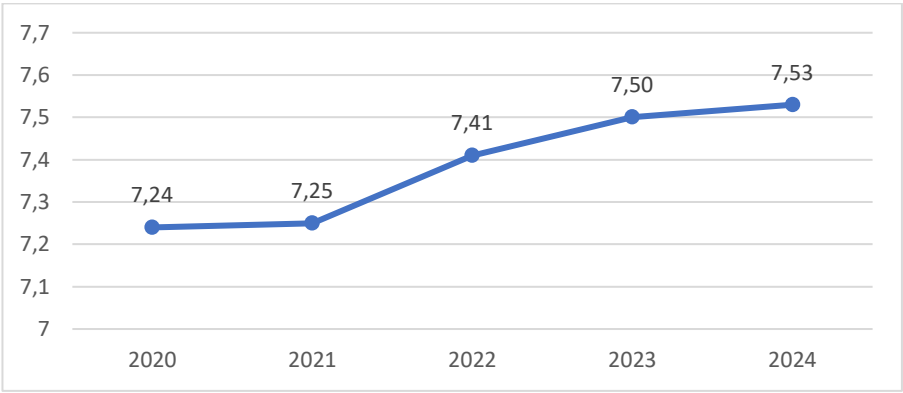
Sasaran yang ingin dicapai pada bidang pendidikan yaitu menurunnya Anak Tidak Sekolah (ATS). Angka anak tidak sekolah usia 7 – 18 tahun di Kabupaten Temanggung sejumlah 4.688 anak yang tersebar di 20 kecamatan (data dari Dinas Dindikpora, 2024). Data Tahun 2024 tersebut diperoleh dari Dindukcapil setelah dilakukan pengurangan data siswa yang

terdaftar pada sistem dapodik dan Emis usia 7-18 Tahun. Indikator yang mempengaruhi sasaran tersebut dapat dilihat pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berikut ini gambaran indikator kemiskinan non konsumsi pada bidang pendidikan.

1. Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan semua pendidikan formal.

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.18
Capaian Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 - 2024

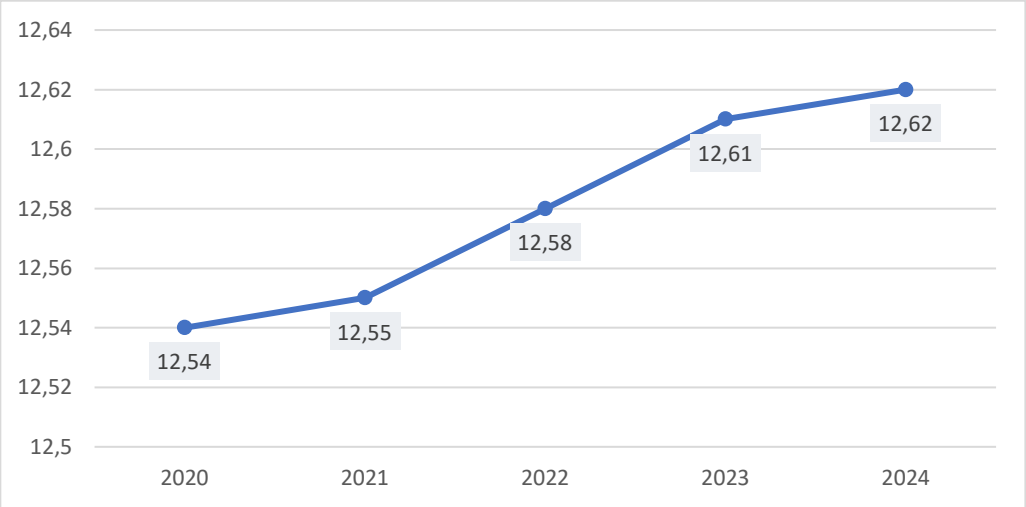
RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan grafik di atas RLS Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 sampai 2024 cenderung meningkat, namun kenaikan tidak terlalu signifikan. Rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,53 tahun atau hanya tamat di tingkat Sekolah Dasar (SD).

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur



tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

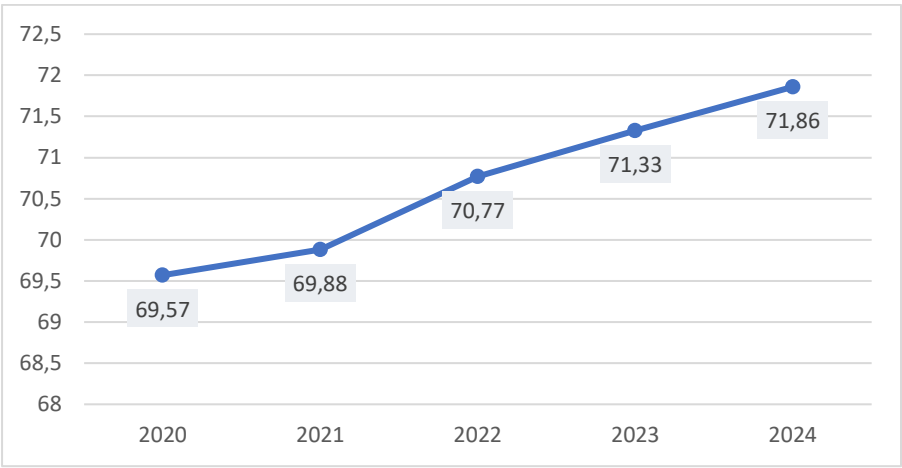


Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.19
Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 - 2024

Capaian Harapan Lama sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 12,62 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,62 tahun atau setara lulus Sekolah Menengah Atas (Diploma I).

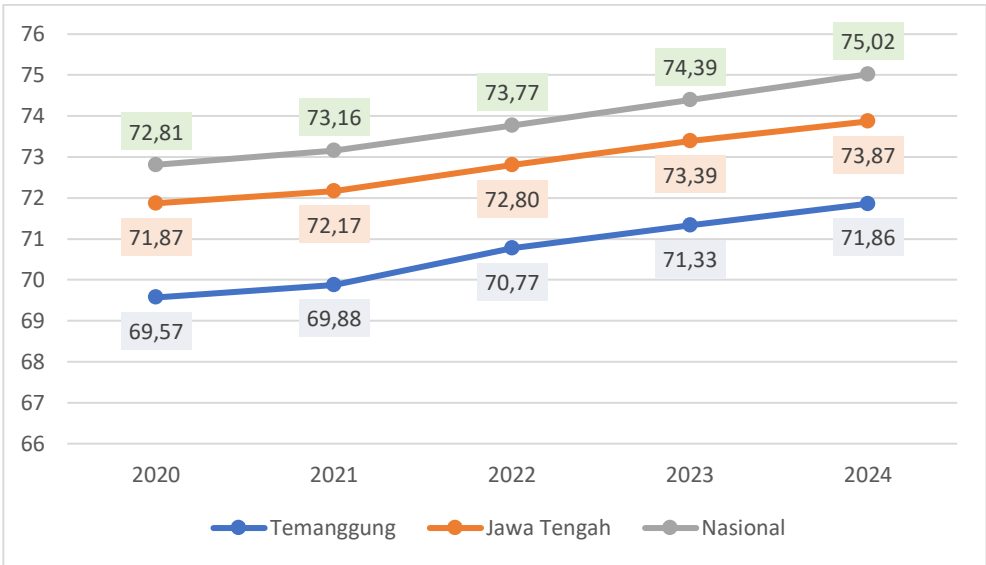
Belum optimalnya Rata- rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung mempengaruhi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.1
Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan grafik diatas, IPM Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2024. Namun jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Nasional, Kabupaten Temanggung masih tergolong rendah. Berikut gambar grafik IPM di Wilayah Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.20
Capaian IPM Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Rata-rata capaian Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

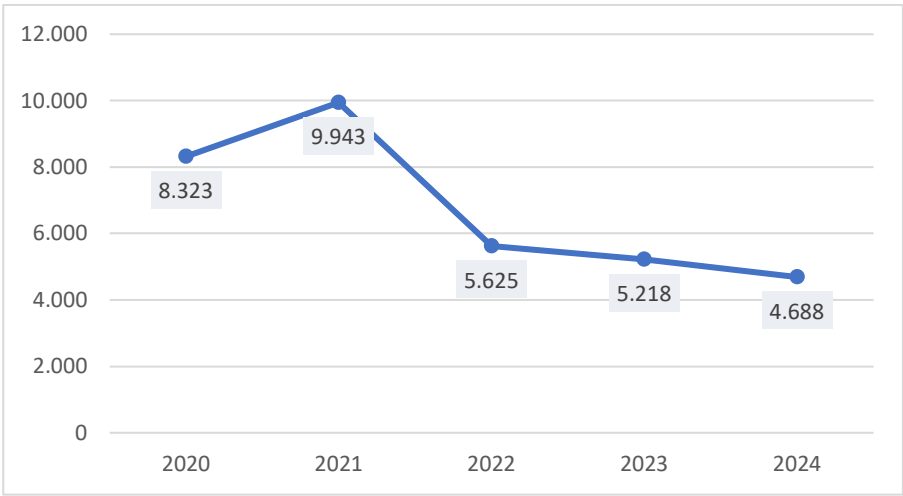
Indikator komposit IPM dari sektor pendidikan, diukur dengan capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan isu strategis pembangunan di Kabupaten Temanggung. Upaya pembangunan manusia dari sisi pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

3. Anak Tidak Sekolah (ATS)



Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) adalah anak yang berusia 7 (lima) s.d. 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah sekolah maupun yang belum tuntas dalam mengenyam pendidikan (Anak Putus Sekolah), mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Dengan demikian, semakin tinggi siswa yang putus sekolah maka akan berkontribusi meningkatkan jumlah ATS dan menghambat pertumbuhan capaian rata-rata lama sekolah.

Data partisipasi sekolah dasar di Kabupaten Temanggung telah mencapai lebih dari 100%, angka tersebut tentu sangat impresif, namun demikian apabila ditelisik lebih jauh sesungguhnya tidak semua anak usia pendidikan dasar dapat mengenyam pendidikan dasar atau dapat menyelesaikan pendidikan dasar hingga tamat (lulus). Berikut merupakan angka putus sekolah usia 7-18 tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.

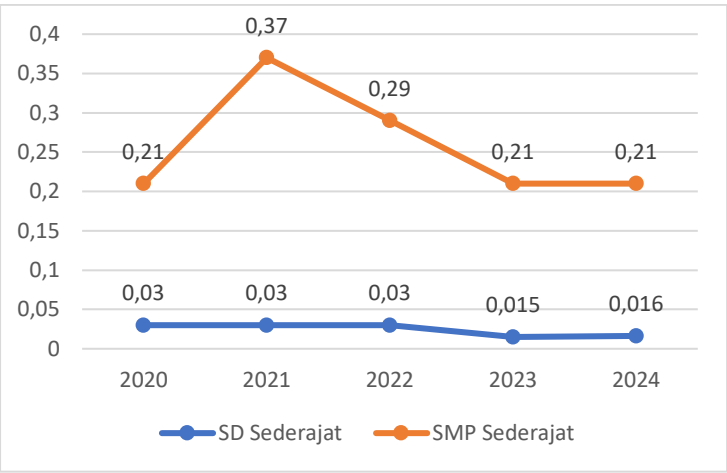


Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.21
Jumlah Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan grafik di atas, ditunjukkan bahwa anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebanyak 4.688 anak. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk anak usia 7-18 tahun yang sudah mengikuti pendidikan kesetaraan sebanyak 1.880 anak. Artinya, masih 40,10% yang mengakses atau melanjutkan pendidikannya pada sekolah kesetaraan.

Berikut merupakan data Angka Putus Sekolah jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat Tahun 2020-2024 di Kabupaten Temanggung.

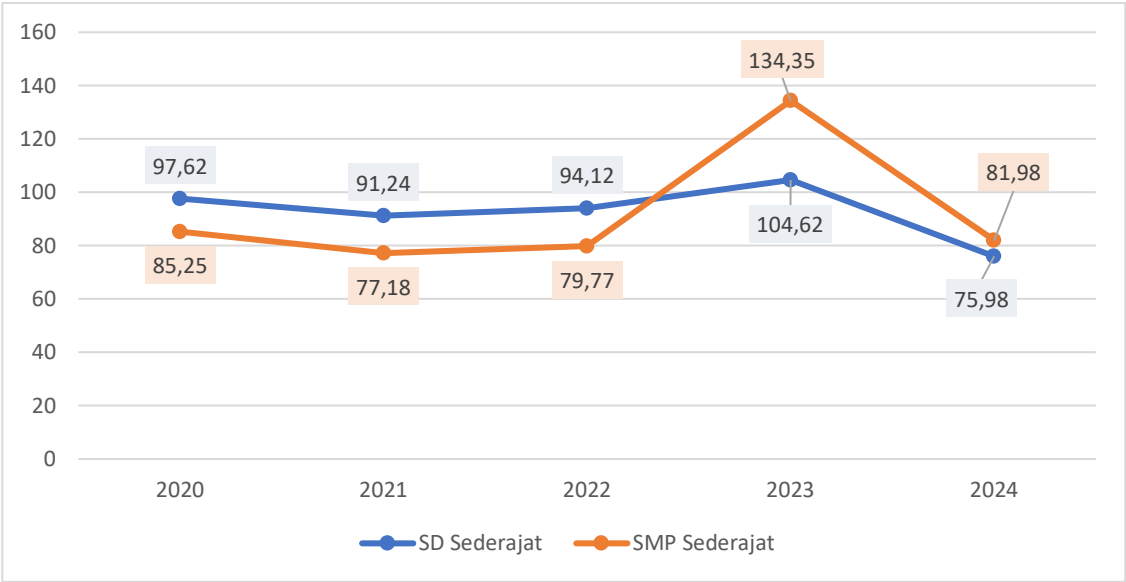


Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.22
Angka Putus Sekolah Tingkat SD Sederajat dan SMP Sederajat di Kabupaten Temanggung Tahun 2020– 2024

Berdasarkan grafik di atas, angka putus sekolah di Kabupaten Temanggung relatif kecil. Angka tersebut merupakan angka drop out (DO) di tingkat SD dan SMP. Capaian angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP pada Tahun 2024 cenderung hampir sama dengan tahun sebelumnya, yang mana capaian angka putus sekolah tingkat SD tercapai sebesar 0,016% dan capaian pada tingkat SMP sebesar 0,21%.

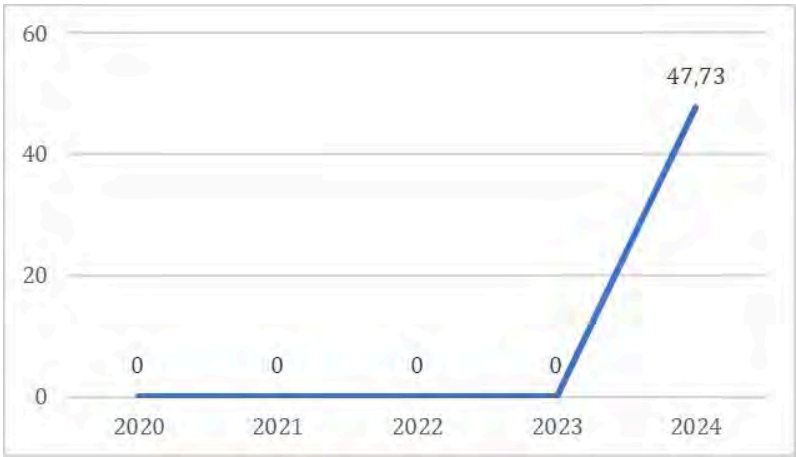
Untuk memahami gap tersebut maka perlu dilihat lebih dalam pada kondisi partisipasi pendidikan yang terjadi saat ini melalui Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur tingkat partisipasi anak sekolah yang tepat usia dan tepat jenjang, sebagai contoh APM mengukur berapa persen anak sekolah SD Sederajat dan SMP Sederajat. Pada Tahun 2024 APM Temanggung untuk jenjang SD Sederajat tercapai sebesar 75,98%. Sedangkan nilai APM SMP Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tercapai sebesar 81,98%. Capaian APM Kabupaten Temanggung cenderung mengalami pertumbuhan positif sepanjang 5 tahun terakhir.



Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.23
Capaian APM SD Sederajat dan SMP Sederajat
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

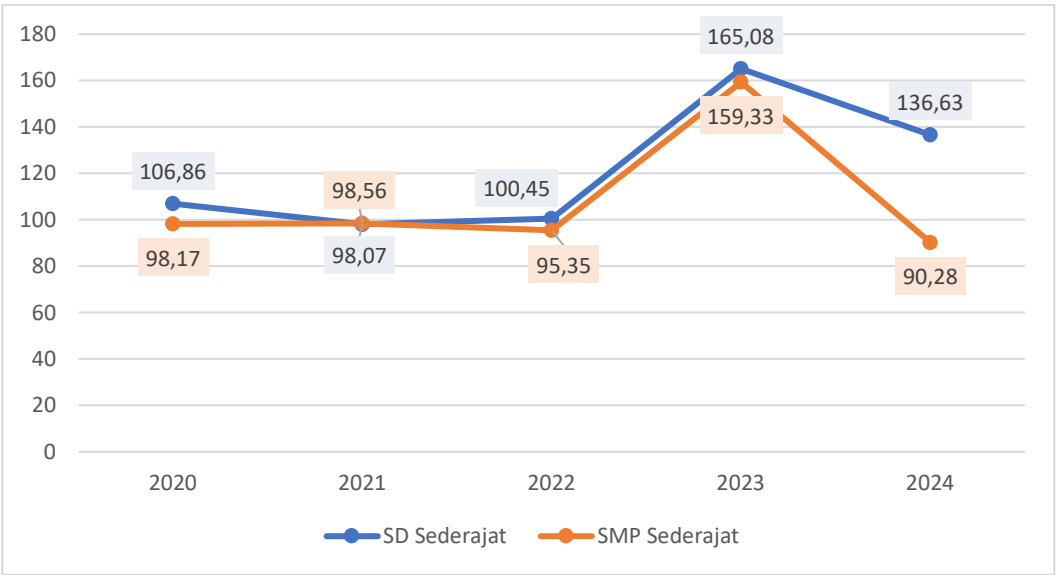
APM pada jenjang PAUD baru dihitung pada tahun 2024. Pada Tahun 2024 jumlah siswa usia 5-6 tahun yang dihitung tidak termasuk siswa RA dari Kemenag, hal ini dikarenakan rincian data per usia yang dimaksud tidak tersedia. Angka Partisipasi Murni penduduk usia 5-6 tahun pada Kabupaten Temanggung berdasarkan Triwulan IV tahun 2024 adalah 47,73%.



Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.24
Capaian APM Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

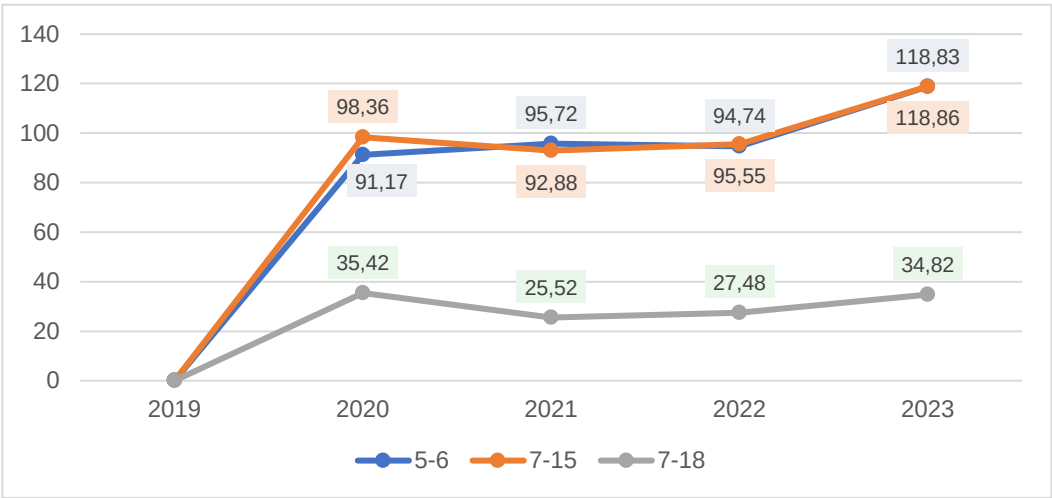
Untuk melihat partisipasi pendidikan yang lebih luas (tidak tepat jenjang dan tidak tepat usia), APM perlu disandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APK mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu (tidak tepat usia), sedangkan APS mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada usia tertentu (tidak tepat jenjang). Dengan kata lain APK melihat dari sisi *supply* (layanan pendidikan) sedangkan APS melihat dari sisi *demand* (siswa). APK Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 untuk jenjang SD Sederajat tercapai sebesar 165,08%. Sedangkan, capaian APK SMP tercapai sebesar 159,33%. APK cenderung mengalami fluktuasi pada 5 tahun terakhir ini.



Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.24
Capaian APK SD Sederajat dan SMP Sederajat
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Capaian APS di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 untuk kelompok usia 5-6 tahun tercapai sebesar 56,23%, usia 7-12 tercapai sebesar 54,19%, dan usia 13-15 tahun kesetaraan tercapai sebesar 85,14%. Jika melihat kelompok usia, capaian APS pada tahun 2023 cenderung baik pada kelompok usia 5-6 tahun dan 7-15 tahun yang telah mencapai angka di atas 95%. Sedangkan untuk kelompok usia 7-18 tahun kesetaraan baru mencapai 34,82%, artinya masih terdapat 65,18% anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.



Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2023

*Tahun 2024 perhitungan berbeda

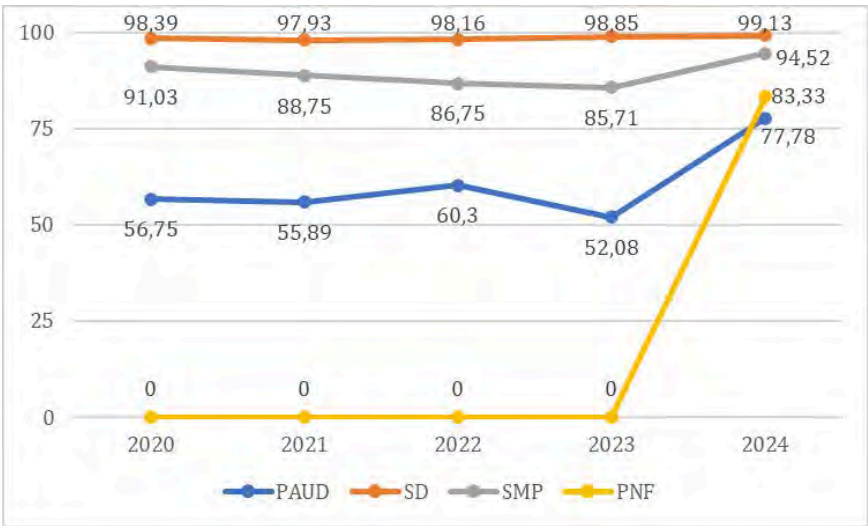
Gambar 3.25
Capaian APS Usia 5-6 Tahun, Usia 7-15 Tahun, dan Usia 7-18 Tahun
Kesetaraan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

Jika meninjau ulang data angka partisipasi dengan RLS dan HLS maka dapat diasumsikan bahwa rata-rata anak usia sekolah di Kabupaten Temanggung memang bersekolah hanya sampai jenjang SMP kelas 7 (kelas 1 SMP), sedangkan untuk jenjang selanjutnya tidak maksimal atau tidak dilanjutkan.

4. Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Temanggung cenderung terpusat di pusat ibukota Kabupaten Temanggung, sedangkan permukiman masyarakat telah menyebar di seluruh kecamatan Kabupaten Temanggung, seperti di daerah Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Pringsurat yang belum memiliki sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini mengakibatkan masyarakat di luar pusat ibukota Kabupaten Temanggung harus menempuh jarak dan waktu yang lebih jauh dan lebih lama untuk menjangkau fasilitas pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan sekolah menengah pertama. Jarak tempuh yang jauh memiliki banyak resiko terhadap keselamatan peserta didik untuk bisa sampai di sekolah dan juga faktor biaya. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan unit sekolah baru maupun pemberian izin pendirian sekolah bagi pihak swasta.

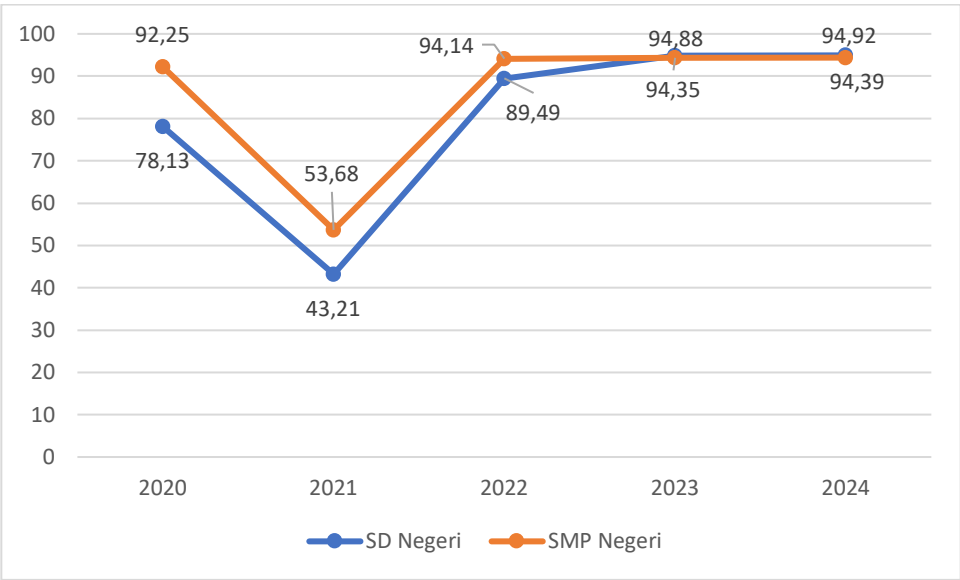
Sedangkan, untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan/atau lembaga mandiri. Penilaian pada setiap satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat. Berikut data persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung.



Gambar 3.2
Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024

Penghitungan proporsi jumlah setiap satuan Pendidikan yang mendapatkan paling rendah akreditasi B adalah jumlah setiap jenjang satuan Pendidikan yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan setiap jenjang satuan Pendidikan yang telah diakreditasi dikali 100%. Capaian persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung adalah sebesar 77,78%. Kemudian, Capaian persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung dengan capaian 99,13%. Selanjutnya, Capaian persentase Satuan Pendidikan SMP terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung dengan capaian 94,52%, dan Capaian persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung dengan capaian 83,33%.

Adapun permasalahan terkait sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan kualitas yang kurang memenuhi standar seperti kondisi ruang kelas di tingkat SD dan tingkat SMP. Berikut merupakan data persentase ruang kelas SD dan SMP Negeri dalam kondisi baik di Kabupaten Temanggung.



Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.26
Capaian Persentase Ruang Kelas SD dan SMP Negeri dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Berdasarkan data di atas, ruang kelas SD Negeri dan SMP Negeri yang ada di Kabupaten Temanggung belum mencapai angka maksimal

yaitu 100%. Capaian ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik pada Tahun 2024 tercapai sebesar 94,92% dan untuk ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik tercapai sebesar 94,39%. Selain itu, belum optimalnya layanan dan sarana prasarana untuk pendidikan non formal (PNF) yang dapat diakses melalui PKBM maupun SKB, yang mana di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 untuk satuan pendidikan non formal yang sudah memiliki akreditasi masih tercapai sebesar 83,33% atau dari 12 satuan pendidikan, hanya 10 pendidikan non formal yang terakreditasi.

Sedangkan untuk sebaran siswa SD maupun SMP di Kabupaten Temanggung belum merata diseluruh kecamatan. Seperti contoh terdapat sekolah yang tidak mendapatkan murid atau peserta didik baru saat tahun ajaran baru dibuka. Hal ini disebabkan karena banyak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta maupun di sekolah yang dianggap favorit di Kabupaten Temanggung.

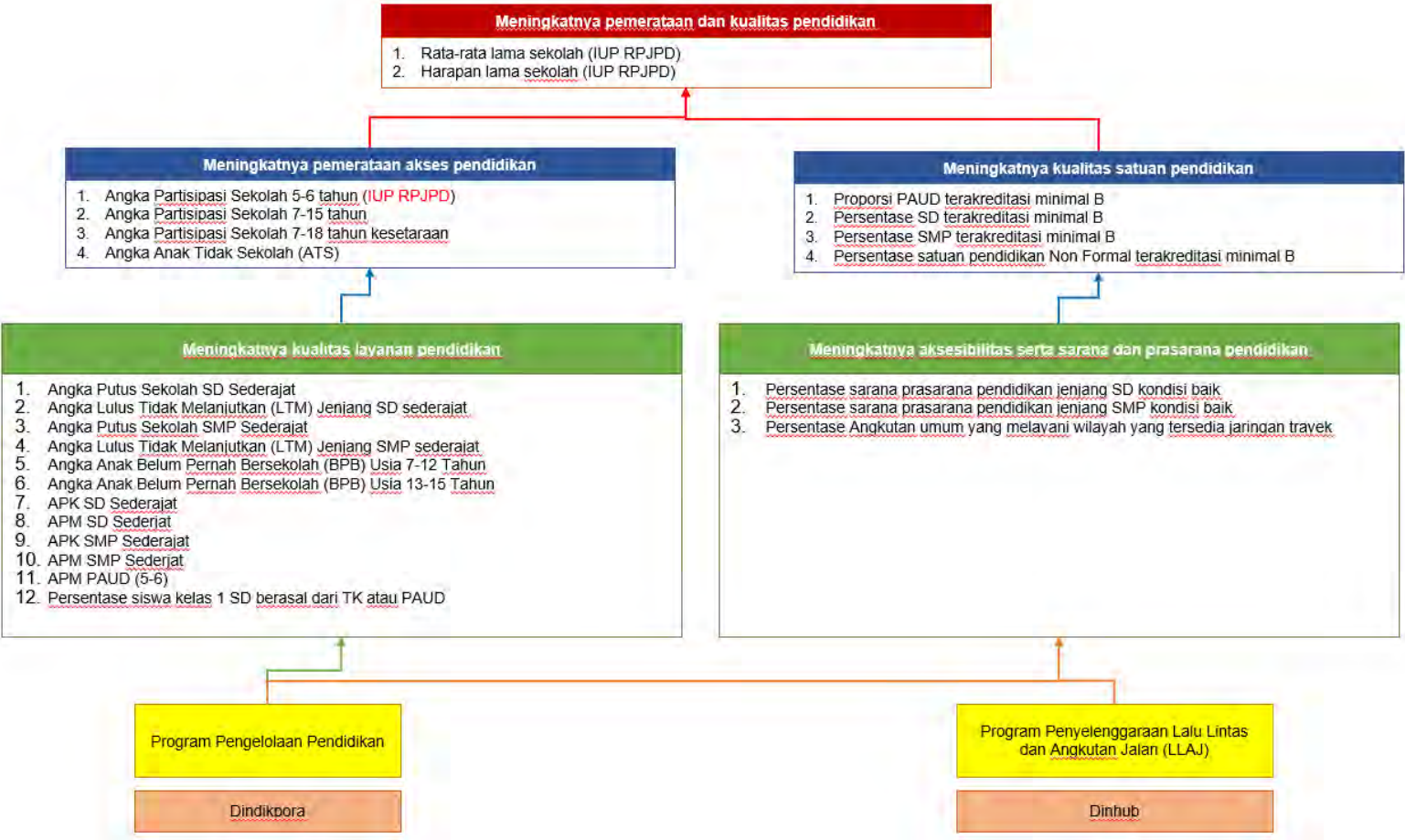
Kualitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang didalamnya termasuk kualitas pendidik juga berpengaruh pada capaian siswa yang dapat mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional. Kualitas sarpras pelayanan pendidikan, kurangnya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan juga menjadi penyebab masih rendahnya HLS di Kabupaten Temanggung.

b. Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

Prioritas program penanggulangan kemiskinan merupakan program yang diarahkan untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penguatan ekonomi, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Prioritas program terhadap kondisi kemiskinan daerah akan didahului dengan melakukan analisis logika program atau teori perubahan (*Theory of Change*) yang selanjutnya disingkat dengan istilah TOC.

Tujuan jangka Panjang pada bidang pendidikan yaitu meningkatnya pemerataan dan kualitas Pendidikan dengan Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sedangkan tujuan jangka menengahnya adalah meningkatnya pemerataan akses pendidikan dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta meningkatnya kualitas Satuan Pendidikan dengan indikator persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B.

Berikut ini disajikan gambar TOC bidang pendidikan sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung melalui pembahasan dengan Dinas Terkait, 2024

Gambar 3.27
Gambar TOC Bidang Pendidikan

Berikut merupakan program penanggulangan kemiskinan dalam upaya meningkatnya pemerataan pendidikan daerah pada Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Program OPD dalam Upaya Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Bidang Pendidikan

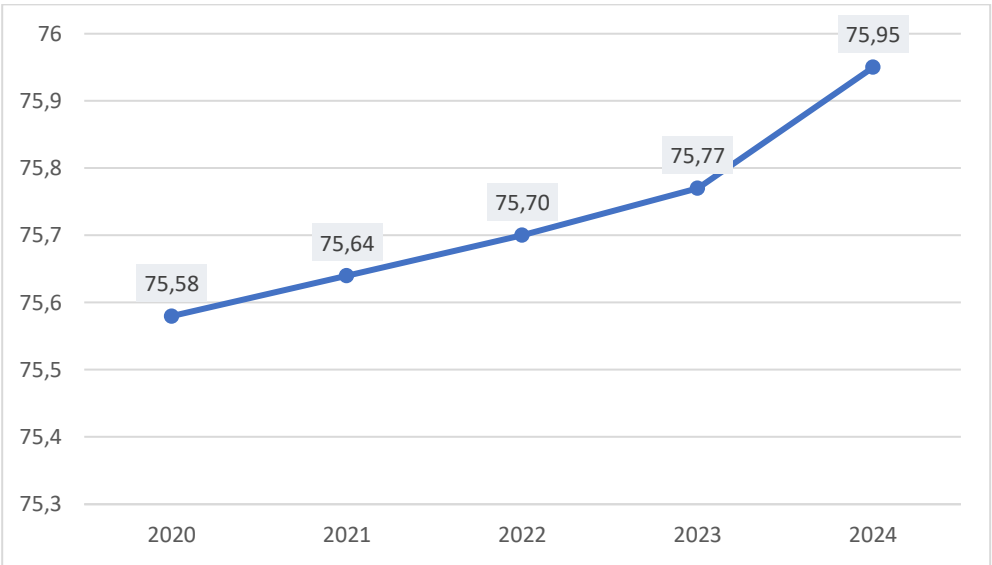
Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas serta sarana dan prasarana layanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

3.4.2 Bidang Kesehatan

a. Masalah Utama Bidang Kesehatan

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Capaian UHH tersaji pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.28
Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tersebut angka harapan hidup Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berarti semakin tinggi angka nilai harapan hidup sejalan dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya pendidikan masyarakat dan meningkatnya ekonomi di Kabupaten Temanggung. Dengan angka harapan hidup yang kian meningkat dapat dikatakan bahwa akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung pun meningkat, tak terkecuali bagi penduduk miskin.

Kesehatan akan berkorelasi dengan tingkat produktivitas kerja pendudukan. Kesehatan dapat memperpanjang masa kerja dan daya tahan tubuh sehingga akan berpengaruh terhadap output yang maksimal. Hal itu didukung dengan tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali terkait dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi dan diasumsikan dapat memberikan keterampilan dan

pengetahuan yang diperlukan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang mengukur jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari



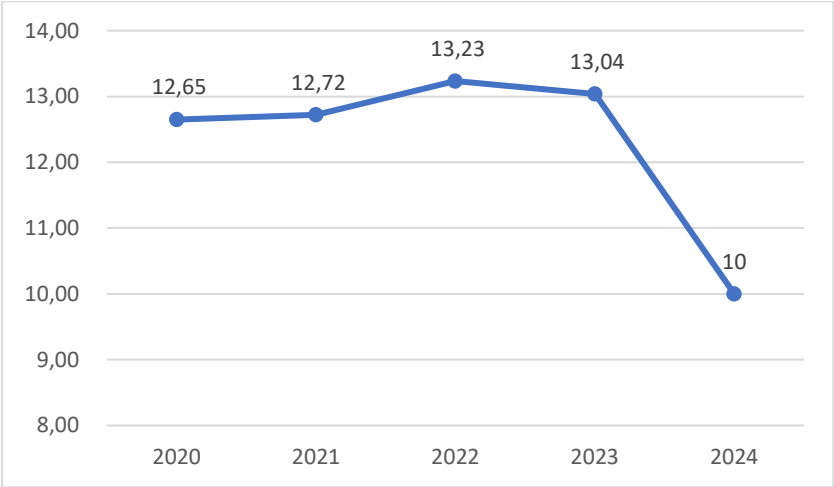
setelah persalinan per 100.000 KH. Berikut gambaran jumlah kematian ibu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 - 2024.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.29
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun 2021 Jumlah Kematian Ibu meningkat dengan jumlah kasus sebanyak 17 orang. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 jumlah kematian ibu turun menjadi 5 orang. Kasus kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Temanggung disebabkan adanya kejadian komplikasi kebidanan yang merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi, meskipun ibu hamil tertangani dengan baik dari awal kehamilannya. Selain itu, beberapa kasus juga disebabkan karena tingginya faktor risiko pada ibu hamil yaitu 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan Terlalu Banyak) dan serta adanya penyakit penyerta pada mayoritas ibu hamil. Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil.

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun per jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 1.000. AKB di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 - 2024 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

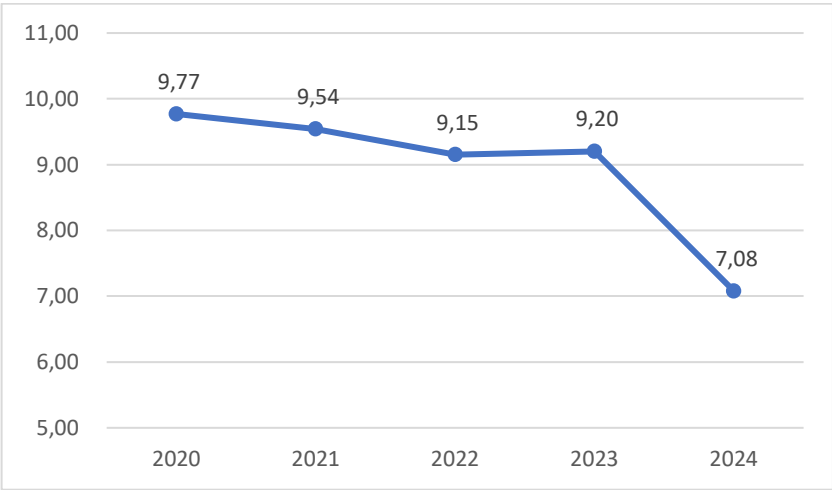
Gambar 3.30
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Angka kematian bayi pada tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Kasus kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) pada tahun 2024 yaitu sebesar 10%. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga terus berupaya mengoptimalkan penurunan angka kematian bayi dengan melibatkan lintas sektor melalui penggalangan komitmen kinerja tenaga kesehatan untuk pelaksanaan kunjungan nifas dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), peningkatan kerjasama lintas program dalam IMD dan ASI Eksklusif, peningkatan kualitas pertemuan ibu balita serta mengadakan advokasi dengan lintas sektor.

Angka kematian neonatal (bayi usia 0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap kematian bayi di Kabupaten Temanggung. Perhitungan kematian neonatal per 1.000 Kelahiran hidup adalah jumlah bayi usia 0 sampai 28 hari yang meninggal dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu satu tahun dikali 1.000.



Berikut ini adalah gambaran angka kematian neonatal di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.31
Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,08%. Faktor penghambatnya adalah kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal serta pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Dalam kelengkapan sarana prasarana masih belum semua Puskesmas memiliki saran prasarana penanganan kegawatdarutan terutama asfiksi atau penyakit pada bayi yang optimal. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawadaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan juga perlu ditingkatkan. Perbaikan sistem sangat diperukan terutam terkait sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi

Selain permasalahan AKI, AKB dan Neonatal juga terdapat permasalahan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Temanggung. AKABA atau disebut angka kematian balita merupakan indikator yang mengukur jumlah kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun per 1.000 KH pada periode tertentu. Jumlah kematian balita di Kabupaten Temanggung kurun waktu 2020-2024 ditampilkan dalam gambar berikut ini.



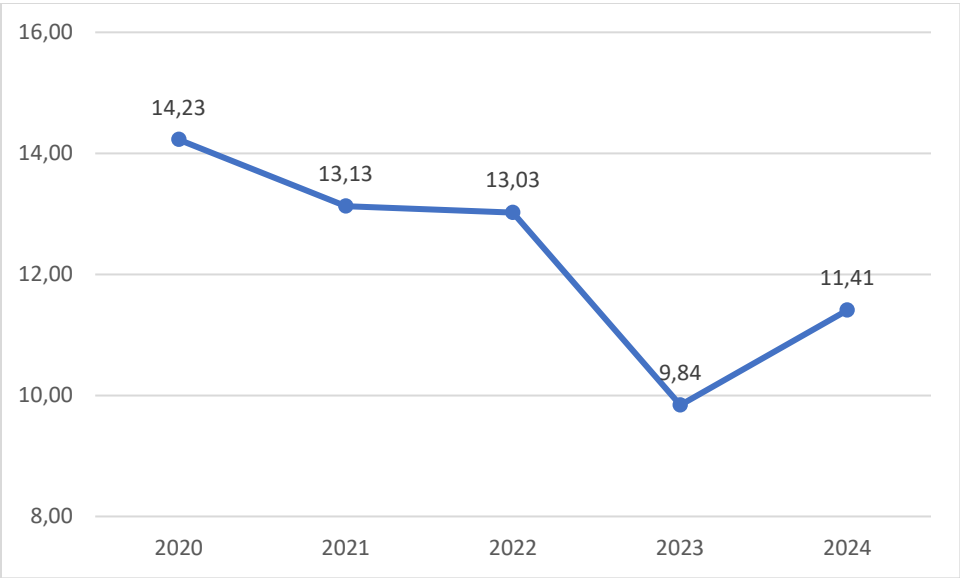
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.32
Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 Jumlah Kematian Balita yaitu 117 kasus, hal ini disebabkan karena faktor risiko yang dialami oleh ibu pada saat kehamilan dan balita dengan infeksi meningitis, kelainan jantung, sesak nafas serta kurangnya pendidikan pola asuh balita dan pemantauan tumbuh kembang balita.

Masalah gizi pada balita ditunjukkan dengan indikator prevalensi stunted pada anak baduta (0-24 bulan). Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO. Secara definisi, stunted adalah tinggi badan anak dibawah -2 SD(standar deviasi) pada tinggi badan menurut usia yang disebabkan oleh kondisi normal atau patologi (tidak normal). Stunted juga lebih sering dikenal dengan perlambatan pertumbuhan.

Pada tahun 2020 – 2024 indikator yang menggambarkan masalah gizi pada balita adalah indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-23 bulan) yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.33
Angka Kematian Balita di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Salah satu akibat kurang gizi pada balita dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Seorang anak dikatakan stunting apabila panjang badan saat lahir dibawah empat puluh delapan centimeter untuk bayi laki-laki dan kurang dari empat puluh tujuh centimeter untuk bayi perempuan.

Stunting pada balita dan baduta di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32.

Prevalensi Stunting Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	Balita 0-59 bulan (SKI)
1	2020	30
2	2021	20,5
3	2022	28,9
4	2023	25,1
5	2024	27,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Prevalensi stunting balita di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif, mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik diantaranya praktek pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif di enam bulan pertama usia bayi, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu yang disebut air susu ibu. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Berikut merupakan persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi di Kabupaten Temanggung.



Sumber : Dinkes Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar
Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024

Sejak tahun 2021, cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Temanggung sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 80%, dengan capaian kinerja di atas 100%, hal ini didukung oleh adanya motivator ASI oleh kader kesehatan di

masyarakat. Pada tahun 2024 Triwulan IV, capaian bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Temanggung sebesar 89,09%.

Di sisi lain, anemia pada ibu hamil juga turut berperan pada kondisi kesehatan ibu dan bayi. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang berfungsi menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kasus anemia yang paling sering terjadi adalah anemia defisiensi besi. dikarenakan kekurangan zat besi. Anemia Defisiensi besi (ADB) pada ibu hamil meningkatkan resiko terjadinya pendarahan, preeklampsia, infeksi, dan beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah, bayi dengan anemia ataupun kekurangan zat besi, bahkan kematian pada bayi. Berikut persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung.

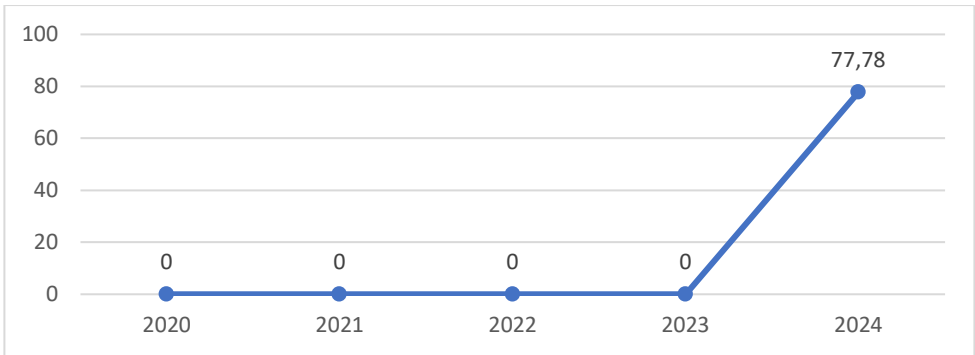


Sumber : Dinkes Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar
Persentase Anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung tahun 2020 - 2024

Berdasarkan grafik tersebut, persentase anemia pada ibu hamil pada tahun 2024 di Kabupaten Temanggung adalah sebesar 11,46%. hal ini dikarenakan ketersediaan tablet Fe yang sudah baik serta sosialisasi pentingnya konsumsi Fe bagi ibu hamil selain itu tersediannya program pemeriksaan Hb pada Ibu Hamil sehingga dapat diketahui ibu hamil yang anemia.

Di sisi lain, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dapat dilihat dengan indikator persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu. Perhitungannya adalah jumlah fasyankes (RS, Puskesmas, Klinik) terakreditasi dibagi jumlah fasyankes yang ada di kali 100%. Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

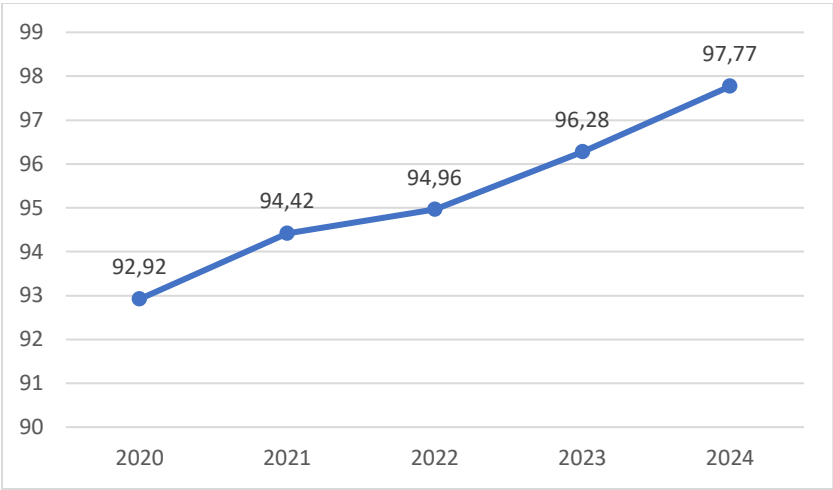


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.34
Persentase Fasyankes yang Memenuhi Standar Mutu
Tahun 2020-2024

Masih terdapat tantangan terutama Klinik swasta belum semua melaksanakan akreditasi karena terkait biaya akreditasi yang mandiri (tergantung kemampuan/kesiapan klinik yang bersangkutan). Dinas Kesehatan berupaya untuk peningkatan akreditasi dengan selalu koordinasi bersama fasyankes terkait pelaksanaan akreditasi dan menghimbau semua fasyankes untuk bisa melaksanakan akreditasi.

Kualitas Kesehatan lingkungan di Kabupaten Temanggung dapat digambarkan dengan indikator Persentase PHBS Strata Utama dan Paripurna. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.35
Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga)
Strata Utama dan Paripurna Tahun 2020-2024

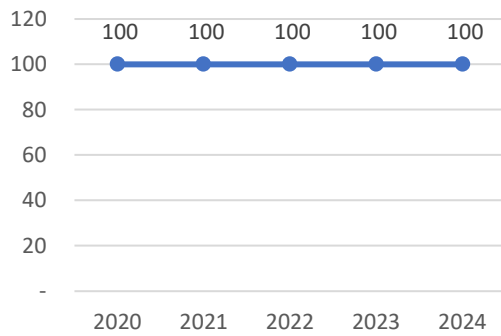
PHBS dapat dilakukan di berbagai tatanan masyarakat, seperti tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan tempat-tempat umum. PHBS di rumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan PHBS dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

Pada bidang kesehatan terdapat 12 (dua belas) SPM kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu: (a) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar, (b) Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, (c) Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar, (d) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, (e) Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, (f) Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, (g) Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, (h) Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, (i) Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, (j) Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, (k) Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan

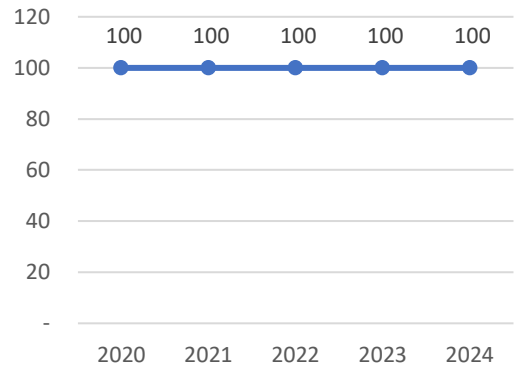
TBC sesuai standar dan (l) Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan.

SPM tersebut bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan lokal/wilayah, sehingga pelayanan kesehatan mampu memberikan dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan kesehatan. Capaian SPM Kabupaten Temanggung di bidang Kesehatan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

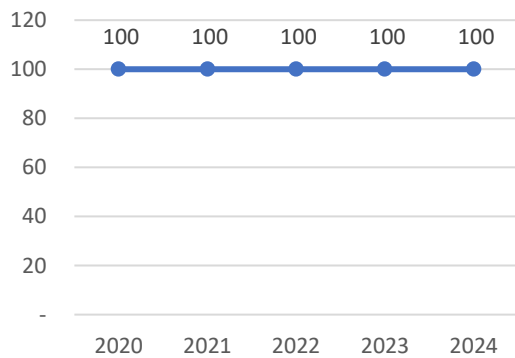
Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar



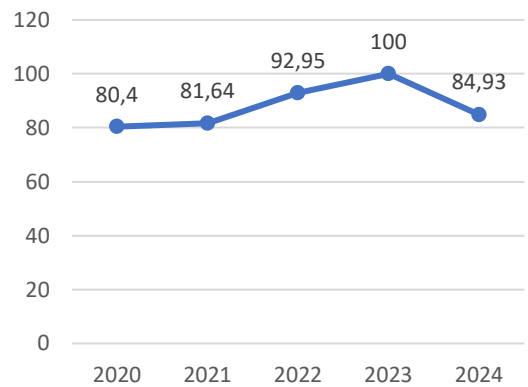
Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar



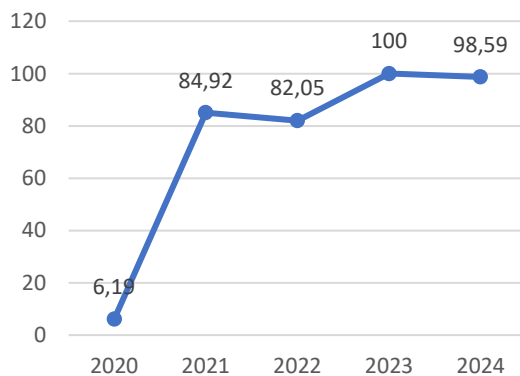
Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar



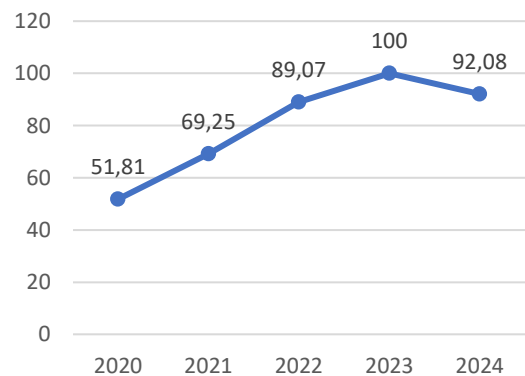
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

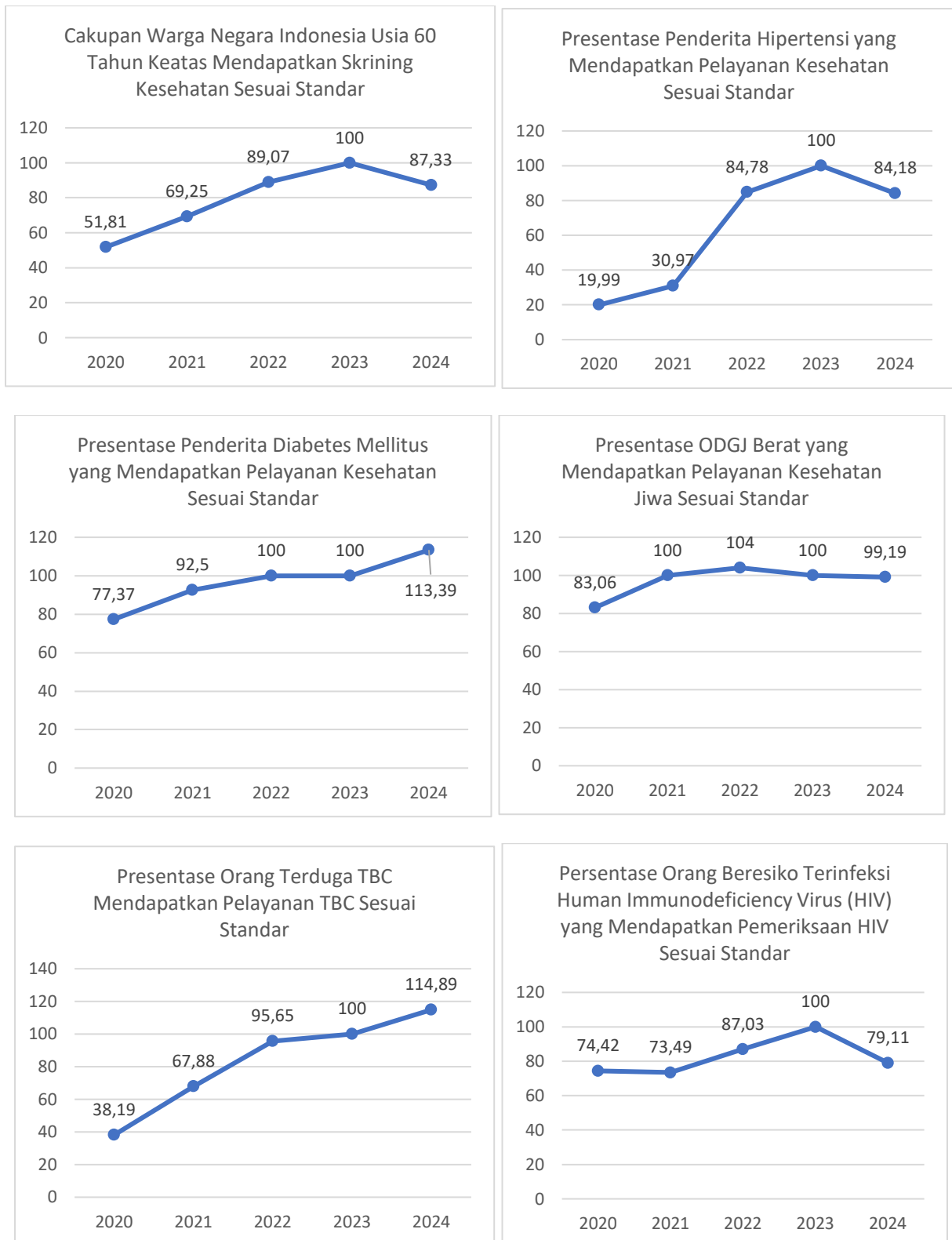


Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar



Cakupan Warga Negara Indonesia Usia 15 s.d 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar





Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.36
Capaian SPM Bidang Kesehatan Yang Mendukung Upaya
Percepatan Penurunan Kemiskinan Utama Tahun 2020-2024

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan salah satu wujud pencapaian pada bidang kesehatan, dimana program jaminan kesehatan nasional merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Cakupan kepesertaan JKN ini mempunyai kaitan erat dengan Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan konsep jaminan kesehatan semesta yang bertujuan agar setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan adil tanpa hambatan finansial yang diwujudkan melalui program JKN.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) bagi seluruh penduduk Indonesia. Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Realisasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.xx

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan kepesertaan JKN	77,84	78,6	81,08	95,44	95,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

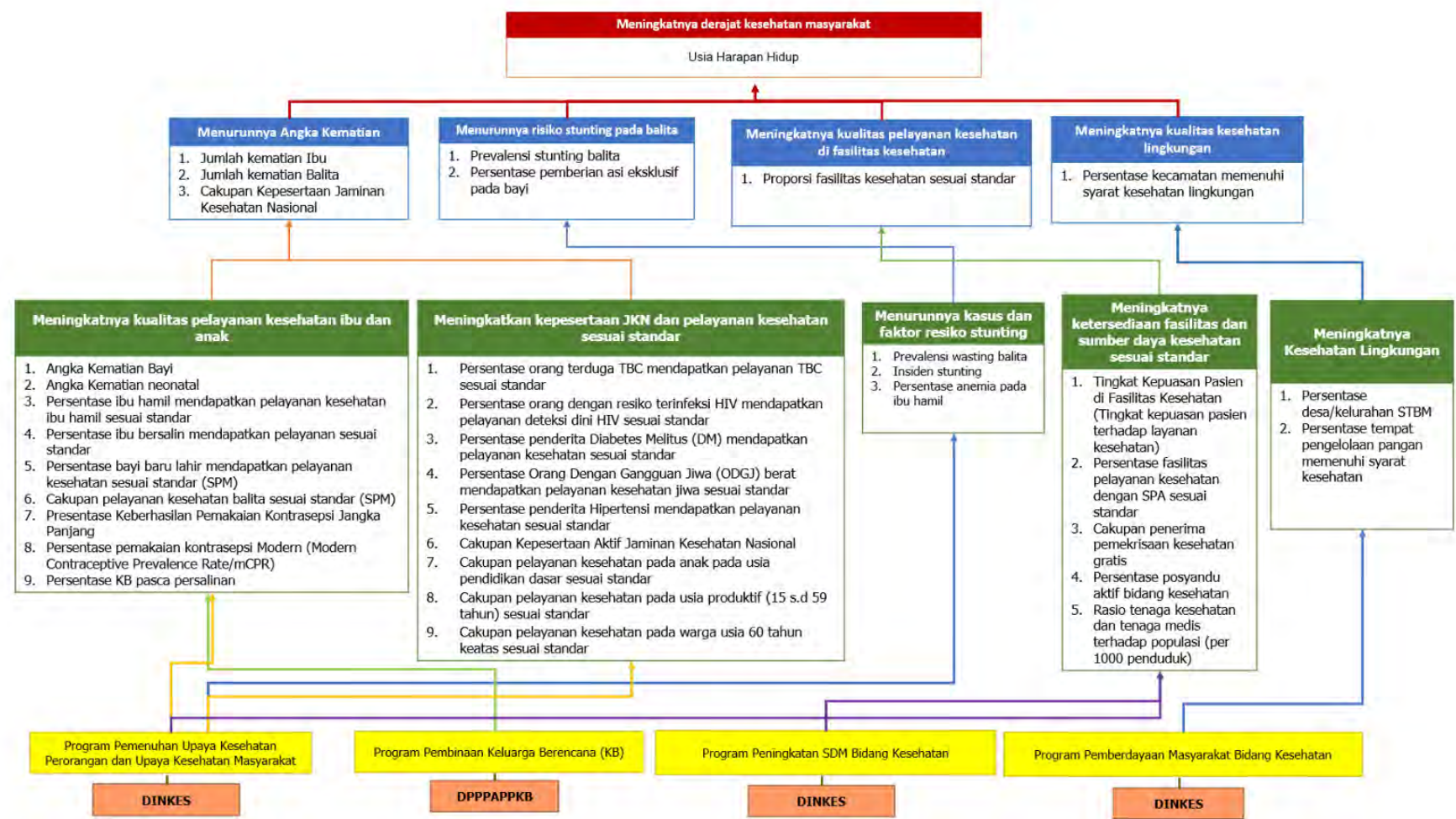
Berdasarkan tabel diatas, cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 mengalami kenaikan. Upaya ini akan terus dilakukan guna mencapai UHC dimana dalam mencapai UHC untuk program jaminan kesehatan bagi seluruh warga harus mencapai kriteria jumlah penduduk yang terdaftar peserta minimal 98% dan jumlah keaktifan peserta JKN minimal 80%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target UHC antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor untuk dapat meningkatkan kepesertaan JKN melalui berbagai segmen kepesertaan.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, permasalahan utama pada bidang kesehatan adalah tingginya kematian ibu hamil, kematian bayi, kematian neonatal dan kematian balita, adanya masalah gizi pada balita, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dan kualitas kesehatan lingkungan.

b. Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

Prioritas intervensi bidang kesehatan difokuskan pada masalah tingginya angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian balita, adanya masalah gizi pada balita, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dan kualitas kesehatan lingkungan. Intervensi dilakukan melalui program pada Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berikut disajikan gambar TOC Bidang Kesehatan



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung melalui pembahasan dengan Dinas Terkait, 2024

Gambar 3.37
TOC Bidang Kesehatan

Program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Program Perangkat Daerah dan Upaya Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	OPD
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Dinas Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
		Meningkatnya kepesertaan JKN dan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Dinas Kesehatan
	Menurunnya risiko stunting pada balita	Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan	Meningkatnya ketersediaan fasilitas dan sumber daya kesehatan sesuai standar	Program Peningkatan SDM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan



Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	OPD
	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Meningkatnya kesehatan lingkungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

3.4.3 Bidang Infrastrur Dasar

a. Masalah Utama Bidang Infrastruktur Dasar

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki dampak yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan suatu daerah. Pembangunan infrastruktur dasar dapat menjadi alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan akses beserta dengan konektivitasnya kepada masyarakat. Dengan adanya infrastruktur dasar berupa perumahan lengkap dengan akses listrik dan sanitasinya, kesenjangan sosial bisa diminimalkan. Selain itu, ketersediaan perumahan yang layak akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.

Tantangan utama dalam infrastruktur dasar adalah adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan pembangunan infrastruktur. Permukiman kumuh berkaitan erat dengan kemiskinan dan terus tumbuh di perkotaan. Urbanisasi dan penambahan penduduk semakin membebani kawasan dari tahun ke tahun. Permukiman kumuh diakibatkan karena keterbatasan kemampuan rumah tangga berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak yang sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian yang murah, berlokasi dengan pusat kegiatan, tetapi kondisi huniannya tidak layak, ditambah kepadatan tinggi, serta ketidakpastian status lahan juga minim infrastruktur dasar.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 kualitas infrastruktur dapat dilihat dari indikator Infrastruktur Berdaya Saing yang meliputi infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik, infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan Kawasan permukiman, penyelenggaraan konektivitas wilayah. Berikut adalah capaian rinci indikator Infrastruktur Berdaya Saing tahun 2024

Tabel 3.1
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



NO	URAIAN	2024
1.	Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing	68,40
	a. Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kondisi baik	54,61
	b. Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	70,83
	c. Presentase Penyelenggaraan konektivitas wilayah	80,98

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 masih terdapat 3,69% rumah tidak layak huni, 5,64% jaringan jalan kabupaten mengalami kerusakan, 2,35% rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak, 30,85% jaringan drainase dengan kondisi rusak sedang/berat, 4,71% rumah tangga dengan akses sanitasi belum layak, 37,09% sampah belum tertangani, dan 39,36% luas wilayah Kabupaten Temanggung belum terjangkau wilayah manajemen kebakaran.

Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 H bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga pemerintah harus hadir menyelesaikan persoalan tempat tinggal bagi warga negaranya yang miskin, dan tinggal di kawasan kumuh. Kawasan kumuh perkotaan merupakan kawasan dengan populasi tinggi yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin di perkotaan dengan penurunan kualitas permukiman.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) erat kaitannya dengan permukiman kumuh pada aspek kondisi bangunan kedung meliputi ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan yang layak. Menurut Badan Pusat Statistik, 2015 derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 (dua) aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan



jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan. Berikut persentase capaian peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024.

Tabel 3.2
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah RTLH (unit)	17.535	13.125	11.421	9.828	8.098
2	Jumlah Rumah se-Kabupaten Temanggung (unit)	215.918	216.785	217.652	218.519	219,386
3	Persentase (%)	8,12	6,05	5,25	4,5	3,69

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Rumah layak huni merupakan bagian lain atau kebalikan dari rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga angka rumah layak huni didapat dari jumlah rumah dikurangi RTLH.

Tabel 3.3
Persentase Rumah Layak Huni (RLH)

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah RLH (unit)	177.349	179.150	206.231	208.691	211.288
2	Jumlah Rumah	196.536	196.536	217.652	218.519	219.386
3	Persentase (%)	90,24	91,15	94,75	95,50	96,31

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan data di atas, persentase rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung terus mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sampai tahun 2024 menurun dari



17.535 unit menjadi 98.098 unit. Penurunan persentase rumah tidak layak huni diiringi dengan persentase rumah layak huni yang semakin meningkat. Adanya pengurangan jumlah tidak layak huni, berbanding lurus dengan peningkatan persentase rumah layak huni dari tahun 2020-2024. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sampai tahun 2024 meningkat dari 177.349 unit menjadi 211.288 unit.

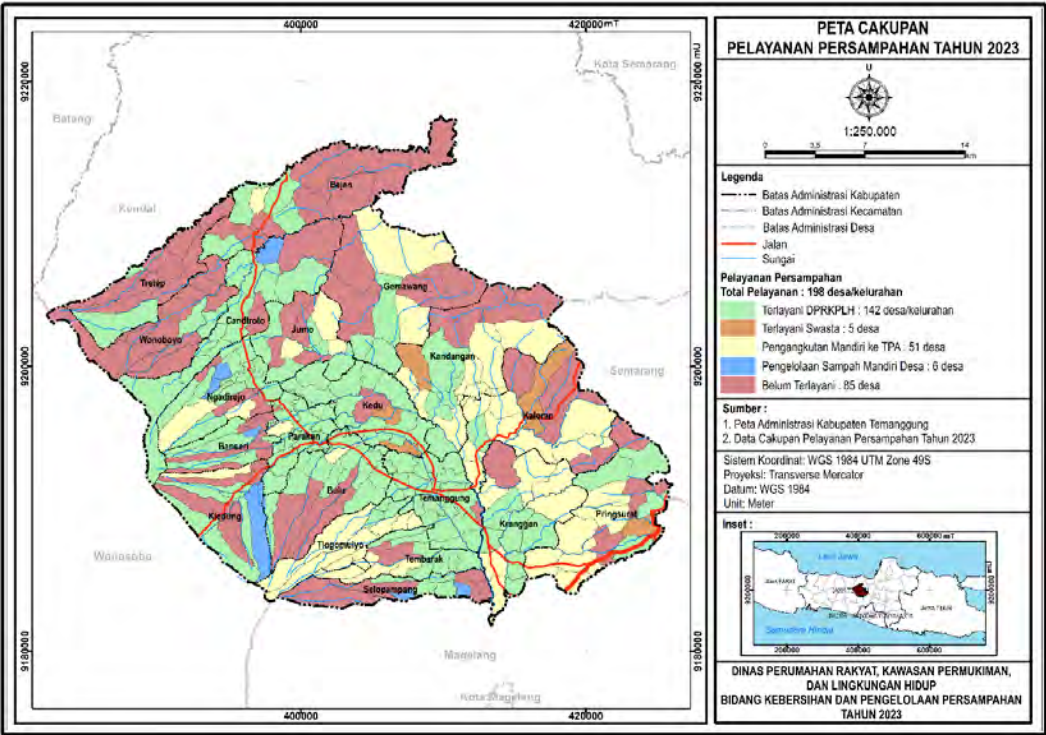
Polusi dari sampah paling berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok masyarakat miskin seperti menurunnya kualitas lingkungan, mewabahnya penyakit berbahaya, hingga menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pada kemampuan mereka mencari nafkah. Kelompok tersebut memiliki keterbatasan dalam mengelola persampahan sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk mengatasi dampak dari sampah tersebut. Berikut persentase cakupan pelayanan persampahan Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024.

Tabel 3.4
Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

NO	URAIAN	CAPAIAN S.D TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	131	155	177	198	215
	1. Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri	18	27	36	56	69
	2. Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	113	128	141	142	146
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	45,33	53,63	61,24	68,51	74,39

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Sampai dengan tahun 2024 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 146 desa/kelurahan dan swasta/mandiri sebanyak 69 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 215 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 74,39% dari total jumlah desa/kelurahan.



Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2023

Gambar 3.38
Peta Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2023

Sanitasi merupakan salah satu prasyarat kesehatan yang dibutuhkan oleh seluruh elemen penduduk, termasuk masyarakat miskin. Namun masyarakat miskin seringkali memiliki akses yang sulit terhadap fasilitas sanitasi layak. Sesuai dengan kriteria sanitasi dalam SDGs, Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik, atau sistem pengolahan air limbah (SPAL). Berdasarkan pengertian tersebut, capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 3.5
Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

		TAHUN				
NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak (unit)	181.568	186.290	198.531	254.145	261.907
2	Jumlah rumah	196.536	225.325	225.325	269.251	274.845

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	tangga (unit)					
3	Persentase (%)	92,38	82,68	88,11	94,39	95,29

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas persentase rumah tangga bersanitasi layak selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dari 90,19 % menjadi 95,29%, sedangkan pada tahun 2021 jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak meningkat 186.290 yang sejalan dengan pertambahan jumlah rumah tangga menjadi 225.325 unit, sehingga capaian akses sanitasi pada tahun 2021 menjadi 82,68% dan tahun 2022 menjadi 88,11%, sedangkan untuk capaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 94,39% capaian akses layak termasuk didalamnya 5,22% capaian akses aman. Kondisi tahun 2024 yaitu akses layak sebesar 95,29% termasuk didalamnya 3,11% akses aman.

Hubungan antara akses air (kuantitas dan kualitas) berhubungan dengan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari dua arah. Dari arah kemiskinan menuju kemampuan mengakses air bersih, atau dilihat dari rendahnya kemampuan untuk mengakses air bersih yang mengakibatkan kemiskinan.

Pada perspektif pertama, kemiskinan secara signifikan berkontribusi terhadap kurangnya akses air bersih, terutama di komunitas pedesaan dan rentan. Kemiskinan akan menyangkut daya beli untuk membeli air bersih atau membeli layanan yang dapat mendatangkan air bersih (seperti memasang saluran PDAM atau membeli rumah di daerah dengan layanan air bersih). Kalau warga tidak mampu membeli air atau membeli layanannya, maka air bersih tidak dapat diakses.

Masalah lebih dalamnya adalah, warga miskin/kemiskinan umumnya akan berkumpul membentuk kawasan kumuh/slum area. Area ini biasanya sejak awal memang tidak ditujukan untuk menjadi daerah pemukiman. Akibatnya area tersebut tidak memiliki jaringan



air bersih, sebagaimana wilayah lain yang sejak awal memang didesain sebagai wilayah pemukiman.

Di sisi lain, kurangnya akses terhadap air bersih merupakan faktor yang signifikan dalam menyebabkan kemiskinan. Minimnya sumber air bersih mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama di negara-negara berkembang. Telah diamati bahwa individu di daerah pedesaan lebih rentan menggunakan sumber air yang terkontaminasi, memperburuk dampak kemiskinan. Dampak kekurangan air terhadap pertanian dan produksi pangan lebih lanjut memperburuk kekurangan gizi dan kemiskinan, terutama di wilayah yang kekurangan air.

Selain itu, penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air sering dikaitkan dengan kemiskinan, sumber daya yang terbatas, dan status sosial ekonomi rendah, menyoroti efek merugikan dari akses air yang tidak memadai terhadap kesehatan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi. Warga mendapatkan pendidikan yang rendah, termasuk pendidikan tentang air bersih, karena miskin. Terbiasa hidup seadanya dan minimnya pendidikan menyebabkan warga tidak paham bagaimana air yang bersih. Selanjutnya ketika pendidikan minim, maka kesempatan kerja jadi mengecil, yang berakibat pendapatan rendah. Kemudian siklusnya berputar kembali. Minimnya akses air bersih menyebabkan warga menjadi tidak sehat. Kesehatan yang rendah menyebabkan kualitas hidupnya menurun. Kemampun berpikir untuk bersekolah dan bekerja juga menurun. Akibatnya prestasinya ikut turun. Ini menyebabkan kesempatannya untuk memperbaiki nasib dari sekolah/pendidikan atau dari pekerjaan yang layak menjadi menyempit, rentan dikeluarkan dari sekolah atau diberhentikan dari pekerjaannya. Akibatnya warga menjadi miskin.

Akses air minum layak di Kabupaten Temanggung sendiri (merupakan Standar Pelayanan Minimal) sudah menunjukkan capaian yang cukup baik yakni 97,65% hingga tahun 2024. Adapun capaian akses air minum layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 3.6
Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Tahun 2020-2024



No.	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga berakses air minum layak	228.998	254.563	257.570	260.833	268.382
2	Jumlah rumah tangga	243.869	269.331	270.220	271.854	274.845
3	Persentase (%)	93,90	94,52	95,32	95,95	97,65

Sumber : DPUPR Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel diatas, capaian akses air minum layak di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dari total capaian akses air minum layak tahun 2023, terdapat 19,38% yang sudah masuk pada kategori akses air minum aman. Interaksi antara kemiskinan dan akses air menekankan perlunya intervensi dan kebijakan yang ditujukan secara khusus untuk mengatasi kedua masalah ini secara bersamaan, dengan demikian meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan secara keseluruhan dari penduduk yang terkena dampak.

Selain akses dasar diatas, infrastruktur pendukung seperti cakupan jalan yang mengukur ketersediaan infrastruktur jalan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menjelaskan bahwa meningkatnya cangkupan jalan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Ketersediaan infrastruktur jalan dalam hal ini berkaitan erat dengan akses terhadap sumber daya dan kelancaran kegiatan ekonomi. Terbukanya akses yang lebih luas terhadap fasilitas-fasilitas kesejahteraan dan sumber daya ekonomi secara langsung ikut berperan dalam menekan tingkat kemiskinan. Adapun kondisi jaringan jalan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 3.7
Jalan Kabupaten Berkondisi Mantap Tahun 2020-2024

Tahun	Jalan Kabupaten (km)		
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Baik (baik + sedang) (km)	%
2020	650,476	542,047	83,33
2021	650,476	580,790	89,29



2022	650,476	573,366	88,15
2023	650,476	579,972	89,16
2024	650,476	578,40	88,92

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa belum seluruh ruas jalan di Kabupaten Temanggung memiliki kondisi yang baik dan sedang. Hasil survey lapangan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kerusakan jalan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air (banjir), perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat.

Jaringan jalan didukung dengan adanya jaringan drainase. Drainase jalan adalah prasarana yang berfungsi untuk melindungi konstruksi jalan dari bahaya limpasan air permukaan atau air tanah yang akan merembes ke dalam badan jalan dengan mengalirkannya ke penampungan, sumur resapan, sungai, embung atau kolam.

Drainase merupakan konstruksi yang berfungsi untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik lain. Drainase yang baik dapat membantu proses pengaliran air seperti curah hujan, sehingga tidak terjadi genangan atau banjir. Ketersediaan pelayanan drainase berkaitan dengan genangan air yang timbul hingga banjir di suatu kawasan/kota. Pelayanan draninase skala kawasan/kota bertujuan agar tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari dua kali setahun sebesar 50%. Tersedianya drainase merupakan ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berikut persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024.

Tabel 3.8
Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Data panjang jaringan drainase pada skala	303,04	146,645	104,567	107,519	107,431



	kawasan/kota yang ada					
2	data panjang jalan kabupaten skala kawasan/kota	650,467	650,467	151,457	155,363	155,363
3	Persentase (%)	46,59	22,54	69,04	69,21	69,15

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel diatas, kondisi eksisting drainase di Kabupaten Temanggung masih belum tersedia pada seluruh ruas jalan yang ada. Cakupan drainase baru mencapai 69,15% atau sepanjang 107,431 km dari total 155,363 km panjang jalan yang ada di Kabupaten Temanggung.

Salah satu kriteria kekumuhan suatu lokasi dinilai dari aspek proteksi kebakaran, yang ditunjukkan dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana proteksi kebakaran. Prasarana proteksi kebakaran dapat dipenuhi melalui ketersediaan pasokan air, tersedianya jalan lingkungan yang memudahkan keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran, adanya sarana komunikasi yang dapat memberitahukan bahwa terjadi kebakaran, dan/atau tersedianya sistem proteksi kebakaran yang mudah diakses. Sedangkan sarana proteksi kebakaran dapat dipenuhi dengan adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran, dan/atau alat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pemenuhan prasarana dan sarana proteksi kebakaran sulit dipenuhi bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengingat keterbatasan pembiayaan dan pengelolaannya.

Pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Temanggung memiliki beberapa tantangan antara lain topologi yang berupa pegunungan, perbukitan, dan lembah, pola permukiman terpusat yang mengelompok menjadi unit-unit kecil dan menyebar, memiliki wilayah yang luas, dan pengetahuan warga mengenai mitigasi bencana kebakaran masih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan cakupan pelayanan bencana kebakaran masih belum maksimal. Adapun Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagai berikut.



Tabel 3.9
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten/Kota (km ²)	528	528	528	528	528
2	Jumlah wilayah Kabupaten (km ²)	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
3	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2024

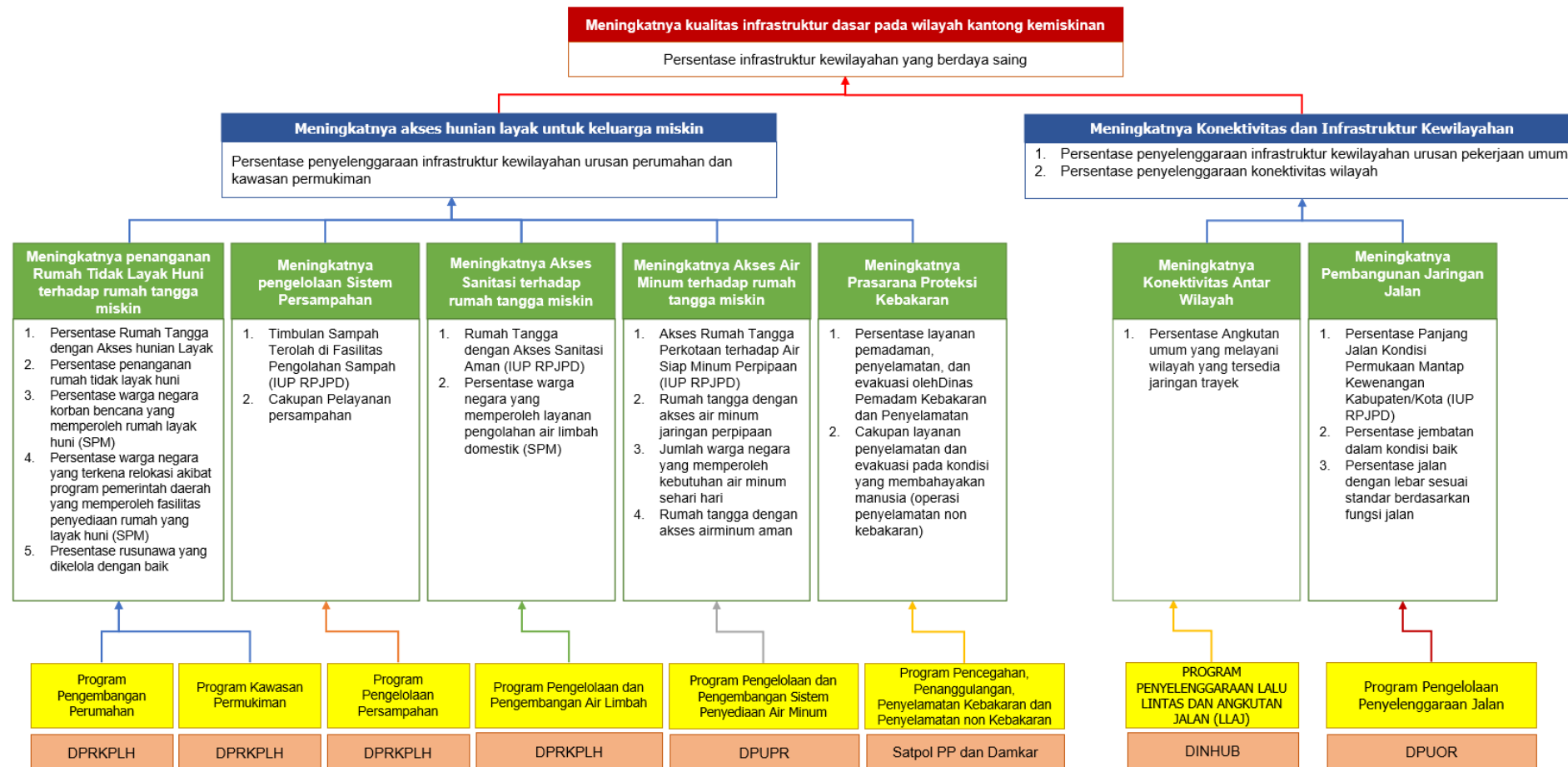
Selain tantangan yang telah disebutkan, cakupan pelayanan bencana kebakaran terhambat dengan pos pelayanan pemadam kebakaran masih terbatas. Sehingga berdasarkan tabel di atas, cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Temanggung masih sebesar 60,64%.

b. Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

Prioritas intervensi pada Bidang Infrastruktur Dasar dalam upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Temanggung difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar dengan indikator Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik.

Penentuan prioritas intervensi ditentukan melalui logika program atau *Theory of Change* (TOC) yang didefinisikan sebagai metode untuk menjelaskan bagaimana suatu program atau intervensi dapat menghasilkan perubahan dalam hal ini untuk meningkatkan infrastruktur dasar harus didukung dengan meningkatnya akses hunian layak melalui penanganan RTLH, pengelolaan persampahan, mitigasi kebakaran, peningkatan air minum, serta peningkatan sanitasi untuk keluarga miskin dan meningkatnya konektivitas dan infrastruktur kewilayahan melalui peningkatan jaringan jalan dan konektivitas wilayah. Hasil *Theory of Change* (TOC) Bidang Infrastruktur Dasar tersaji pada gambar sebagai berikut





Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung melalui pembahasan dengan Dinas Terkait, 2024



Gambar 3.39
Theory of Change (TOC) Bidang Infrastruktur Dasar

Program Penanggulangan Kemiskinan pada Bidang Infrastruktur Dasar dalam upaya meningkatkan kualitas hunian pada rumah tangga miskin di Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.10
Program Perangkat Daerah dalam Upaya Penanganan Kemiskinan pada Bidang Infrastruktur Dasar

Tujuan	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Indikator	Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar pada Wilayah Kantong Kemiskinan	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	Meningkatnya akses hunian layak untuk keluarga miskin	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni terhadap rumah tangga miskin	1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
					2. Persentase penanganan rumah tidak layak huni		
					3. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
					4. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)		
					5. Presentase rusunawa yang dikelola dengan baik		
				Meningkatnya pengelolaan	1. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP RPJPD)		DPRKPLH

Tujuan	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Indikator	Program	Perangkat Daerah
				Sistem Persampahan	2. Cakupan Pelayanan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya Akses Sanitasi terhadap rumah tangga miskin		1. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP RPJPD) 2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	DPRKPLH
			Meningkatnya Akses Sanitasi terhadap rumah tangga miskin		1. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP RPJPD) 2. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan 3. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari hari 4. Rumah tangga dengan akses airminum aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024



3.4.4 Bidang Pembangunan Desa

a. Masalah Utama Bidang Pembangunan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya diprakarsai oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki keistimewaan sebagai daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai wilayah administrasi. Masyarakat desa mempunyai peran ganda, yaitu sebagai objek dan subjek pembangunan. Objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Subyek pembangunan, karena penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan.

Pelaksanaan pemerintahan desa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya menciptakan iklim yang dapat mendorong tubuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan cara dan/atau pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara yang terlaksana dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pembangunan desa yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah masih adanya beberapa desa di Kabupaten Temanggung yang termasuk kategori bukan mandiri berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018.

Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri dan tahun 2022 ini sejumlah 26 desa, dan pada Tahun 2023 jumlah Desa Mandiri ada 55 desa, sedangkan Tahun 2024 pada Triwulan II ini ada 100 Desa yang sudah berstatus Mandiri atau 37 persen dari keseluruhan desa di Kabupaten Temanggung. Masih ada 63 persen desa yang membutuhkan perhatian dan penanganan supaya mampu menjadi desa mandiri sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan di desa. Kategori desa di Kabupaten Temanggung berdasarkan nilai IDM pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini

Tabel 3.11
Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi IDM
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kategori Desa	2024
1	Desa Mandiri	100
2	Desa Maju	140
3	Desa Berkembang	26
4	Desa Tertinggal	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Perkembangan persentase desa yang berpredikat Mandiri di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini. Tampak bahwa setiap tahun ada peningkatan jumlah desa yang berubah status menjadi mandiri, hal ini seiring dengan adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Namun, berbagai upaya masih harus tetap dilakukan sampai semua desa di Kabupaten Temanggung mejadi kategori desa mandiri dan akan



berpengaruh pada menurunnya kemiskinan sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat di desa.

Tabel 3.12
Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri (%)
Tahun 2019 - 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Mandiri	0	10	15	26	55	100
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	0	3,76	5,63	9,77	20,68	37,59

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Permasalahan adanya desa yang belum mandiri di Kabupaten Temanggung sehingga berpengaruh secara tidak langsung dengan kemiskinan dapat dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

• **Perekonomian desa**

Perekonomian desa dapat dilihat dari nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dalam IDM. IKE adalah indikator komposit dalam IDM yang mempunyai indikator utama dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi terdiri atas beberapa indikator penyusun diantaranya adalah keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah.

Nilai IKE Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 adalah 0,68 belum mencapai skor tertinggi sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya signifikan untuk peningkatan nilai IKE. Salah satu indikator dalam dimensi ekonomi yang berpengaruh dalam peningkatan perekonomian desa adalah kinerja lembaga perekonomian desa. Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan kinerja lembaga perekonomian adalah dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meningkatnya kinerja lembaga perekonomian desa dapat diketahui dari jumlah BUMDesa yang termasuk kategori berkembang dan kategori maju. Pada tahun 2024 BUMDes yang berbadan hukum di Kabupaten Temanggung baru ada 57 dari 257 BUMDEs atau



baru 22 persen, BUMDes akan maju jika kelembagaannya kuat dan salah satunya dalah dengan berbadan hukum.

Selain itu meningkatnya perekonomian desa juga dipengaruhi keadaan ekonomi masyarakat desa, yang salah satunya dapat diketahui dari kegiatan UP2K yang aktif. UP2K adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga yang anggotanya adalah perempuan yang memiliki usaha di desa dan bergabung dalam satu kelompok mengelola dana yang digunakan bersama untuk usaha. UP2K di Kabupaten Temanggung tersebar di 20 kecamatan dan berkedudukan di desa/kelurahan, jumlahnya 944 kelompok, terdiri dari 266 kelompok pemula, 194 madya, 173 utama dan 311 mandiri. Masih banyak kelompok UP2K yang membutuhkan pendampingan dan pengembangan sehingga bisa meningkatkan penghasilan keluarga dan mengentaskan kemiskinan di desa.

Keberadaan pasar desa dan keberadaan pasar daerah yang ada di desa juga berpengaruh karena mendekatkan masyarakat pada akses perdagangan. Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat. Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut pengelolaan manajemen secara professional dan berkesinambungan.

Tabel 3.13
Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik
Tahun 2023 s.d 2024 Triwulan II

No	Uraian	TAHUN	
		2023	2024
1	Jumlah pasar kondisi baik	4	4
2	Jumlah pasar daerah	6	6
	Persentase	67	67

Sumber : Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2024



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase Pasar Daerah dalam kondisi baik dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Triwulan II terdapat 4 pasar yaitu Pasar Candioto, Pasar Ngadirejo, Pasar Legi Parakan, dan Pasar Temanggung. Pasar - pasar tersebut sebelumnya sudah mengalami pembangunan dan perawatan rutin. Pasar Pingit dan Pasar Kranggan telah dilakukan perawatan rutin namun kondisi Pasar yang telah berumur menyebabkan bangunan pasar perlu revitalisasi Pasar.

• **Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa**

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi unsur penting yang dapat menentukan keberhasilan penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk berkualitas jika klasifikasi desa termasuk cepat berkembang, diukur melalui evaluasi perkembangan desa. Persentase desa yang cepat berkembang di Kabupaten Temanggung tercantum dalam tabel berikut ini. Tampak bahwa desa yang termasuk cepat berkembang baru 54 persen dari 266 desa, beberapa desa masih memerlukan upaya pembinaan dan pendampingan supaya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat meningkat dan menjadi desa cepat berkembang.

Tabel 3.14
Persentase Desa yang Cepat berkembang Tahun 2024 Triwulan II

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa cepat berkembang	58	40	95	116	116	144
2	Jumlah desa	289	266	266	266	266	266
3	Persentase	20,06	15,03	35,71	43,61	43,61	54,14

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 3.15
Jumlah Desa yang Cepat berkembang Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa Cepat Berkembang	Desa Berkembang	Desa Kurang Berkembang	Desa belum mengisi
1	Temanggung	4	1	-	1
2	Tlogomulyo	8	4	-	-
3	Kranggan	5	-	-	7



4	Tembarak	1	-	-	12
5	Selopampang	9	-	-	3
6	Pringsurat	9	1	-	4
7	Kaloran	12	-	-	2
8	Parakan	13	-	-	1
9	Bansari	12	1	-	-
10	Kledung	-	2	-	11
11	Kedu	7	-	1	6
12	Bulu	5	1	2	11
13	Kandangan	7	-	1	8
14	Candiroto	6	-	-	8
15	Bejen	5	-	1	8
16	Jumo	5	-	-	8
17	Gemawang	10	-	-	-
18	Tretep	5	3	-	3
19	Wonoboyo	13	-	-	-
20	Ngadirejo	8	2	-	9
	JUMLAH	144	15	5	102

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terwujud melalui tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat di desa. Gambaran tata kelola pemerintahan desa dapat diketahui dari jumlah desa yang melakukan pencatatan asset desa, jumlah desa yang menyusun RKPDesa, jumlah desa yang menyusun APBDesa dan jumlah perangkat desa.

Kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES
Tahun 2024 Triwulan II

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	jumlah desa yang tertib mengelola aset	212	264	266	266	266	72
2	jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	79,69	99,24	100	100	100	27,07

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa yang tertib mengelola aset dengan mengisi aplikasi SIPADES sampai dengan Triwulan II ini ada 72 Desa atau 27,07%. Faktor pendorong Kesadaran Pemerintah Desa untuk melaporkan aset Desa yang dimiliki. Faktor penghambat Pemerintahan Desa belum melakukan pemutakhiran data terbaru, serta aplikasi SIPADES yang sering tidak stabil koneksinya. Upaya yang telah dilakukan mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa agar selalu melakukan pemutakhiran aset desa.

Tabel 3.17
Jumlah Desa yang Tertib Mengelola Aset

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Temanggung	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	0
3	Kecamatan Kranggan	0
4	Kecamatan Tembarak	0
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	0
7	Kecamatan Kaloran	0
8	Kecamatan Parakan	14



9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	0
11	Kecamatan Kedu	0
12	Kecamatan Bulu	0
13	Kecamatan Kandangan	0
14	Kecamatan Candiroto	0
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	0
17	Kecamatan Gemawang	0
18	Kecamatan Tretep	0
19	Kecamatan Wonobojo	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	72

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Kekosongan Perangkat Desa di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini. Masih banyak formasi perangkat desa yang kosong sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelayanan pada masyarakat di desa.

Tabel 3.18
Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa
Tahun 2024 Triwulan II

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah formasi Kekosongan yang terisi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	45
2	Total jumlah formasi yang kosong tahun 2024	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	104
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	43,27

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa pada Triwulan II Tahun 2024 ini 43,27% dikarenakan pengisian Perangkat Desa, terlebih lewat

mekanisme pengangkatan, terdapat tahapan selama paling lama 2 (dua) bulan sejak kekosongan. Sehingga apabila terjadi kekosongan tidak bisa langsung diisi, karena ada tahapan pengisian yang harus dilalui, antara lain sosialisasi kekosongan, pembentukan panitia pengangkatan, penyusunan jadwal, pengumuman dan pendaftaran, penyaringan dan penjaringan, sampai dengan pelantikan. Sedangkan bila melalui mekanisme penataan antar Perangkat Desa perlu mendapat rekomendasi dari Camat. Hal ini harus menjadi perhatian berbagai pihak sehingga pelayanan dapat optimal.

Gambaran pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diketahui melalui Persentase Kepemilikan NIK, KK, KIA, IKD dan akta kelahiran. Faktor penghambat tercapainya cakupan kepemilikan KK, KTP el dan KIA antara lain : 1)Tidak semua masyarakat kab. Temanggung memahami manfaat tertib adminduk dan 2)Sebagian warga yang terdata dalam wajib KTP bekerja atau bersekolah/menempuh pendidikan di pesantren yang berada di luar kab. Temanggung. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatn sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96,678	97,16
2	Persentase kepemilikan KTP	99,82	98,92
3	Persentase kepemilikan KK	99,93	99,80
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th	99,43	99,54
5	Persentase kepemilikan akta kematian	100	100
6	Persentase kepemilikan KIA	84,21	87,54

Sumber : PDAK-Kemendagri RI Kepemilikan Dokumen Juni, 2024

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital nasional bahawasanya aplikasi SPBE



prioritas diselenggarakan untuk mendukung layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Thun 2022 tentang Satndar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan balngko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital bahwa KTP-el berbetuk fisik dan/atau digital. KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresantikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan

Tabel 3.20
Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 s.d TW I

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1.	Jumlah Penduduk yang telah melakukan Aktifasi Identitas Kependudukan digital	110.854	169.764
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP el	615.343	625.858
3	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	18.01	27.13

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Faktor penghambat tercapainya Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital adalah Handphone tidak suprt dengan aplikasi IKD dan jaringan internet/sinyal tidak memadai dalam proses aktivasi IKD.

• **Kualitas lingkungan di desa.**

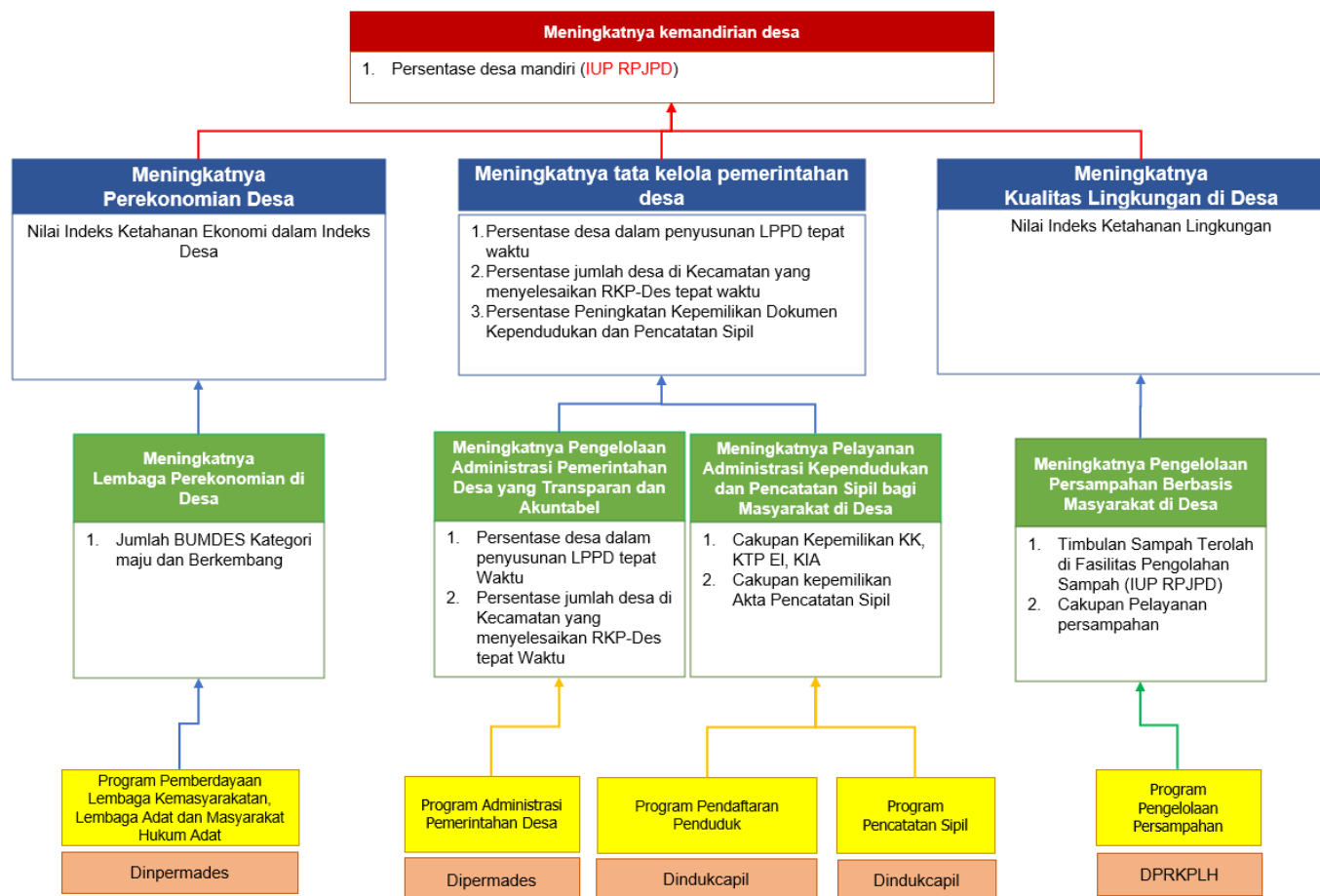
Selain aspek tata kelola pemerintahan desa dan lembaga perekonomian desa, faktor lain yang menjadi akar permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan adalah meningkatnya kualitas lingkungan di desa yang diukur melalui rata-rata persentase indeks ketahanan lingkungan (IKL) dalam IDM. Nilai rata-rata IDL Kabupaten Temanggung adalah 0,85.



b. Prioritas Intervensi bidang Pembangunan Desa

Penanganan permasalahan utama bidang pembangunan desa di Kabupaten Temanggung dalam rangka penanggulangan kemiskinan difokuskan pada peningkatan peran desa dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu melalui peningkatan perekonomian desa, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kualitas lingkungan di desa. Intervensi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilakukan dalam upaya tersebut dilaksanakan melalui kebijakan penyusunan program dan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan kemandirian desa dalam bentuk program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam proses perencanaan pembangunan sampai dengan alokasi penganggaran oleh perangkat daerah terkait pembangunan desa di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Penataan Ruang Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang didukung dengan perangkat daerah lainnya yang terkait.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa peningkatan kemandirian desa dapat didukung melalui :
1) Peningkatan perekonomian desa, 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 3) Peningkatan kualitas lingkungan di desa.



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung melalui pembahasan dengan Perangkat Daerah Terkait, 2024

Gambar 3.40

TOC Bidang Pembangunan Desa

Program untuk meningkatkan kemandirian desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21
Program Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Desa

Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	OPD
Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya perekonomian desa	Meningkatnya lembaga perekonomian di desa	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat di desa	Program pendaftaran penduduk	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
			Program pencatatan sipil	
	Meningkatnya kualitas lingkungan di desa	Meningkatnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat di desa	Program pengelolaan persampahan	DPRKPLH

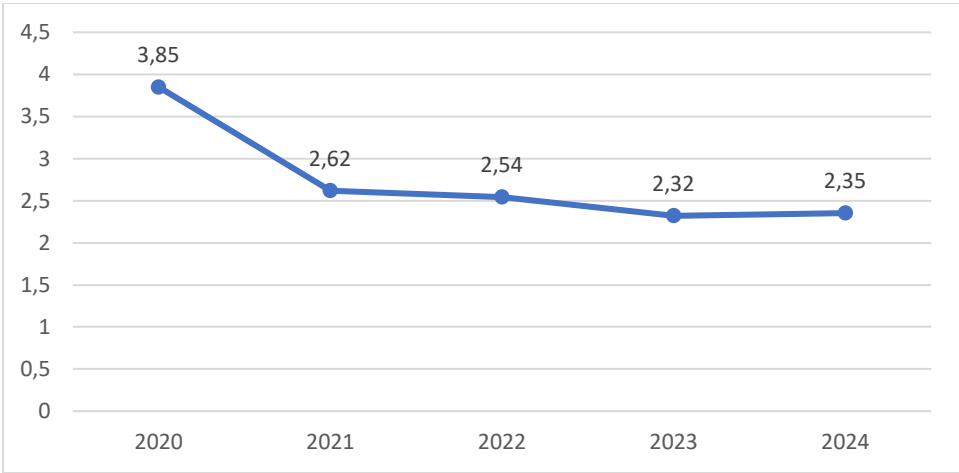
Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

3.4.5 Bidang Ketenagakerjaan

a. Masalah Utama Bidang Ketenagakerjaan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung. Adanya penduduk yang miskin dapat dipengaruhi salah satunya karena adanya pengangguran, karena jika masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan maka kebutuhan hidupnya tidak akan terpenuhi sehingga dapat digolongkan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka terdapat kaitan antara permasalahan maupun penanggulangan kemiskinan dengan bidang ketenagakerjaan. Permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan adalah masih adanya pengangguran di Kabupaten Temanggung yang ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 tercatat sebesar 2,35%. TPT menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kelompok penduduk yang terhitung dalam angkatan kerja mencakup seluruh penduduk pada usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, terdapat empat kategori penduduk yang dikategorikan menganggur yakni penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat melalui gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.41
TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yaitu persentase penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yaitu persentase penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Berikut adalah TPAK Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024:

Tabel 3.1
Perkembangan TPAK Kabupaten Temanggung

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Kabupaten Temanggung
2019	87,45	64,81	76,09
2020	59,63	57,82	58,73
2021	86,14	61,88	74,01
2022	87,00	65,26	76,14
2023	85,70	65,91	75,80
2024	87,61	68,52	78,06

Sumber: BPS, 2024

Kecenderungan kondisi ketenagakerjaan penduduk miskin yang membaik dari tahun 2023 ke 2024 berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2024, terlihat bahwa terdapat 25,90% penduduk miskin yang tidak bekerja, dimana perlu dilakukan pendefinisian mendalam apakah disebabkan ketidakmampuan (baik dari usia/disabilitas) atau justru berpotensi untuk bekerja namun tidak terserap dalam lapangan kerja. Selain itu,

penduduk miskin yang bekerja di sektor informal juga harus mendapatkan perhatian lebih karena sektor informal berpotensi terdampak guncangan ekonomi.

Permasalahan paling pokok dalam ketenagakerjaan terletak pada kesempatan kerja. Ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja terhadap kesempatan kerja yang tersedia disebabkan oleh lemahnya penyerapan tenaga kerja. Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang memberikan gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi, serta memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang jasa.

Tabel 3.2
Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja serta Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s.d. 2024

Kegiatan Utama	Tahun	
	2023	2024
I. Angkatan Kerja	482.651	502.253
1. Bekerja	471.459	490.430
2. Pengangguran terbuka	11.192	11.823
II. Bukan Angkatan Kerja	154.050	141.143
Jumlah	636.701	643.396
Tingkat Pengangguran	2,32	2,35

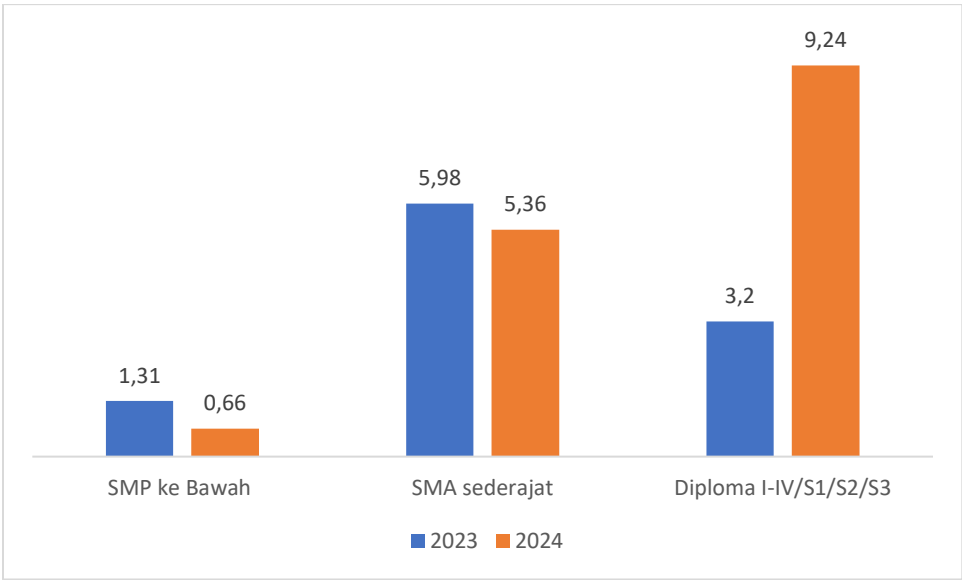
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Perkembangan TPAK Kabupaten Temanggung periode 2020-2024 cenderung meningkat hingga menjadi 78,06 persen di tahun 2024. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 78 hingga 79 orang diantaranya adalah angkatan kerja. TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya dari tujuan setiap orang bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan yang



dapat memenuhi kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kesempatan untuk bekerja bisa menjadi pemicu masalah terjadinya kemiskinan karena jika jumlah penduduk yang tidak bekerja (penyerapan tenaga kerja rendah) lebih banyak akan menyebabkan peningkatan penduduk miskin. Dilihat dari kondisi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah daripada angkatan kerja laki-laki, sehingga perlu ada ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan. TPAK Perempuan dapat digunakan untuk memaksimalkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang dapat membantu mengurangi disparitas gender di bidang ketenagakerjaan.

Pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.42
Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s.d. 2024

Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 2,35% dengan jumlah penganggur terbuka sebesar 11.823 jiwa dan jumlah angkatan kerja sejumlah 502.253. Sebagian besar penganggur didominasi oleh tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan Diploma I-IV/S1/S2/S3 (9,24%). Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang memiliki dampak buruk bagi perekonomian di masyarakat, dimana dengan tidak bekerja maka dapat mengakibatkan

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang nantinya dapat berujung kepada kemiskinan.

Industri perdagangan dan pengolahan sangat berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Pertumbuhan industri pengolahan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang kemudian akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi angka kemiskinan. Berikut adalah tabel perkembangan PDRB industri pengolahan dan industri perdagangan besar dan eceran:

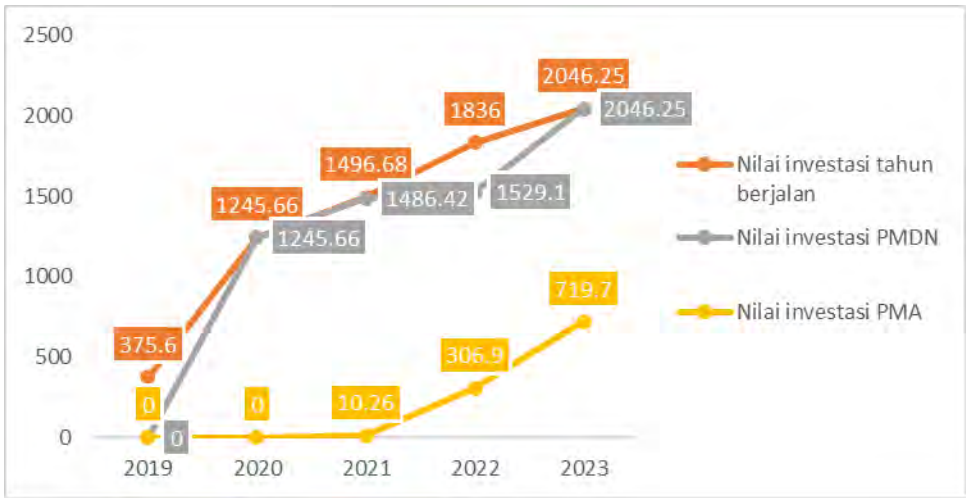
Tabel 3.1
Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan 2020–2024

Tahun	Industri Pengolahan	Industri perdagangan besar dan eceran	PDRB
2020	3.947,19	3.314,95	15.214,06
2021	4.025,97	3.559,94	15.387,93
2022	4.069,97	3.712,94	16.187,37
2023	4.245,85	3.928,94	16.997,53
2024	4.375,48	4.163,86	17.885,60

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Guna meningkatkan kesempatan tenaga kerja, sangat penting untuk mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, salah satunya melalui peningkatan daya tarik investasi di daerah. Realisasi investasi di Kabupaten Temanggung mencerminkan nilai modal yang digunakan oleh investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ruang lingkup realisasi investasi ini mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi pada tahun berjalan dihitung dari penjumlahan realisasi investasi bidang usaha baru di tahun tersebut. Berdasarkan data yang disajikan,

terlihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi investasi di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan.



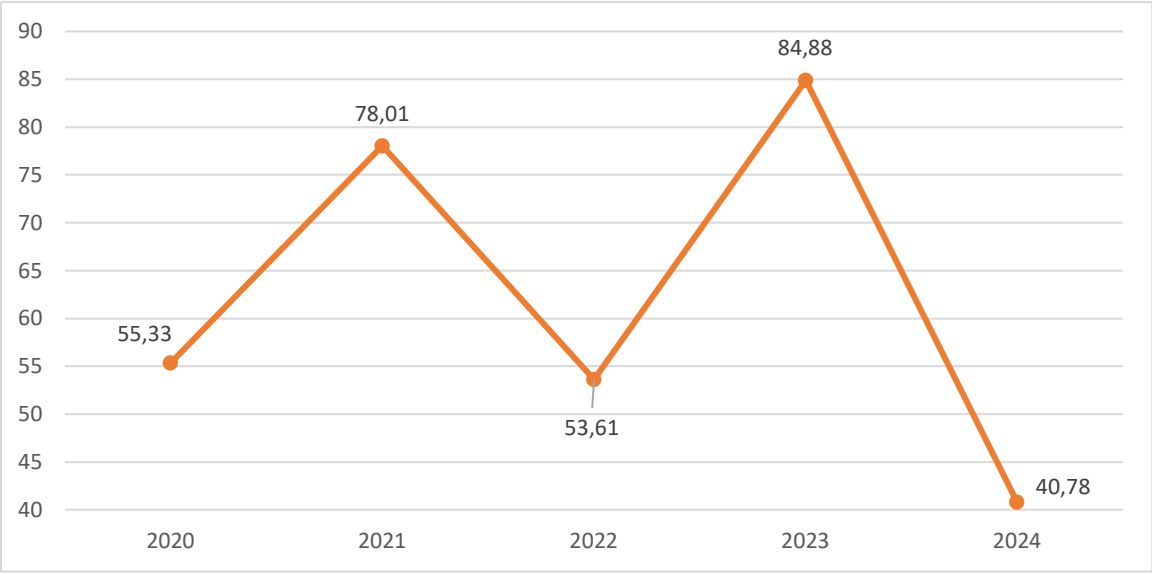
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.43
Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s.d. 2023

Pada tahun 2020, nilai realisasi investasi mencapai Rp. 1.245,66 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh peluncuran aplikasi NSWI sejak April 2020, yang memuat data investasi usaha mikro kecil (UMK) dan non-UMK secara keseluruhan, serta adanya stimulus bantuan Presiden untuk UMKM yang mendorong pengusaha lebih aktif dalam mengurus perizinan, sehingga laju investasi meningkat tajam. Sebaliknya, pada tahun 2019 belum ada aplikasi yang memuat data UMK dan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan masih rendah.

Pada tahun 2021, nilai realisasi investasi meningkat menjadi Rp. 1.496,68 miliar. Kemudian, pada tahun 2022 nilai investasi mencapai Rp. 1.836 miliar, dengan rincian Rp. 306,9 miliar dari PMA dan Rp. 1.529,1 miliar dari PMDN. Pada tahun 2023, nilai investasi terus bertumbuh menjadi Rp. 2.046,25 miliar, dengan rincian Rp. 719,70 miliar dari PMA dan Rp. 1.326,55 miliar dari PMDN. Memasuki triwulan II tahun 2024, nilai investasi tercatat sebesar Rp. 852.864.196.006, dengan PMA sebesar Rp. 89.000.000.000 dan PMDN sebesar Rp. 763.864.196.000. Data pendukung ini didasarkan pada pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan. Dengan adanya peningkatan realisasi investasi, diharapkan akan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan status pekerjaan utama¹, lima jenis status pekerjaan yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu butuh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga sering dipakai sebagai proksi pekerja di sektor informal, sedangkan dua status pekerjaan lainnya yaitu berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan dianggap sebagai proksi pekerja sektor formal. Status pekerjaan tersebut dapat dikaitkan dengan permasalahan penempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal. Pada sektor formal, pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat melalui capaian berikut ini:



Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.44
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

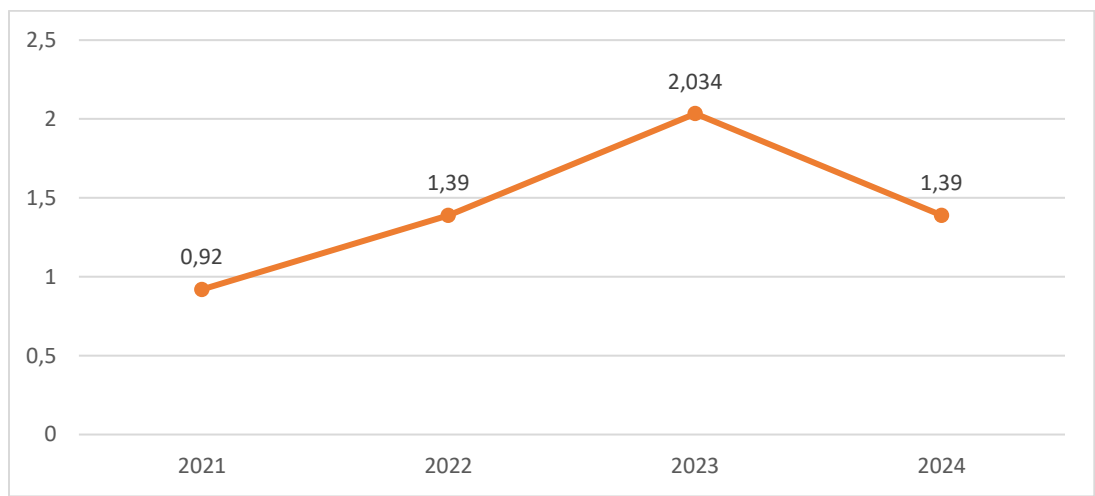
Permasalahan yang dihadapi dalam penempatan pencari kerja adalah pencari kerja yang cenderung memilih-milih pekerjaan, kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen, ketersediaan lowongan kerja belum dapat mengakomodir pencari kerja laki-laki usia diatas 30 tahun serta kualifikasi pencari kerja yang tidak memenuhi persyaratan lowongan kerja. Selain itu, disektor formal, terdapat rasio kewirausahaan daerah yang merupakan perbandingan jumlah orang berusaha yang dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama, dimana pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi

a. ¹ Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Publikasi BPS Kabupaten Temanggung, 2020



untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap, semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap maka semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

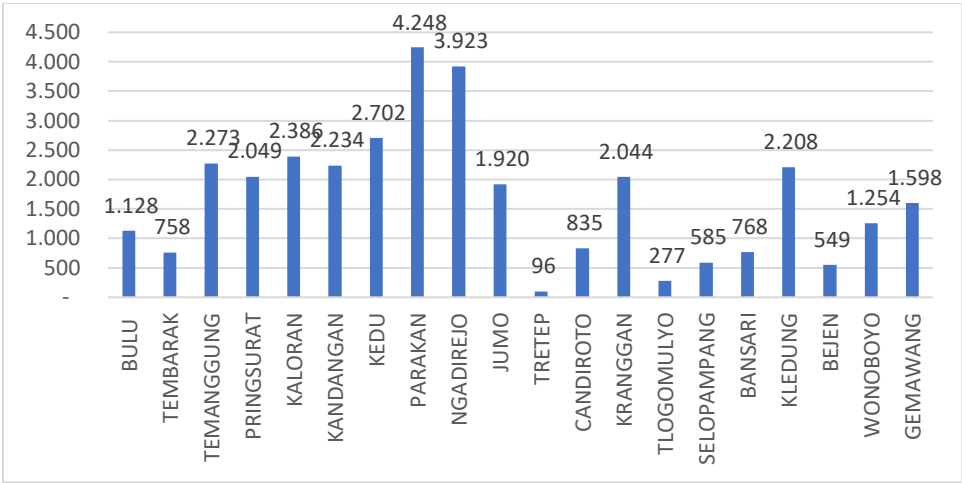
Pada sektor informal, kesempatan bekerja dapat dilihat pelaku usaha informal maupun UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung. Pada Triwulan II Tahun 2024, pelaku usaha informal (pedagang yang melakukan kegiatan usaha yang tidak memiliki tempat usaha tetap/permanen/berpindah-pindah) yang difasilitasi sejumlah 148 pelaku usaha dari 1.459 jumlah PKL (10,14%). Fasilitas tersebut belum seluruh kecamatan terfasilitasi, sejauh ini baru memfasilitasi pada kegiatan CFD Temanggung, kelompok Klithikan, dan pedagang tiban. Di lain sisi, UMKM yang difasilitasi dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.45
Persentase UMKM yang Difasilitasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 s.d. 2024

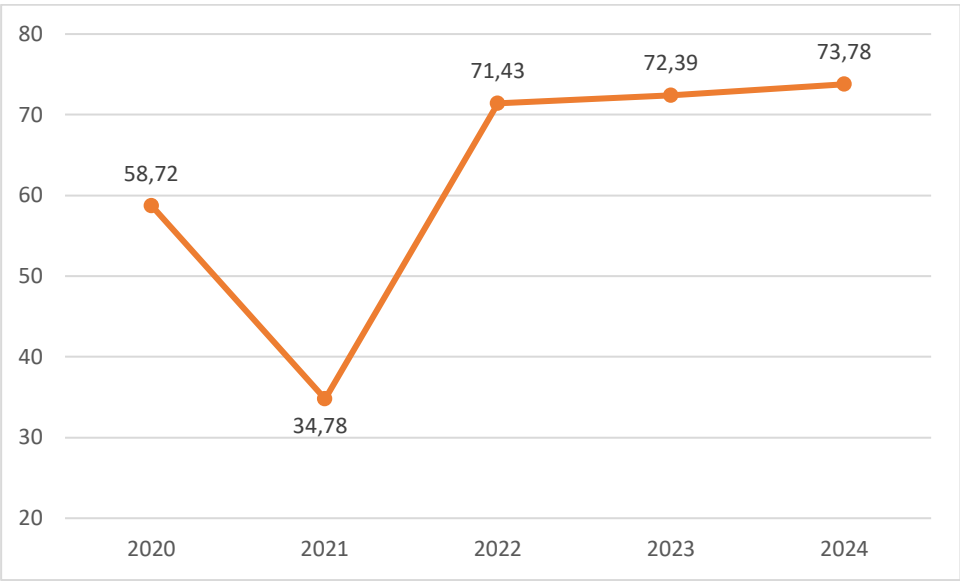
UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha antara lain Gelar Produk UMKM dan pelatihan yang diharapkan mampu meningkatkan pemasaran baik secara *offline* maupun *online* dan meningkatkan omset guna mengembangkan usaha yang berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha dan penyerapan tenaga kerja, serta menambah kemadcmpuan dalam membangun usaha. Apabila dilihat dari jumlah UMKM berbasis desa/kelurahan, pada tahun 2023 tercapai jumlah sebesar 33.835 UMKM, dengan persentase tiap kecamatan sebagai berikut:



Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.46
Persentase UMKM Berbasis Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Melihat dampak pengangguran pada tatanan kehidupan sosial yang bisa berakibat pada kemiskinan, maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui kompetensi pencari kerja guna meningkatkan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan berbasis kompetensi. Berdasarkan hal tersebut, persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Temanggung yaitu:



Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.47
Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2020 s.d. 2024

Pada tahun 2023, dari pendaftar pelatihan sebanyak 641 orang terdapat 464 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi (72,39%) yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah pencari kerja di sektor informal. Meskipun peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi mengalami peningkatan, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan kuota pelatihan akibat anggaran yang terbatas dan tingginya minat masyarakat. Pelatihan DBHCHT hanya dapat diakses oleh petani atau keluarga buruh tembakau, sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Untuk mencapai target, akan diajukan perencanaan anggaran pelatihan melalui APBN dan DBHCHT. Pemerintah juga berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

Di Kabupaten Temanggung, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja ini juga dilakukan melalui program perluasan kesempatan kerja. Program perluasan kesempatan kerja bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan dan membangun ekosistem kerja yang lebih luas, sehingga pencari kerja tidak hanya terpaku pada pekerjaan di sektor formal. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dengan enam jurusan yang diikuti oleh total 128 peserta. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja, yaitu jumlah peserta yang dilatih dibagi jumlah total pencari kerja terdaftar, kemudian dikalikan 100%. Namun, karena indikator ini merupakan program baru pada tahun 2024, belum tersedia data kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga saat ini, data jumlah pencari kerja terdaftar pada triwulan I tahun 2024 adalah 927 orang, realisasi pelaksanaan pelatihan masih 0% karena pelatihan baru akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024 dan kendala anggaran yang belum dapat diakses. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target adalah mempercepat pelaksanaan pelatihan segera setelah anggaran tersedia.

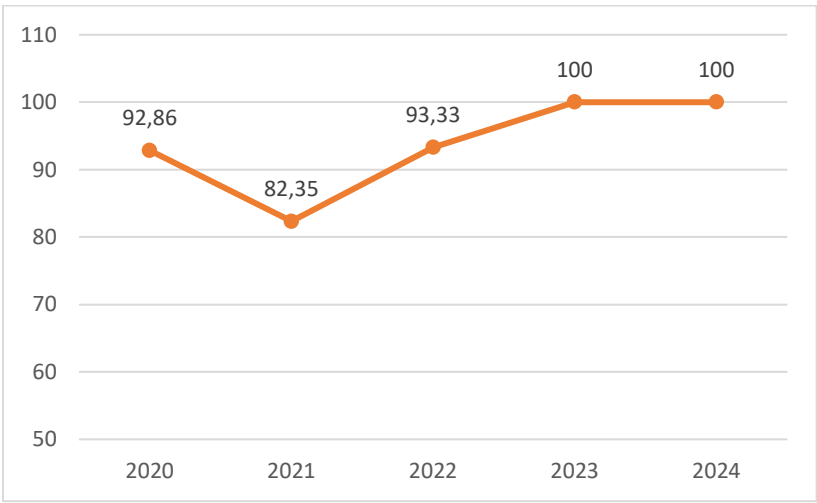
Selain pelatihan berbasis kompetensi dan perluasan kesempatan kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Penyuluhan dan

bimbingan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sistematis, obyektif, dan dinamis mengenai dunia kerja, sehingga pencari kerja dapat memiliki gambaran yang jelas tentang peluang kerja dan memahami potensi diri mereka (bakat, minat, dan kemampuan) untuk menentukan pilihan karier yang tepat. Indikator ini sama dengan perluasan kesempatan kerja merupakan program baru yang dimulai pada tahun 2024, sehingga data kinerja dari tahun 2019 hingga 2023 belum tersedia. Pada triwulan II tahun 2024, terdapat 687 pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan dari total 927 pencari kerja terdaftar, menghasilkan persentase capaian sebesar 74,11%. Faktor pendorong keberhasilan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan peran dinas, yang mempermudah akses penyuluhan di tingkat desa. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan penyuluhan dan perjalanan dinas. Upaya yang direncanakan untuk mencapai target pada tahun 2024 adalah menjalin komunikasi aktif dengan desa untuk mendapatkan akses waktu pada pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh desa.

Di lain sisi, pencegahan risiko kehilangan pekerjaan dan pemberian perlindungan bagi pekerja harus diberikan sejak usia produktif bekerja dan mudah diakses bagi seluruh pekerja di Kabupaten Temanggung, terlepas apakah mereka bekerja di sektor formal maupun informal. Selain itu, jaminan perlindungan ketenagakerjaan harus adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi ekosistem industri dan ketidakpastian pasar serta secara langsung berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan kerja. Jaminan ketenagakerjaan dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru ketika para pekerja mengalami guncangan ekonomi termasuk PHK.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan ini mencakup masalah hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja di satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan dimulai dengan perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja.

Persentase penyelesaian perselisihan melalui mediasi dapat diukur dengan menghitung jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi dibandingkan dengan jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, semua perselisihan berhasil diselesaikan melalui mediasi, mencapai persentase penyelesaian sebesar 100% (dengan 6 perselisihan yang selesai melalui mediasi). Hal ini didorong oleh pemahaman yang lebih baik dari para pihak mengenai prosedur penyelesaian perselisihan, meskipun masih terdapat kendala dalam mencapai kesepakatan dalam perundingan bipartit. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.



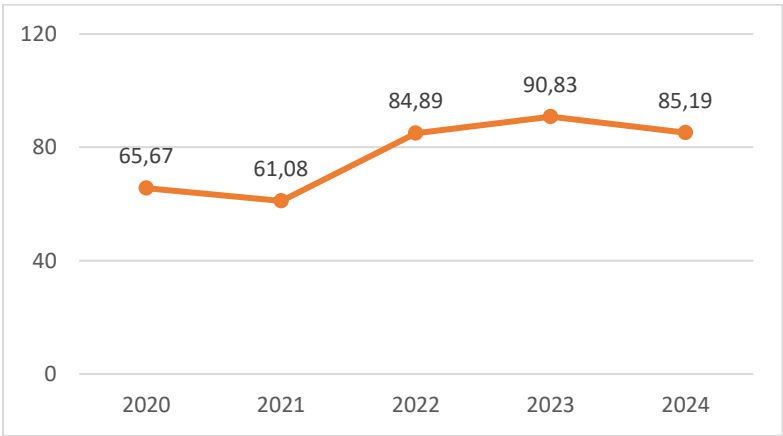
Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.48
Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Selesai Melalui Mediasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

Dalam hal cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, Program BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja melalui lima program utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Persentase kepesertaan program ini terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, mencapai 90,83% pada tahun 2023. Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat seperti kondisi ekonomi perusahaan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Upaya peningkatan sosialisasi dan koordinasi



dengan BPJS Ketenagakerjaan terus dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan. Persentase kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung yaitu:

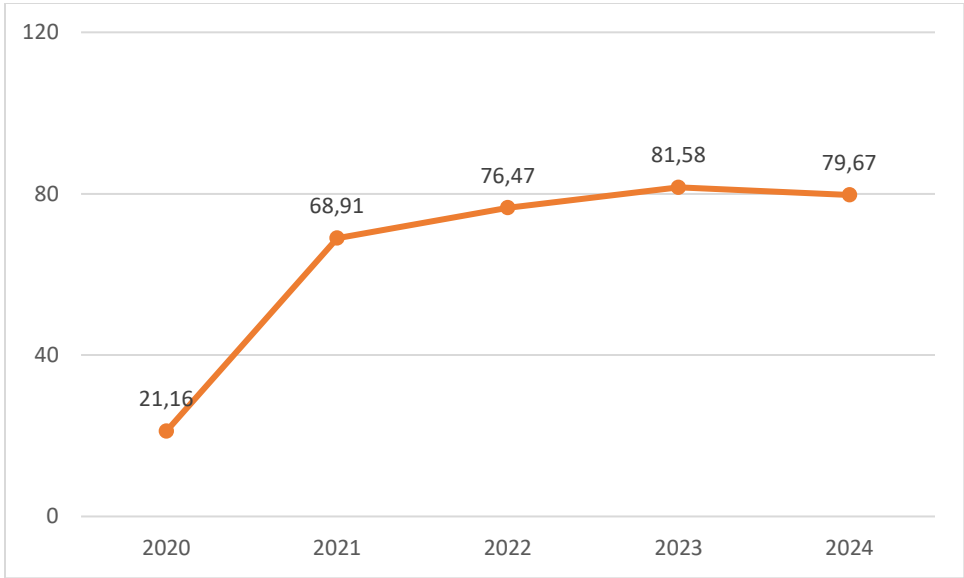


Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.49
Persentase Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

Terkait upah pekerja, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Temanggung pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.109.690. Diharapkan seluruh perusahaan di kabupaten ini, kecuali usaha mikro dan kecil, membayar pekerjaanya sesuai dengan UMK. Data menunjukkan peningkatan persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK dari tahun 2019 hingga 2023. Faktor pendorong utama adalah kesadaran pengusaha akan pentingnya peran pekerja dalam produksi, sementara faktor penghambatnya adalah produktivitas pekerja yang belum memenuhi harapan. Untuk mengatasi hal ini, sosialisasi mengenai UMK akan terus dilaksanakan kepada perusahaan-perusahaan di Temanggung. Berikut adalah persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK di Kabupaten Temanggung:





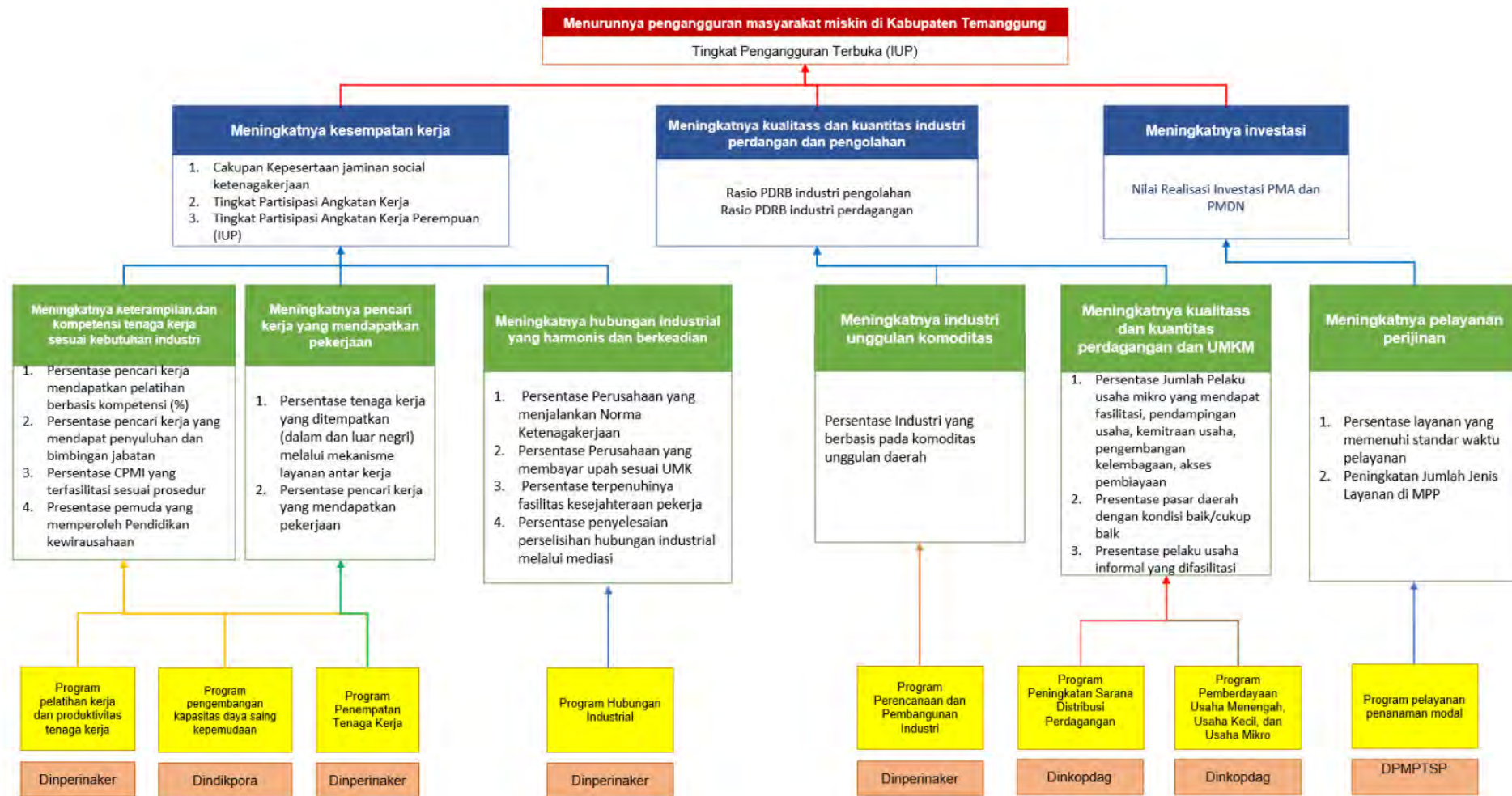
Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.50
Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK Kabupaten
Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

b. Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

Kemiskinan di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adanya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang ketenagakerjaan yaitu (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, serta (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa guna menurunkan pengangguran masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung didukung dengan (1) Meningkatnya kesempatan kerja, (2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas industri perdagangan dan pengolahan, dan (3) Meningkatnya investasi, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung melalui pembahasan dengan Perangkat Daerah Terkait, 2024

Gambar 3.51

Theory of Change (ToC) Bidang Ketenagakerjaan

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya menurunnya tingkat pengangguran masyarakat miskin Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Program OPD dalam Upaya Mendukung Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Masyarakat Miskin Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung

Tujuan	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Indikator	Program	OPD
Menurunnya pengangguran masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Cakupan Kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan	Meningkatnya keterampilan, kesejahteraan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	1. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinperinaker
			2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		2. Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan		
			3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)		3. Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur		
					4. Presentase pemuda yang memperoleh Pendidikan kewirausahaan		
						Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dindikpora

Tujuan	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Indikator	Program	OPD
				Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	1. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja 2. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
				Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan	1. Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan 2. Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK 3. Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja 4. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas industri perdagangan dan pengolahan	1. Rasio industri pengolahan PDRB 2. Rasio industri perdagangan PDRB	Meningkatnya industri unggulan komoditas	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas perdagangan dan UMKM	1. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinkopdag UMKM Dinkopdag UMKM



Tujuan	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Indikator	Program	OPD
		Meningkatnya investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya pelayanan perijinan	2. Presentase pasar daerah dengan kondisi baik/cukup baik 3. Presentase pelaku usaha informal yang difasilitasi 1. Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan 2. Peningkatan Jumlah Jenis Layanan di MPP	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung melalui pembahasan bersama Dinas Terkait, 2024

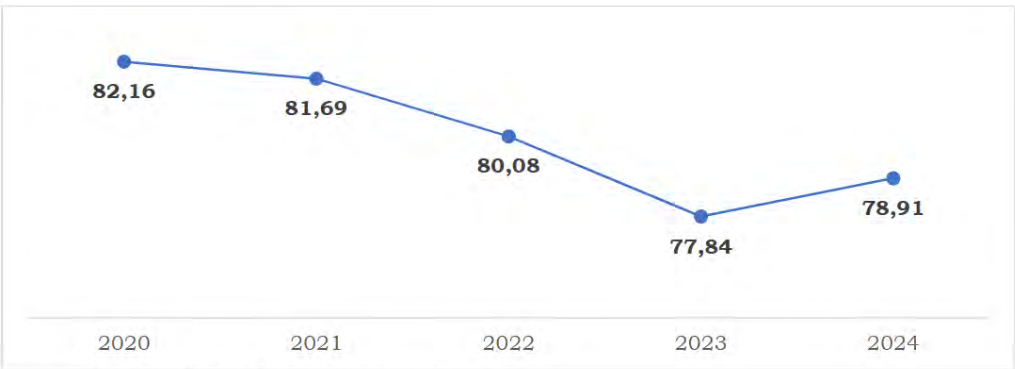
3.4.6 Bidang Ketahanan Pangan

a. Masalah Utama Bidang Ketahanan Pangan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti terpenuhinya pangan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Permasalahan kemiskinan menjadi masalah prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung. Selain itu, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu *end goals* dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Temanggung.

Salah satu ukuran kemiskinan yaitu tingkat konsumsi di masyarakat atau kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan sehari-hari. Kemiskinan membatasi daya beli seseorang untuk mendapatkan pangan yang berkualitas, yang kemudian memengaruhi gizi dan kesehatan. Sebaliknya, ketahanan pangan yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, sehingga dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan.

Ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang pengukurannya dilakuka oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional sejak Tahun 2019. IKP merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Capaian IKP Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 terakhir menunjukkan angka yang masih fluktuatif sebagaiana gambar dibawah:



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

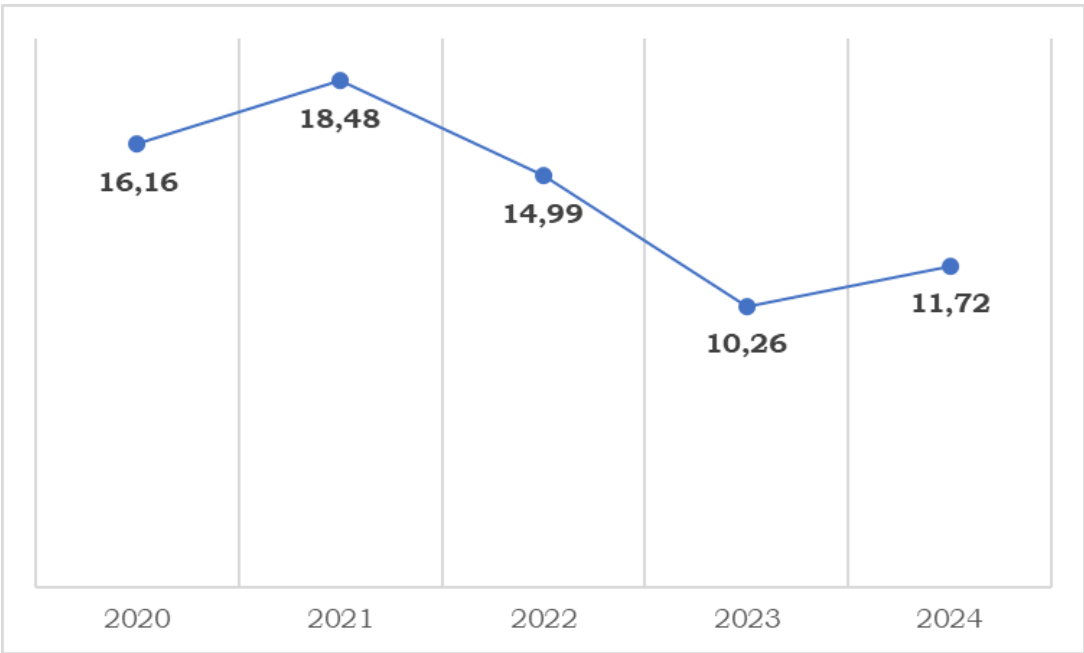
Gambar 3.52
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung



Berdasarkan Gambar 3.52 capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari Tahun 2020-2023 namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2024. Penurunan yang terjadi pada kurun waktu Tahun 2020-2023 dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam ketersediaan atau pemanfaatan pangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasokan pangan, kebijakan pertanian, inflasi harga pangan, serta krisis global. Setelah menunjukkan tren negatif dalam beberapa tahun terakhir, capaian IKP Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang positif pada Tahun 2024 ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKP sebesar 1,07 poin. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Temanggung. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung diantaranya mempertahankan produksi pangan, penguatan distribusi pangan, efektivitas program yang menunjang ketahanan pangan serta dukungan terhadap petani melalui subsidi serta pelatihan pertanian berkelanjutan yang turut memperkuat ketahanan pangan. Meski mengalami peningkatan, untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian serta fluktuasi harga pangan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung. Intervensi kebijakan seperti peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, penguatan distribusi, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Jika IKP mengukur ketahanan pangan pada tingkat kabupaten, maka ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi diukur untuk mengetahui proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini membantu dalam memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi

dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.53.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.53
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada Tahun 2020, prevalensi ini tercatat sebesar 16,16%, kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 18,48%. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi akses dan distribusi pangan, serta menurunnya daya beli masyarakat. Namun, pada Tahun 2022, angka tersebut mulai menurun menjadi 14,99%, menunjukkan adanya perbaikan dalam ketersediaan dan konsumsi pangan.

Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2023, dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan turun menjadi 10,26%. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam ketahanan pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung akses pangan bagi masyarakat. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi



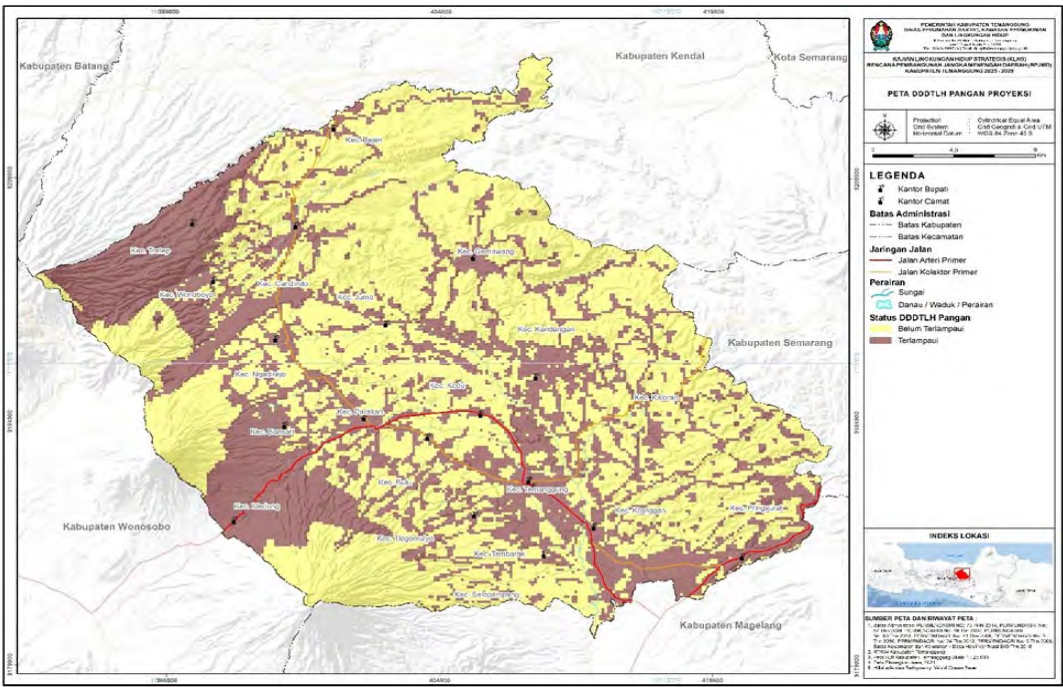
yang lebih baik sesuai standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Faktor lain yang mempengaruhi antara lain adanya program intervensi yang berhasil mengurangi ketidakcukupan pangan. Jika tren ini terus berlanjut, Kabupaten Temanggung berpotensi mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa mendatang.

Namun pada Tahun 2024, capaian PoU Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,46 menjadi 11,72%, hal ini menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi energi minimal atau lebih banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya fluktuasi produksi dan harga pangan serta inflasi yang tinggi sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

Status daya dukung pangan merupakan selisih ketersediaan dan kebutuhan total dengan ketentuan:

- a) Apabila selisih <0 maka dikategorikan “terlampau” atau defisit.
- b) Apabila selisih ≥ maka dikategorikan “belum terlampau” atau surplus

Kondisi daya dukung dan daya tampung pangan Kabupaten Temanggung secara rinci per kecamatan sebagaimana pada Tabel 2.11.



Gambar 2.1
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2029

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 masih *surplus* sebesar 3.273,82 ton/tahun, dan diproyeksikan berdasarkan pola ruang dengan adanya penurunan lahan pertanian dan peningkatan jumlah penduduk maka kondisinya defisit sebesar 8.150,05 ton/tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung belum mencukupi untuk kebutuhannya, sehingga memerlukan upaya tambahan untuk meningkatkan daya dukung pangan. Skenario peningkatan daya dukung pangan di Kabupaten Temanggung yaitu dengan meningkatkan indeks pertanaman menjadi 1,5 sehingga daya dukung pangan Kabupaten Temanggung tahun 2029 bisa meningkat menjadi 1,55 dan masih *surplus* sebesar 32.956,40 ton/tahun. Secara rinci bisa dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.1
Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2029

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	Bansari	1.427,03	1.804,52	-377,49	44,84%	55,16%
2	Bejen	2.353,63	1.621,20	732,43	82,09%	17,91%
3	Bulu	2.851,32	3.664,55	-813,23	58,64%	41,36%
4	Candiroto	1.891,75	2.440,07	-548,31	66,25%	33,75%
5	Gemawang	1.716,25	2.515,84	-799,59	77,83%	22,17%
6	Jumo	3.648,05	2.237,47	1.410,58	79,35%	20,65%
7	Kaloran	3.626,23	3.412,24	213,99	71,33%	28,67%
8	Kandangan	2.534,81	3.948,28	-1.413,47	63,12%	36,88%
9	Kedu	7.208,80	4.454,81	2.753,99	73,63%	26,37%
10	Kledung	417,46	2.096,52	-1.679,06	20,56%	79,44%
11	Kranggan	2.484,33	3.739,19	-1.254,86	58,80%	41,20%
12	Ngadirejo	4.382,37	4.234,98	147,38	69,66%	30,34%
13	Parakan	2.575,40	3.989,17	-1.413,76	45,44%	54,56%
14	Pringsurat	2.635,77	3.949,41	-1.313,64	53,65%	46,35%
15	Selopampang	3.195,11	1.537,45	1.657,66	87,88%	12,12%
16	Temanggung	2.652,14	6.208,98	-3.556,84	31,79%	68,21%
17	Tembarak	3.072,33	2.358,79	713,54	71,93%	28,07%

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
18	Tlogomulyo	1.424,29	1.745,56	-321,27	68,39%	31,61%
19	Tretep	0,00	1.599,45	-1.599,45	0,00%	100,00%
20	Wonoboyo	1.301,73	1.990,38	-688,65	46,57%	53,43%
	Total	51.398,81	59.548,85	-8.150,04	60,77%	39,23%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029.

Saat ini masyarakat di Kabupaten Temanggung masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Secara umum, data penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sejumlah 471.459 jiwa, dengan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 20.700 jiwa. Lapangan pekerjaan menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Pada tabel berikut ditampilkan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.3
Karakteristik Ketenagakerjaan Penduduk Miskin
Kabupaten Temanggung

Karakteristik	2023 (%)	2024 (%)
Status Bekerja		
• Tidak bekerja	37,33	25,90
• Bekerja di sektor informal	47,65	52,68
• Bekerja di sektor formal	15,02	21,41
Sektor Bekerja		
• Tidak bekerja	32,14	25,90
• Bekerja di sektor pertanian	39,64	41,51
• Bekerja di sektor non pertanian	23,03	32,59

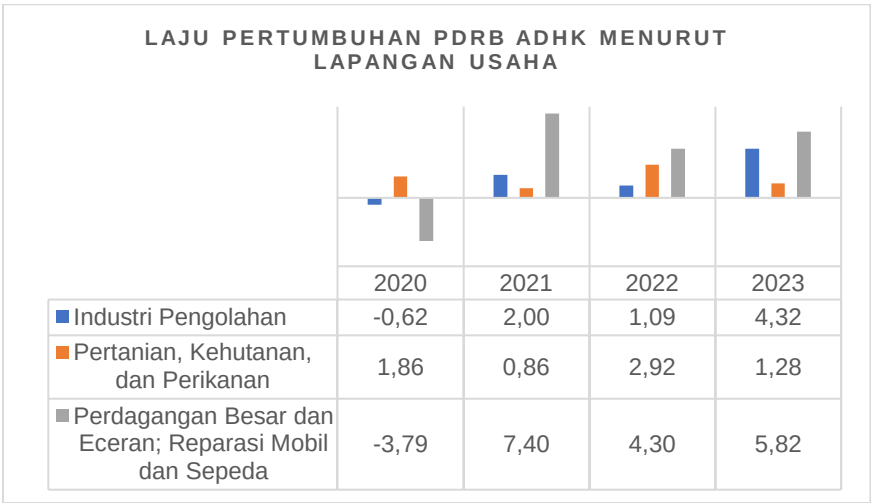
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Pertumbuhan ekonomi seharusnya akan menurunkan kemiskinan, namun efek ketimpangan pendapatan mengurangi dampak efek pertumbuhan pendapatan sehingga kemiskinan turun melambat. Dengan demikian secara empiris dapat dibuktikan bawa kebijakan redistribusi pendapatan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengentasan kemiskinan. Seberapa jauh pertumbuhan



ekonomi Kabupaten Temanggung pro terhadap kemiskinan (*pro poor growth*).

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin, kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, pertumbuhan perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami penurunan menjadi 5,00 persen dari 5,20 persen di tahun 2022. Di tahun 2023 ini sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 1.28 persen, jauh lebih lambat dibanding pertumbuhan sektor tersier lainnya. Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada tiga sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, data diolah 2024

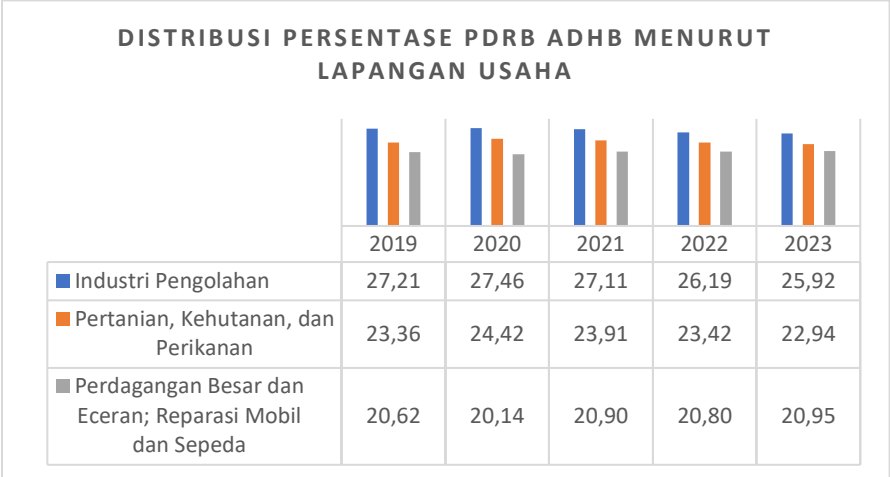
*Capaian 2024 belum diterbitkan

Gambar 3.54
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada Tiga Sektor Unggulan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 (persen)

Pertumbuhan di tahun 2023 pada sektor perdagangan sebesar 5,82 persen, sektor industri pengolahan sebesar 4,32 persen dan sektor pertanian sebesar 1,28 persen. Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan sektor pertanian masih lebih lambat dibandingkan

sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2019–2023 pada tiga sektor unggulan penggerak perekonomian di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, data diolah 2024

*Capaian 2024 belum diterbitkan

Gambar 3.55
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada Tiga Sektor Unggulan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 (persen)

Distribusi sektor pertanian pada PDRB ADHB Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar 22.94 persen, menempati urutan kedua setelah sektor industri pengolahan sebesar 25.92 persen.

Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kabupaten pada tahun 2023 sejumlah 72.960 jiwa² (9,26%) lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 tercatat sebesar 73.040 jiwa (9,33%). Karena 40 persen penduduk miskin bekerja di sektor pertanian, maka pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian harus mendapat perhatian lebih dalam kerangka pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka terdapat kaitan antara permasalahan maupun penanggulangan kemiskinan dengan bidang pertanian. Permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan

b. [2](#) Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024



bidang pertanian adalah masih banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani yang masuk ke dalam kategori miskin.

Guna meningkatkan PDRB sektor pertanian maka perlu memperhatikan produktivitas pertanian baik pada produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan.

Tabel 3.4
Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Padi	ton/ha	5,9	5,9	6,315	6,346	6,149
2	Produktivitas Jagung	ton/ha	4,9	4,5	4,61	4,6	5,76

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Peningkatan produktivitas tanaman pangan didukung oleh kenaikan luas panen dan produksi disebabkan karena adanya penambahan luas tanam, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, penggunaan benih yang berkualitas (unggul dan bersertifikat).

Berbagai upaya dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2024 melalui berbagai bentuk kegiatan fasilitasi, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan benih unggul serta gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Sehingga dengan kondisi serta berbagai hambatan yang akan terjadi di tahun 2024, produkvtas komoditas tanaman pangan di Kabupaten Temanggung masih dapat dipertahankan.

Tabel 3.5
Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Bawang Putih	ton/ha	6,58	6.51	6,916	7,141	7,302
2	Produktivitas Bawang Merah	ton/ha	7,36	7.140	8,1	7,665	7,65



3	Produktivitas Cabai Rawit	ton/ha	7	7	7,636	7,55	7,5
4	Produktivitas Cabai Besar	ton/ha	7,21	7.057	7,904	7,753	7,6

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2024 produktivitas bawang putih 7,302 ton/ha, bawang merah 7,65 ton/ha, cabai rawit 7,5 ton/ha dan cabai besar 7,6 ton/ha. Capaian ini disebabkan meningkatnya animo masyarakat masyarakat mulai beralih ke tanaman hortikultura karena trend harga jual tinggi (dengan range waktu yang lama). Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah adanya kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang putih baik itu melalui APBN, APBD II, Penerapan teknologi budidaya (GAP dan GHP) yang semakin berkembang. Kesadaran petani untuk membentuk kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi, adanya kegiatan pemurnian benih bawang geol (bawang lokal unggul Temanggung).

Faktor penghambat peningkatan produktivitas tanaman hortikultura seperti perubahan regulasi pupuk subsidi, kenaikan harga pupuk non subsidi, faktor perubahan cuaca/iklim (El nino), perubahan cuaca/iklim berpengaruh pada kenaikan serangan penyakit pada tanaman hortikultura. Untuk mengatasi hal tersebut dan mempertahankan produktifitas dilakukan beberapa langkah yaitu pendampingan dan fasilitasi, bantuan sarana dan prasarana pertanian, penggunaan benih unggul, penanganan hama dan penyakit secara lebih dini, secara berkelompok dan penyuluhan GAP (Good Agricultural Practices) yang benar, pelatihan pembuatan pupuk organic gunaantisipasi kelangkaan pupuk di pasaran, bimtek pengolahan pasca panen komoditas hortikultura dan fasilitasi sarana prasarana pasca panen hortikultura. Pada tahun 2024 ini harga bawang merah, dan cabai petani mendapat harga yang baik sehingga minat untuk menanam komoditas hortikultura semakin meningkat.

Tabel 3.6
Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024



1	Produktivitas Tembakau	ton/ha	0.678	0,688	0,668	0,656	0,67
2	Produktivitas Kopi Robusta	ton/ha	0.679	1	0,693	0,725	0,744
3	Produktivitas Kopi Arabika	ton/ha	0,62	1	0,65	0,7	0,551

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat produktivitas komoditas tembakau mengalami penurunan dari tahun 2021, hal ini disebabkan karena perubahan cuaca/iklim ekstrem (mundur 2 dasarian yang berpengaruh pada jadwal tanam, tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanam, saat panen maupun pasca panen, pada masa pertumbuhan tanaman terdapak el Nino sehingga pertumbuhan tanaman terganggu/tidak maksimal), kepastian harga yang tidak menentu (cenderung turun setiap tahun) sehingga petani beralih ke komoditas yang lain yang lebih menguntungkan.

Tahun 2024 Komoditas kopi arabika mengalami penurunan karena dampak perubahan iklim (saat proses pembungaan intesitas hujan tinggi sehingga bunga rontok) dan dampak elnino (kering) saat proses pertumbuhan buah tidak optimal sehingga produksi dan provitas menurun, dampak perubahan regulasi pupuk sehingga pemupukan kurang intensif (pupuk subsidi terbatas, pupuk non subsidi harga tinggi), dari dampak dari menurunnya produksi harga kopi mengalami kenaikan yang signifikan sehingga petani tetap diuntungkan.

Khusus untuk kopi arabika, pola tanam sebagian besar secara tumpang sari dengan komoditas lain sehingga pola perawatan, pemupukan dan pemeliharaan belum optimal. Dampak perubahan iklim dan el nino berpengaruh pada penurunan produksi dan provitas. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produktifitas tanaman perkebunan diantaranya melalui pelatihan GAP dan fasilitasi serta pendampingan oleh PPL secara intensif, pemberian bantuan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen, pengembangan kopi dan vanili dengan benih unggul yang berkualitas, peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan dengan benih entres yang berkualitas dan bersertifikat, pelatihan budidaya dan PPHT.

Tabel 3.7

**Produktivitas Ternak Ruminansia
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Sapi	kg/ekor	177	177,2	177,4	177,6	177,6
2	Produktivitas Kambing	kg/ekor	13.68	14	13,7	13,71	13,71
3	Produktivitas Domba	kg/ekor	13,68	14	13,7	13,71	13,71

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

**Tabel 3.8
Produktivitas Ternak Unggas
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Ayam Ras Pedaging	kg/ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
2	Produktivitas Ayam Ras Petelur	kg/ekor	10,88	10,26	10,35	10,88	10,88

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

**Tabel 3.9
Tingkat Produktivitas Ikan (Budidaya)
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2024**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Ikan Nila	kg/m2	3,82	4,05	5,40	6,20	1,21
2	Produktivitas Ikan Lele	kg/m2	10,52	10,76	12,60	13,80	12,6

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Beberapa strategi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan produktivitas pertanian



diantaranya terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian, meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM petani, meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana pertanian, meningkatnya pemasaran dan penjualan hasil pertanian.

Prasarana pertanian adalah infrastruktur pendukung yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan pertanian. Salah satunya dengan fasilitasi pengembangan sumber-sumber air dengan pembangunan jaringan irigasi usaha tani yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan. Persentase prasarana yang dimanfaatkan sesuai.

Tabel 3.10
Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	na	na	na	100	100

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Prasarana pertanian (sumber-sumber air) yang selama ini dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal dan berfungsi dengan baik. Di tahun 2024 sebanyak 70 unit telah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yaitu prasarana pertanian tidak sesuai kriteria / syarat teknis, manajemen pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak terencana (misalnya sudah dibangun irigasi tapi tidak dimanfaatkan dengan baik), kurangnya kesadaran pribadi dalam mengelola aset kelompok / bersama. Dalam menghadapi tantangan tersebut, telah dilakukan verifikasi teknis serta pendampingan dan penyuluhan tentang pemanfaatan prasarana sesuai dengan fungsinya.



Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A.

Tabel 3.11
Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	58,62	58,866

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel 3.11 diketahui bahwa capaian indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten Temanggung masih berada pada kategori kinerja kurang dan memerlukan perhatian. Penyebab yang membuat capaian IKSI di Kabupaten Temanggung belum optimal dikarenakan masih rendahnya kondisi prasarana fisik dari saluran irigasi yang ada. Rincian aspek pada indeks kinerja sistem irigasi Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 3.12
Rincian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Tahun 2023-2024

Tahun	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)						
	Prasarana Fisik	Produktivitas	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	P3A/ GP3A/ IP3A	Jumlah
	Nilai Maks 45%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 5%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 100%
2023	21,73	9,65	6,94	10,26	3,93	6,12	58,62
2024	21,98	9,68	6,92	10,24	3,93	6,12	58,866

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan indeks kinerja secara keseluruhan dari tahun 2023 ke 2024. Pada aspek prasarana fisik, nilai meningkat dari 21,73% di

tahun 2023 menjadi 21,98% di tahun 2024. Indikator produktivitas juga mengalami sedikit kenaikan dari 9,65% menjadi 9,68%, sementara sarana penunjang mengalami penurunan tipis dari 6,94% menjadi 6,92%. Organisasi personalia menunjukkan sedikit penurunan dari 10,26% menjadi 10,24%, sedangkan dokumentasi tetap stagnan di angka 3,93%. Untuk aspek peran serta P3A/GP3A/IP3A, nilai tetap di angka 6,12% pada tahun 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, indeks kinerja sistem irigasi meningkat dari 58,62% di tahun 2023 menjadi 58,866% di tahun 2024, mencerminkan adanya sedikit peningkatan dalam pengelolaan dan kondisi sistem irigasi di Kabupaten Temanggung.

Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM petani sangat berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian yang akan berdampak pada meingkatnya PDRB dari sektor pertanian. Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kolompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usaha tani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini adalah pembagian kelas kemampuan kelompok tani (pemula, lanjut, madya, utama) yang berguna dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan sehingga penyuluhan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan usahatani yang efektif dan efisien.

Tabel 3.13
Jumlah Kelompok tani yang naik kelas di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024



1	jumlah kelompok tani yang naik kelas	angka	15	22	28	40	45
---	--------------------------------------	-------	----	----	----	----	----

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Tahun 2024 sebanyak 45 kelompok (1,4%) dari total kelompok tani yang terdaftar 3.205, target Tahun 2024 tercapai 100%. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas kelompok tani diantaranya adalah terselenggaranya pembinaan dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas petani, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok tani/gapoktan, pemahaman petani dalam menggali kelompoknya, peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani melalui sekolah lapang.

Pelatihan berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM petani. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang dititikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. Pelatihan Berbasis Kompetensi terdiri dari pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan (*off the job training*) dan penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi keahlian serta penilaian/asesmen di tempat kerja (*on the job training*). Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak kita bisa memberikan pelatihan kerja dibandingkan dengan animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja.

Tabel 3.14
Daftar Jumlah Pendaftar dan Peserta Pelatihan Kerja Tahun 2024

Indikator	2024
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	336
Jumlah pendaftar pelatihan	987
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73,78

Sumber : Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2024 bersumber dana APBN dan DBHCHT. Pada tahun 2023 jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 464 orang dan jumlah pendaftar pelatihan sebanyak 641 orang sehingga persentase pencari



kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 73,78%. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat petani tembakau dalam pencarian informasi tentang pelatihan yg ada di BLK Temanggung.

Upaya peningkatan produktivitas pertanian diperlukan mitigasi dan penanganan bencana pertanian. Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan input produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usaha tani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.

Tabel 3.15
Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian Tahun 2020-2024

No		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	na	na	na	na	99,23

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Gerakan pengendalian dilakukan secara swadaya, kerjasama dengan kelompok dan kerjasama dengan laboratorium hama provinsi. Upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir serangan hama/penyakit yaitu pelatihan PPHT (penerapan pengendalian hama terpadu), pelatihan pembuatan pestisida nabati, penyediaan obat-obatan. Faktor yang mempengaruhi gerakan pengendalian jumlah obat-obatan yang terbatas dan luas daerah yang terpapar sangat luas, jenis serangan hama penyakit yang semakin beragam.

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan dan penanggulangan penyakit hewan, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.



Penyakit hewan merupakan semua penyakit yang dapat menjangkiti hewan. Penyakit hewan meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

Tabel 3.16
Capaian Persentase Penanganan Penyakit Hewan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penanganan penyakit Hewan	na	96,68	100	90	97,43

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase penanganan penyakit hewan tahun 2024 sebesar 97,43%. Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan, ketersediaan obat -obatan dan peralatan medis, peningkatan kepercayaan masyarakat untuk memeriksakan/melaporkan ke petugas medis.

Faktor penghambat obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim, proporsi petugas dan populasi ternak tidakimbang, higienes sanitasi kandang yang buruk, peternak melaporkan saat kondisi sudah parah, kurangnya pengetahuan mitigasi penyakit, munculnya penyakit baru.

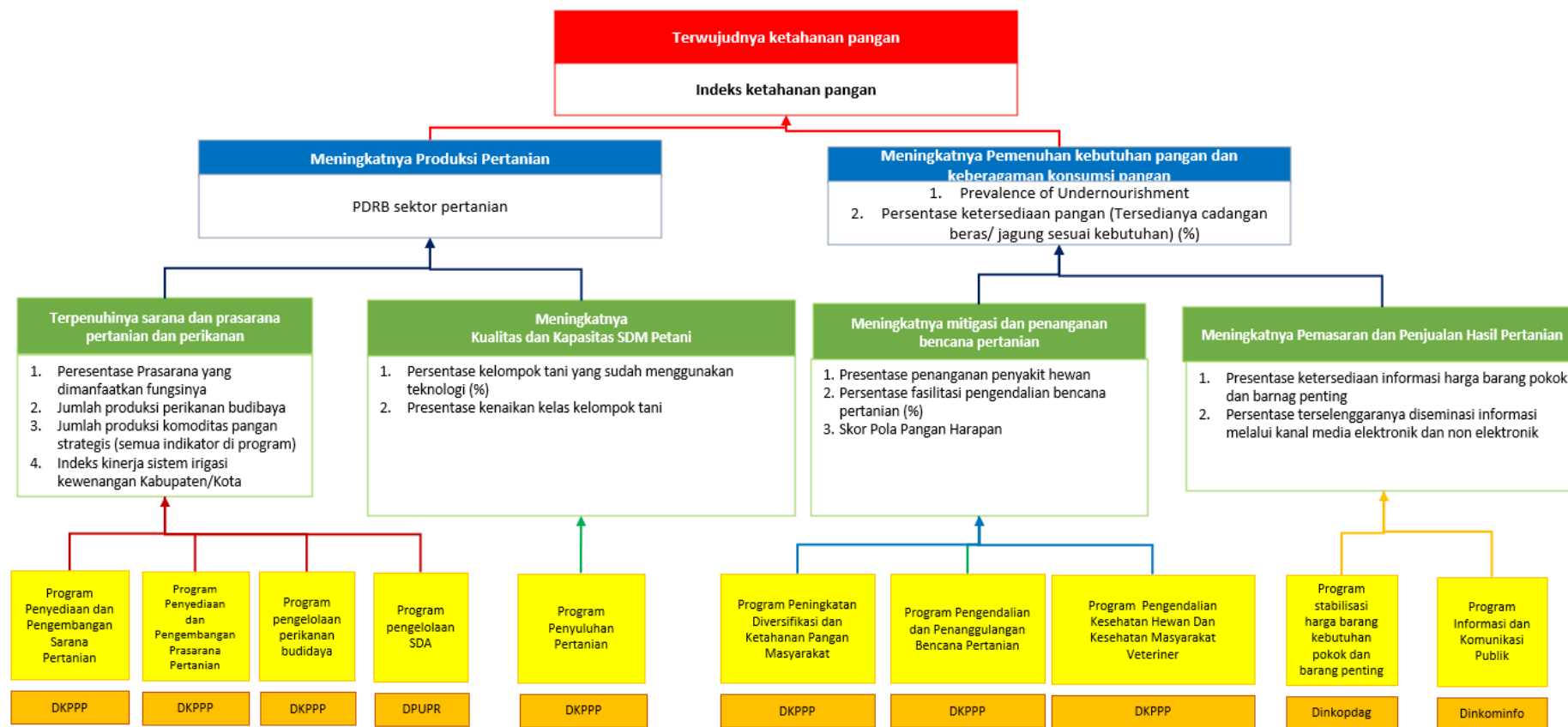
Selain hal-hal diatas hal penting lainnya yaitu ketersediaan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik dari level rumah tangga, pemerintah, maupun pelaku usaha. Tanpa informasi yang memadai, distribusi, ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan bisa terganggu. Ketersediaan informasi dapat memudahkan distribusi pangan yang merata, memberikan pengetahuan gizi kepada masyarakat, serta membantu petani dan pelaku usaha pangan meningkatkan efisiensi dan daya saing.

b. Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan

Kemiskinan di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah berasal dari ketahanan pangan. Indeks ketahanan pangan menjadi indikator utama yang perlu

mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang pertanian yaitu (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta (4) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bidang pertanian di Kabupaten Temanggung didukung dengan meningkatnya produktivitas pertanian sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung melalui Pembahasan dengan Perangkat Daerah Terkait, 2024

Gambar 3.56

Theory of Change (ToC) Bidang Ketahanan Pangan



Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya meningkatnya pendapatan masyarakat pada Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17
Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatnya Ketahanan Pangan Bidang Pertanian

Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	OPD
Terwujudnya ketahanan pangan	Meningkatnya Produksi Pertanian	Terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian dan perikanan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	DKPPP
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
			Program Pengelolaan SDA	DPUPR
		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM Petani	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
			Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPPP

Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	OPD
		Meningkatnya Pemasaran dan Penjualan Hasil Pertanian	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinkopdag
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo

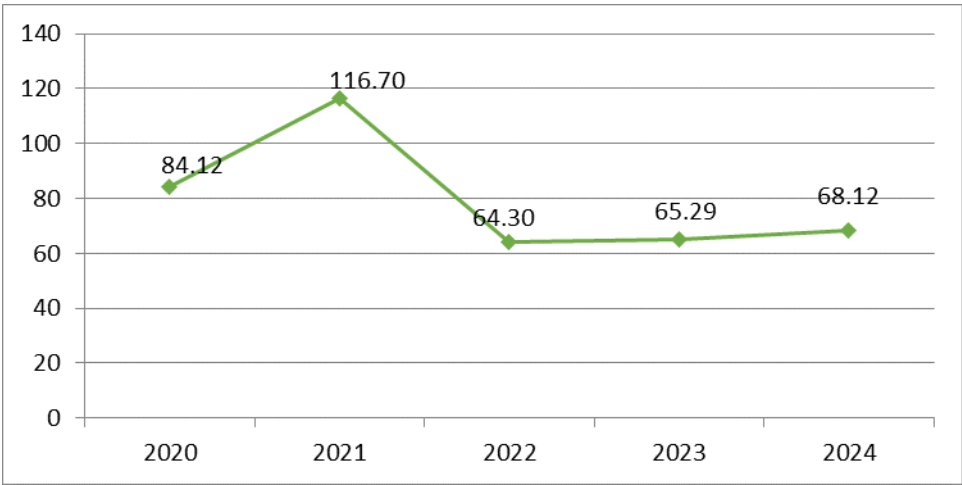
Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung melalui pembahasan bersama Dinas Terkait, 2024

3.4.7 Bidang sosial

a. Masalah Utama Bidang Sosial

Pembangunan bidang sosial merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif dan sejahtera. Peran pemerintah dalam pembangunan bidang sosial adalah menyediakan akses terhadap layanan kebutuhan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

PPKS sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Dari 26 jenis PPKS sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang terkait erat dengan kemiskinan adalah lansia, disabilitas, fakir miskin, disabilitas terlantar di luar panti, lansia terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, gelandangan dan pengemis di luar panti, lansia terlantar di dalam panti, anak terlantar di dalam panti, gelandangan dan pengemis di dalam panti, pekerja migran bermasalah sosial, serta korban bencana alam dan sosial. Apabila akses layanan dan perlindungan sosial ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan yaitu meningkatnya jumlah PPKS yang dapat memicu meningkatnya penduduk miskin. Maka dari itu bagi setiap Sedangkan realisasi capaian kinerja indikator Persentase PPKS yang ditangani sebagaimana gambar berikut.

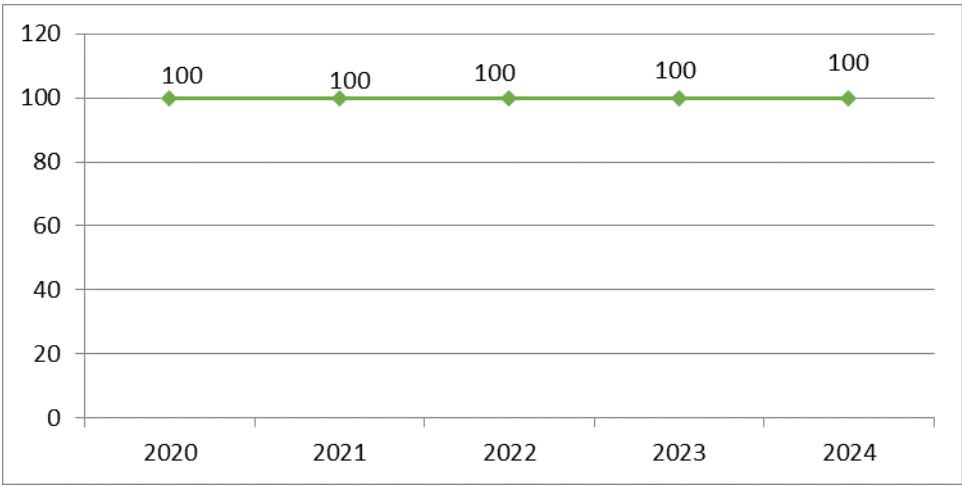


Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.57
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang Ditangani

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2022 mengalami penurunan karena sebagai akibat dilakukannya verifikasi dan validasi data, namun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2023 dan 2024

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan salah satu pendukung pelayanan sosial kepada PPKS. PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk dapat meningkatkan partisipasi PSKS, maka perlu diadakan pembinaan dan pemberdayaan. Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial dihitung dari Jumlah PSKS dibagi jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dikali 100. Berikut Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung.



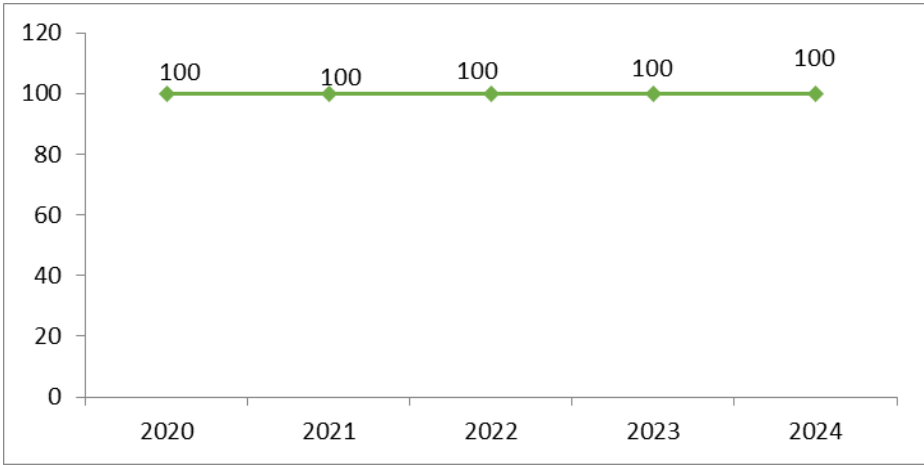
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.58
Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung

Capaian indikator Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung dari 2019 sampai 2024 adalah 100%. Faktor pendorong capaian ini adalah meningkatnya kemampuan dan keinginan dari PSKS untuk berperan serta dalam usaha kesejahteraan sosial. Namun masih ada hambatan yaitu kurangnya fasilitas bagi peningkatan kemampuan dan peran serta Sumber Daya Manusia PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial.

Layanan sosial untuk PPKS berupa perlindungan sosial untuk korban kekerasan. Kekerasan setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Secara tidak langsung, kasus kekerasan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin, seperti perampasan kekayaan, trauma atau cacat fisik yang membuat orang tidak mau bekerja, penelantaran anak, dan sebagainya. Kekerasan tidak hanya meliputi warga negara Indonesia namun juga warga negara migran. Warga negara migran yang menjadi korban tindak kekerasan akan dipulangkan ke negara asal. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dihitung dari jumlah warga negara migran yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi jumlah warga negara migran yang membutuhkan

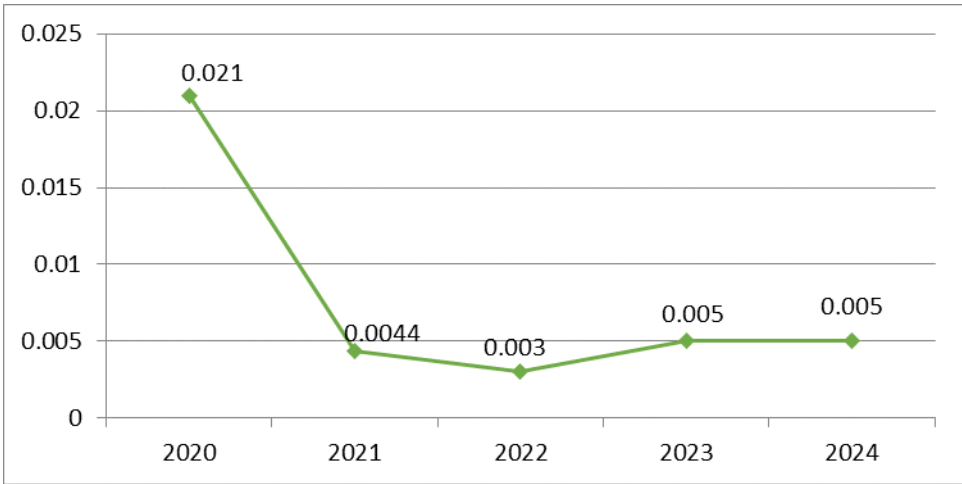
layanan pemulangan. Berikut adalah persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan di Kabupaten Temanggung.



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

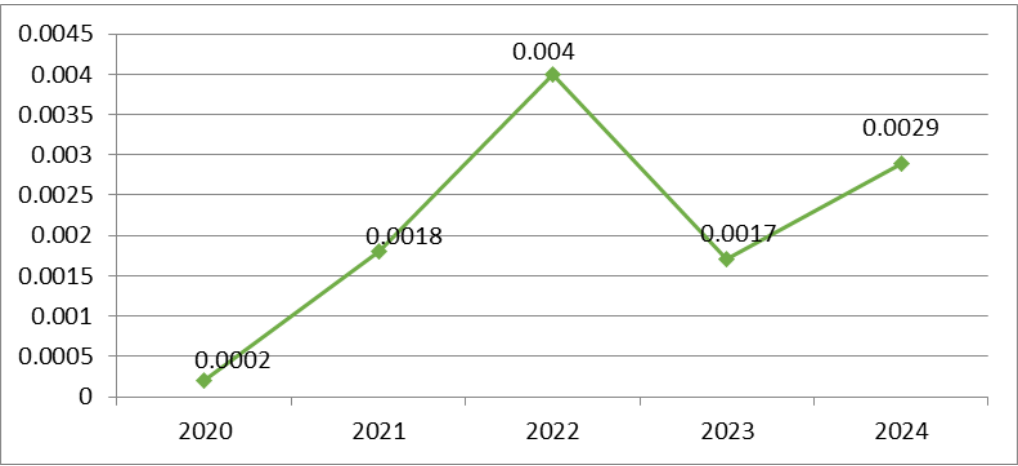
Gambar 3.59
Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Temanggung

Sedangkan kasus kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, terus berupaya untuk mendampingi anak dan perempuan yang mengalami kekerasan.



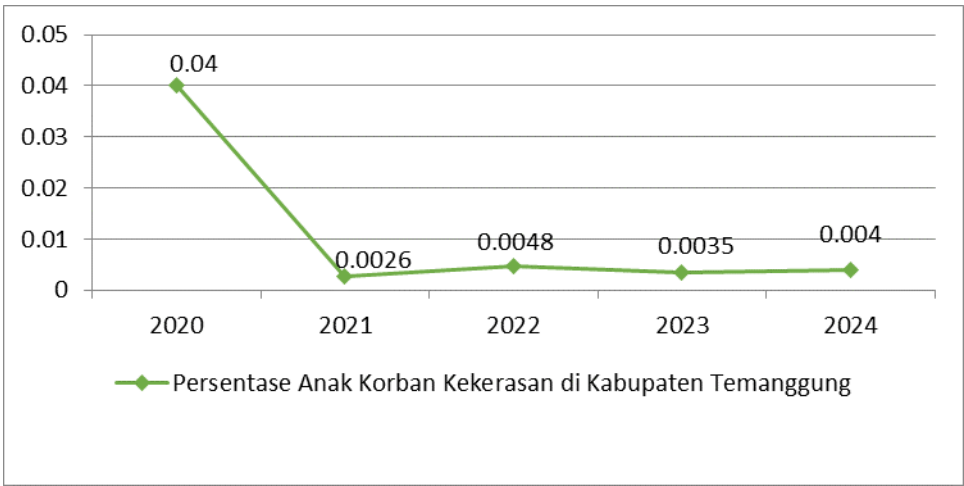
Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.60
Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan di Kabupaten Temanggung



Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.61
Persentase Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Temanggung

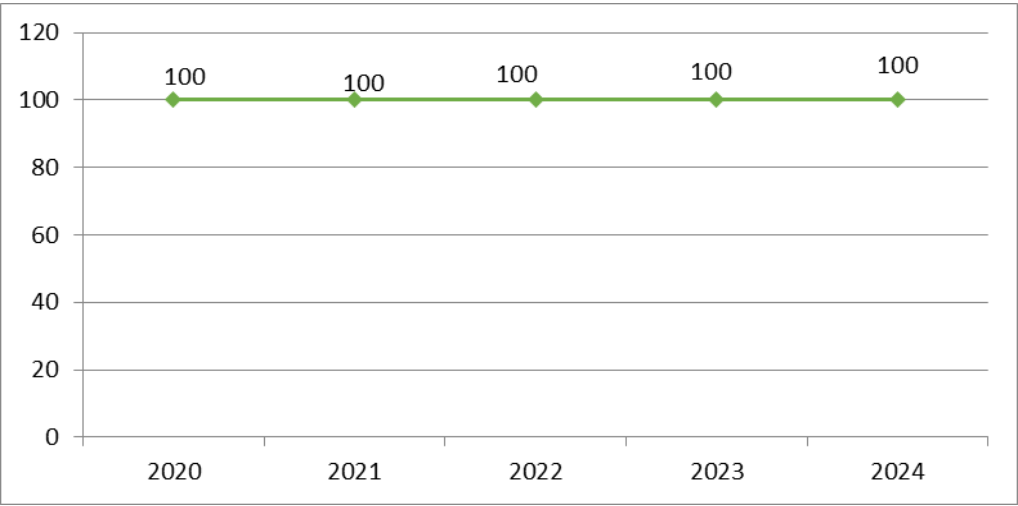


Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.62
Persentase Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Temanggung

Pemerintah melalui dinas terkait terus berupaya menekan angka kekerasan dan juga pendampingan terhadap korban kekerasan. Namun, masih ada kendala yaitu keterbatasan dan kemampuan petugas pendamping. Maka dari itu dibutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.

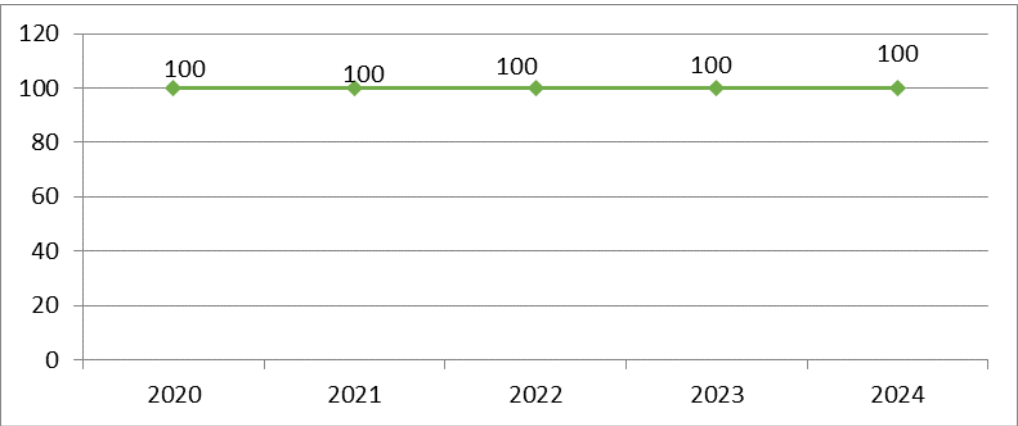
Layanan bidang sosial juga diberikan kepada anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti. Secara tidak langsung, anak terlantar dan penyandang disabilitas yang tidak memperoleh rehabilitasi akan meningkatkan potensi kemiskinan. Maka dari itu pemerintah melalui Dinas Sosial memberikan layanan sosial berupa rehabilitasi bagi anak terlantar yang dihitung dari jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100% sehingga didapatkan indikator persentase anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Gambar 3.63
Persentase Anak Terlantar Memperoleh Rehabilitasi Sosial
di Luar Panti

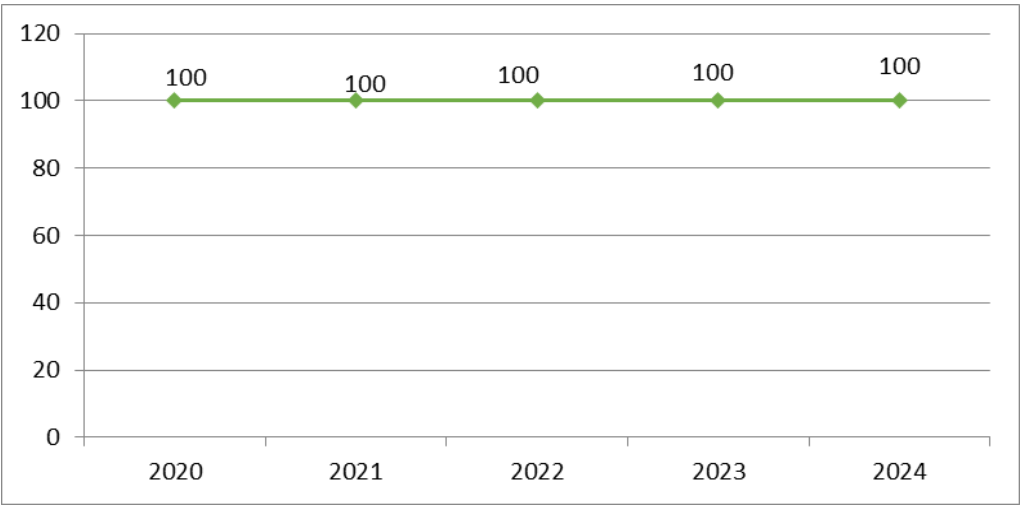
Selain itu, rehabilitasi juga diberikan kepada penyandang disabilitas di luar panti. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.64
Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh
Rehabilitasi Sosial Diluar Panti

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (yatim piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

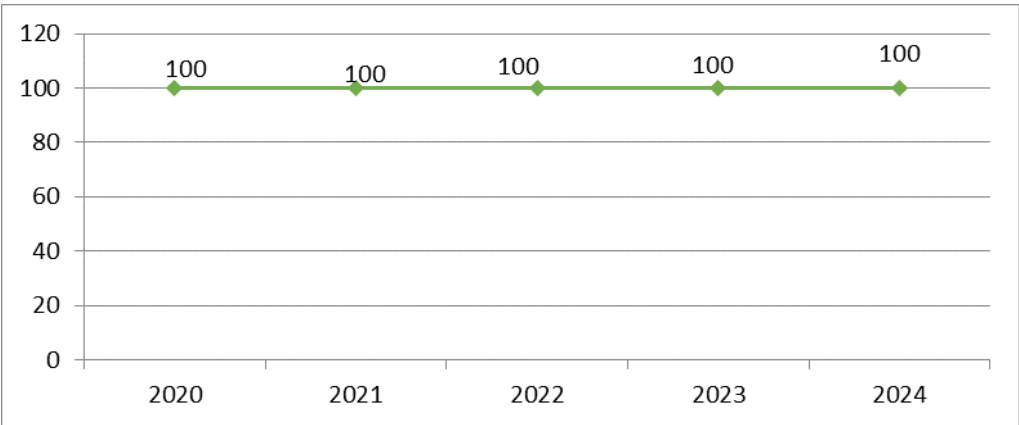
Gambar 3.65
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar dalam Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial

Meskipun capaian mencapai 100%, namun masih ada kendala yaitu adanya perubahan penerima menyebabkan Perubahan di Anggaran Perubahan dan SK Bupati. Sehingga, harus selalu dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengurus panti terkait perubahan kebijakan.

Sesuai dengan lampiran dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dijelaskan definisi lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya. Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu:

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

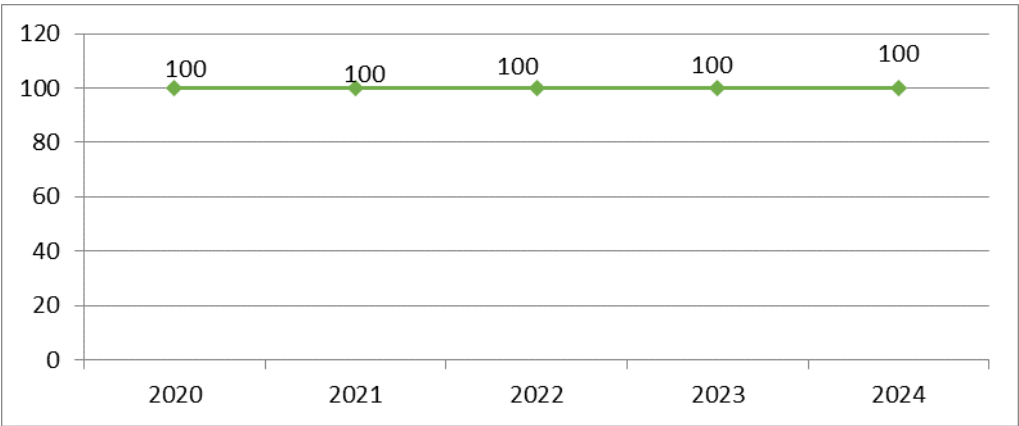
Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.66
Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti

Gelandangan dan Pengemis juga merupakan faktor yang menambah angka kemiskinan. Diperlukan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial untuk gelandangan dan pengemis sebelum dirujuk atau dipertemukan dengan keluarga.

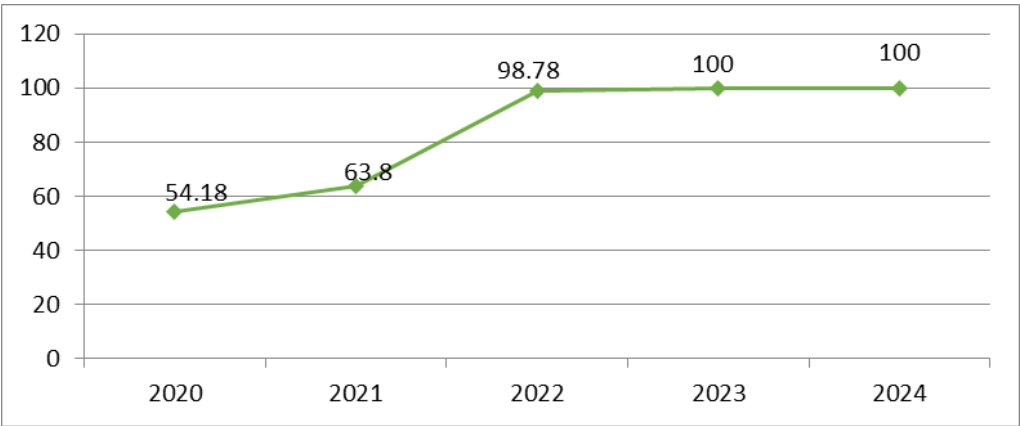


Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.67
Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah proses pengumpulan dan pemutahiran data (verifikasi dan validasi) orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya di wilayah Kabupaten

Temanggung. Rumus dari Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen. Berikut adalah persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota di Kabupaten Temanggung

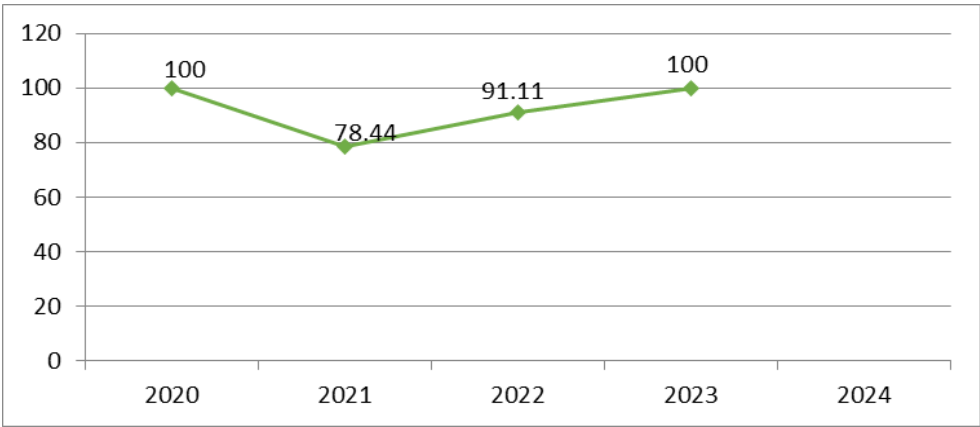


Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.68
Persentase Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota

Indikator ini sudah mencapai target pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Namun masih ada kendala yaitu Kelurahan belum memiliki anggaran untuk pendataan Fakir Miskin. Maka dari itu, diperlukan adanya anggaran khusus untuk pendataan Fakir Miskin di Kelurahan.

Sedangkan untuk Pengelolaan Data Fakir Miskin adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Rumus Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin kab/kota adalah jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

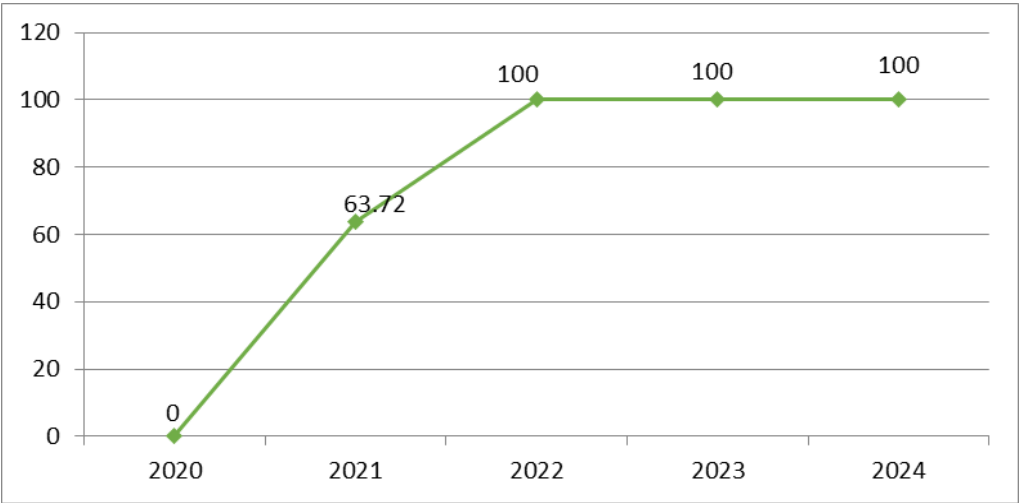


Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.69
Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator ini masih mengalami kendala yaitu masih ada penerima bantuan yang belum mempunyai KTP elektronik, sehingga perlu ada koordinasi dengan Disdukcapil terkait percepatan perekaman KTP elektronik

Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Kreatif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga merupakan salah satu penerima layanan bidang sosial. Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan dihitung dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

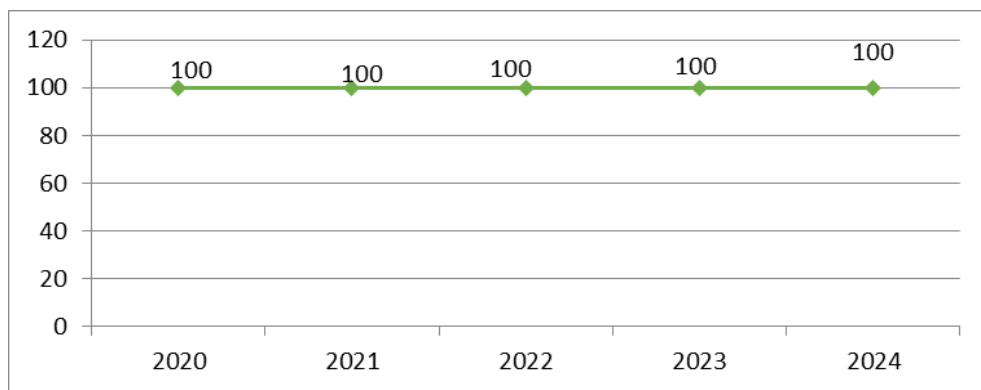
Gambar 3.70



Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Dari chart di atas dapat diketahui bahwa persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di Tahun 2018-2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya. Sedangkan data yang disajikan di Tahun 2021 adalah data UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas.

Korban bencana alam, non-alam dan sosial yang kehilangan harta benda akan meningkatkan angka kemiskinan. Maka dari itu diberikan layanan bidang sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial.

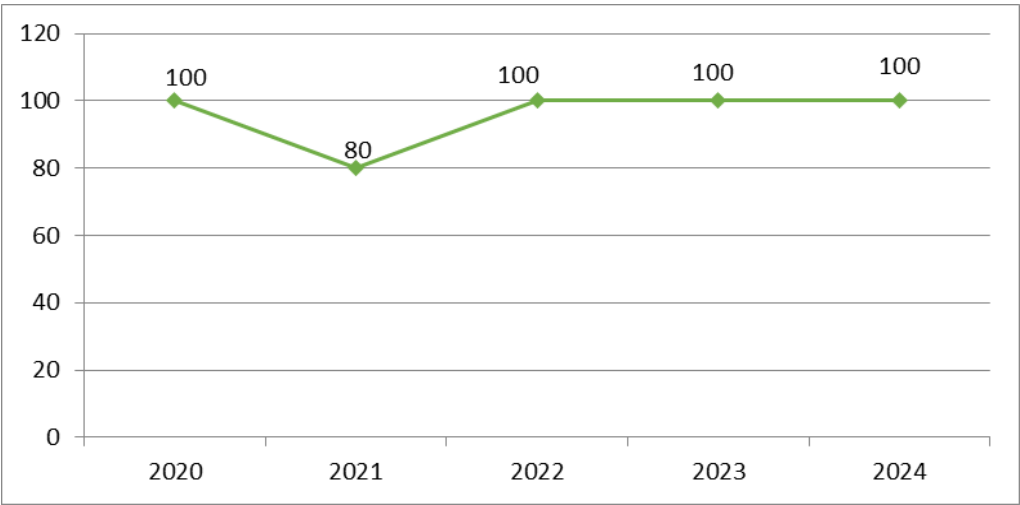


Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.71
Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan
Perlindungan Sosial

Reaksi cepat pemerintah melalui Dinas Sosial untuk memberikan perlindungan sosial agar korban tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap terjadi bencana, sehingga indikator ini selalu mencapai target dari tahun 2019 hingga 2024. Namun masih ada kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana. Sehingga, diharapkan ada penambahan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana penanganan bencana.

Layanan sosial kepada korban bencana tidak hanya saat terjadi bencana namun juga pasca bencana. Rumus perhitungan dari persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana adalah jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah korban pada pasca bencana dikali 100%.

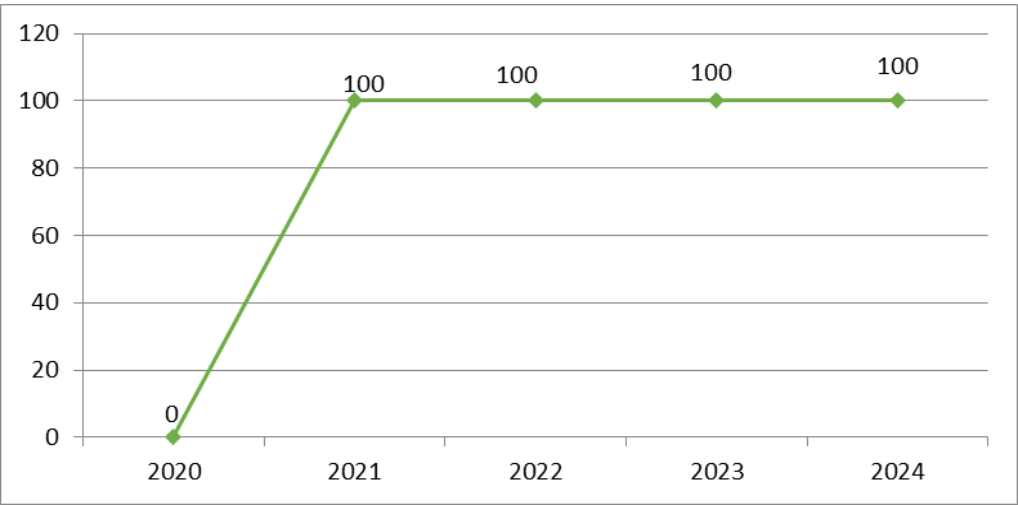


Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.72
Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana

Sebelum tahun 2023 korban bencana pada pasca bencana mendapatkan bantuan sosial. Akan tetapi pada tahun 2023 dan 2024 ini tidak ada anggaran yang diberikan kepada korban bencana berupa bantuan sosial. Maka dari itu penanganan korban bencana pada pasca bencana dilakukan oleh seksi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi kepada korban bencana yang mendapatkan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) pada masa tanggap darurat dilakukan monitoring dan evaluasi apakah pemberian bantuan tersebut sudah sesuai dan tepat guna, selanjutnya hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut akan dilakukan tindak lanjut.

Korban bencana alam yang memerlukan penyelamatan dan evakuasi saat saat bencana juga memerlukan bantuan sosial. Kegiatan ini tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi. Rumus Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana dibagi Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana.



Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.75
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator ini mulai dihitung tahun 2020. Indikator ini sangat penting karena masyarakat yang telah dievakuasi juga memerlukan bantuan sosial secara selama dalam evakuasi. Agar indikator ini selalu tercapai diperlukan peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dan tetap menjalin komunikasi dengan masyarakat yang terdampak bencana.

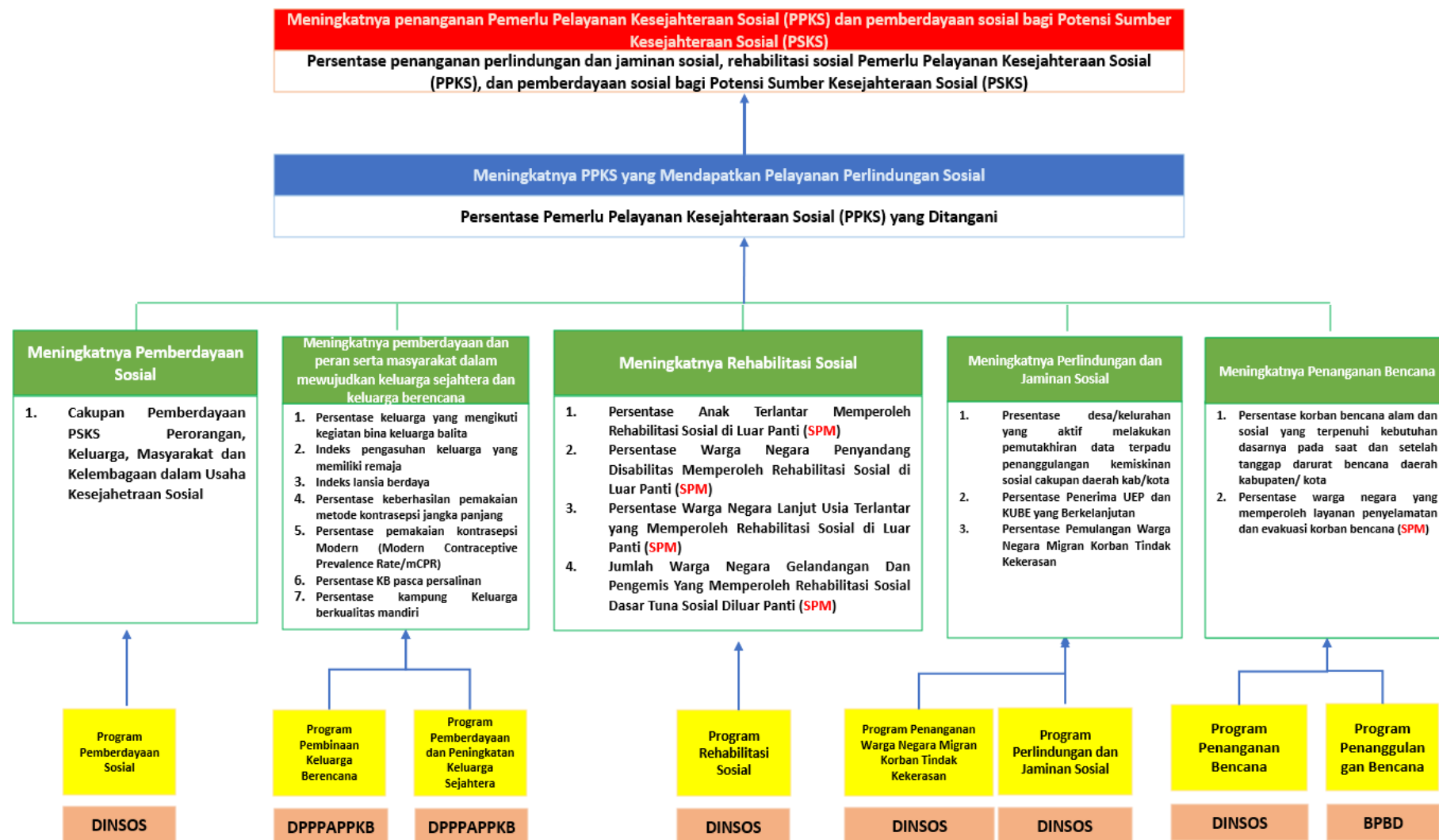
b. Prioritas Intervensi Bidang Sosial

Fokus utama bidang sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah meningkatnya penanganan PPKS dan pemberdayaan sosial bagi PSKS. Dengan peningkatan penanganan dan pemberdayaan tersebut diharapkan mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga PPKS dan PMKS dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Intervensi pemerintah terhadap PPKS dilaksanakan melalui Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Logika program *theory of change* (TOC) yang disusun menjelaskan bahwa untuk meningkatkan penanganan PPKS dan pemberdayaan sosial bagi PSKS diperlukan pemberdayaan sosial, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam keluarga sejahtera dan keluarga

berencana, peningkatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan bencana.





Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung melalui Pembahasan dengan Perangkat Daerah Terkait, 2024

Gambar 3.76
TOC Bidang Sosial

Tabel 3.18
Program dan OPD dalam Upaya Menurunnya PPKS

Tujuan	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Indikator	Program	OPD
Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),	Meningkatnya PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan keluarga berencana	1. Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita 2. Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja 3. Indeks lansia berdaya 4. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang 5. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 6. Persentase KB pasca persalinan	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPPAPPKB
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DPPPAPPKB

Tujuan	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Indikator	Program	OPD
	dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				7. Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri		
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Anak Terlantar Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM) 2. Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM) 3. Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM) 4. Jumlah Warga Negara Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti (SPM)	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Tujuan	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Indikator	Program	OPD
				Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Presentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan sosial cakupan daerah kab/kota 2. Persentase Penerima UEP dan KUBE yang Berkelanjutan 3. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial Dinas Sosial
				Meningkatnya Penanganan Bencana	1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	Program Penanganan Bencana Program Penanggulangan Bencana	Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Indikator	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Indikator	Program	OPD
					evakuasi korban bencana (SPM)		



3.5 Tinjauan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

3.5.1 Legislasi

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas serta penurunan kemiskinan menjadi salah satu trisula pembangunan, hal ini termuat dalam RPJMN 2025-2029 yang menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan, dan Sumber Daya Manusia Berkualitas. Penanggulangan kemiskinan menjadi Prioritas Nasional (PN) ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan selaras dengan visi misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025 yaitu Temanggung Untuk Semua (Sejahtera, Berkeanjutan, Mudah, Inklusif, Aman) yang kemudian tingkat kemiskinan dijabarkan pada tujuan pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman.

Pada RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 penanggulangan kemiskinan termuat pada misi ke-tiga yaitu pemberdayaan melalui Kesehatan dan Pendidikan yang dijabarkan pada 3 (tiga) strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin.

3.5.2 Kelembagaan

Di Kabupaten Temanggung keberadaan TKPKD terakhir dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 080/223/2025. Pembentukan TKPKD kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Temanggung terdiri dari kelembagaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan adalah sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten. Susunan organisasi TKPKD dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.19
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Temanggung

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati	Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bapperida	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Sekretaris
A	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
10.	Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah	Anggota
11.	Direktur Rumah Sakit Gunung Sawo	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan	Anggota
13.	Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung	Anggota
14.	Direktur Akademi Keperawatan Al Kautsar	Anggota
15.	Direktur Akademi Keperawatan Muhammadiyah Temanggung	Anggota
16.	Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Bethesda YAKKUM Temanggung	Anggota
17.	Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Anggota
18.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung	Anggota
19.	Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Temanggung	Anggota
20.	Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Temanggung	Anggota
21.	Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Jawa Tengah cabang Kabupaten Temanggung	Anggota
22.	Ketua Kelompok Kerja TP-PKK Kabupaten Temanggung	Anggota
23.	Ketua Paguyuban Camat	Anggota
24.	Ketua Paguyuban Kepala Desa	Anggota
B	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota



NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11.	Sekretaris Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Anggota
12.	Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung	Anggota
13.	Sekretaris Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Temanggung	Anggota
14.	Sekretaris Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Temanggung	Anggota
15.	Sekretaris Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Jawa Tengah Cabang Temanggung	Anggota
16.	Sekretaris Kelompok Kerja TP-PKK Kabupaten Temanggung	Anggota

Sumber : SK Bupati Nomor 080/223/2025 tentang Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung

- Tugas TKPKD adalah melakukan pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pengelolaan saran dan aduan penanggulangan kemiskinan di daerah. Adapun fungsi TKPKD adalah:
- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi kabupaten;
 - b. Koordinasi penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;



- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.

Susunan organisasi TKPK Kecamatan terdiri dari: Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Kelompok Kerja Data dan Pengaduan Masyarakat, dan Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat.

TKPK Kecamatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, pengelolaan saran dan aduan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Fungsi TKPK Kecamatan adalah:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan terpadu di tingkat kecamatan;
- b. pengelolaan data kemiskinan terpadu di tingkat kecamatan;
- c. pengkoordinasian identifikasi kebutuhan masyarakat miskin;
- d. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat;
- e. peningkatan kapasitas TKPK Desa dan/atau TKPK Kelurahan;
- f. pengendalian, pemantauan, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- g. penyusunan laporan hasil monitoring, evaluasi, serta pengelolaan saran dan aduan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD; dan
- i. pembinaan kepada TKPK Kelurahan dan TKPK Desa.

c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan.

Susunan organisasi TKPK Kelurahan terdiri dari: Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota. TKPK Kelurahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kelurahan yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, pengelolaan saran dan aduan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Fungsi TKPK Kelurahan adalah:

- a. pengelolaan data kemiskinan terpadu;
- b. pengelolaan saran dan aduan;
- c. pengkoordinasian identifikasi kebutuhan masyarakat miskin;
- d. pemberdayaan masyarakat miskin;
- e. pemantauan, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- f. penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan saran dan aduan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

d. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disingkat TKPK Desa adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

Susunan organisasi TKPK Desa terdiri dari: Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota. TKPK Desa mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Desa yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, pengelolaan saran dan aduan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Fungsi TKPK Desa adalah:

- a. pengelolaan data kemiskinan terpadu;

- b. pengelolaan saran dan aduan;
- c. pengkoordinasian identifikasi kebutuhan masyarakat miskin;
- d. pemberdayaan masyarakat miskin;
- e. pemantauan, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- f. penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan saran dan aduan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN PENGANGGARAN

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Kemampuan pengelolaan APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Kondisi keuangan daerah digambarkan melalui beberapa indikator, antara lain: Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah, Realisasi Pembiayaan Daerah, Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan, Persentase Belanja Langsung, Persentase Belanja Tidak Langsung, Persentase Belanja Operasi, Persentase Belanja Tak Terduga, Persentase Belanja Transfer, Persentase Belanja Modal, dan Opini BPK. Realisasi APBD merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Keuangan daerah menjadi bagian penting dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah untuk mengetahui kondisi keuangan masa lalu sehingga dapat menghitung proyeksi penganggaran di masa yang akan datang melalui kecenderungan (tren) realisasi keuangan setiap tahun. Analisis keuangan yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah antara lain pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terjadi perubahan struktur APBD, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dana perimbangan yang awalnya merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah menjadi pendapatan transfer dan belanja yang awalnya dibagi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perubahan struktur APBD ini dimulai pada tahun 2021.

4.1 Kinerja Keuangan Tahun 2018-2023

Kinerja keuangan masa lalu merupakan gambaran keuangan daerah pada tahun sebelumnya dalam periode tertentu. Dalam hal penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah menggunakan periode selama lima tahun terakhir. Pembahasan kinerja keuangan masa lalu meliputi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan sumber dana utama dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah dari sisi fisik maupun non fisik. Pendapatan Daerah terbagi atas 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDS). Secara proporsi pendapatan Pemerintah Kabupaten Temanggung belum ideal, karena pendapatan terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan yang besarnya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat dengan berbagai upaya ekstensifikasi pendapatan maupun intensifikasi pendapatan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan terbagi atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut sampai dengan Tahun 2020. Pada penyusunan APBD tahun Anggaran 2021 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka struktur Pendapatan Daerah berubah menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut tabel pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 hingga Tahun 2024 yang tersaji dalam 2 tabel sesuai dengan Permendagri yang dipedomani saat penyusunan APBD.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	307.456.823.576	363.956.011.433	308.726.486.721	351.823.679.260	329.883.442.623
Realisasi Pendapatan Daerah	1.830.815.032.558	1.950.113.739.891	1.849.550.699.127	2.005.427.452.487	1.961.368.868.951
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	16,79	18,66	16,69	17,54	16,82

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besaran PAD masih sangat jauh dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 terhadap total pendapatan daerah mencapai rata-rata 16,82 persen. Komponen pembentuk pendapatan daerah terbesar pada tahun 2024 bersumber dari Dana Perimbangan/Dana Transfer dari pemerintah pusat yang memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan daerah.

4.1.2 Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Tahun 2020, sehingga struktur APBD yang digunakan sampai dengan tahun 2020 adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Proporsi belanja tidak langsung terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan belanja pegawai. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi belanja langsung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Proporsi Belanja Pegawai yang merupakan bagian dari Belanja Operasi masih tetap dominan dalam postur APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung hingga Tahun Anggaran 2024. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2024 secara lengkap terinci sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN							PROYEKSI 2025
	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	APBD 2024 Penetapan	
BELANJA DAERAH	2.053.340.949.247	1.877.969.167.294	2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	2.156.455.999.239	2.042.295.812.083	2.098.911.972.717	2.076.390.105.919
1. Belanja Operasi	1.373.906.713.450	1.232.194.234.987	1.455.371.245.698	1.295.686.749.508	1.545.029.674.070	1.460.421.030.081	1.549.564.934.300	1.540.590.671.300
a. Belanja Pegawai	717.818.927.664	681.107.527.533	785.276.004.360	710.731.632.791	803.840.649.421	889.665.000.241	891.973.887.571	889.802.050.241
b. Belanja Barang dan Jasa	545.881.225.141	458.561.990.957	575.681.578.758	492.943.591.757	584.018.730.999	500.030.196.074	552.080.765.984	499.861.283.074
c. Belanja Bunga	0	0	0	0	0	-	0	-
d. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	-	0	-
e. Belanja Hibah	92.739.551.295	89.546.728.997	86.988.194.080	85.102.866.541	152.954.275.650	147.097.157.985	111.182.630.126	138.154.757.985
f. Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350	2.977.987.500	7.425.468.500	6.908.658.419	4.216.018.000	12.772.580.000	12.147.203.000	12.772.580.000
2. Belanja Modal	239.836.719.621	235.995.614.408	287.510.501.396	247.089.139.440	202.902.736.362	174.714.127.567	117.183.905.255	116.565.770.255
a. Tanah	9.000.000.000	58.015.740	9.000.000.000	3.908.713.890	1.028.850.000	-	0	-
b. Peralatan dan Mesin	83.896.202.382	75.015.739.240	115.562.797.305	95.059.501.590	61.726.992.797	39.043.136.469	38.311.179.922	39.016.761.469
c. Bangunan dan Gedung	92.585.878.990	83.641.790.248	114.551.721.981	102.564.048.329	54.577.028.997	46.317.439.145	43.104.932.470	46.317.439.145
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.198.762.300	71.894.050.162	42.260.159.121	39.768.985.023	77.837.411.000	28.446.629.250	39.674.426.000	27.854.869.250
e. Aset tetap lainnya	5.792.569.901	5.309.106.018	6.113.272.989	5.766.890.608	7.691.853.568	3.279.550.391	7.609.116.519	3.279.550.391
f. Aset lainnya	321.000.000	76.913.000	22.550.000	21.000.000	40.600.000	97.150.000	46.500.000	97.150.000



URAIAN	TAHUN ANGGARAN							PROYEKSI 2025
	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	APBD 2024 Penetapan	
3. Belanja Tidak Terduga	8.704.328.802	5.779.500.000	2.000.000.000	0	800.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000
4. Belanja Transfer	404.662.493.422	403.999.817.899	418.390.235.996	415.972.520.858	397.911.846.807	407.160.654.435	407.141.266.364	406.731.266.364
a. Belanja Bagi Hasil	5.675.400.000	5.656.124.477	7.951.000.000	7.936.684.862	7.997.804.000	14.988.600.364	8.777.498.770	14.988.600.364
b. Belanja Bantuan Keuangan	398.987.093.422	398.343.693.422	410.439.235.996	408.035.835.996	389.914.042.807	392.152.666.000	391.153.832.355	391.742.666.000

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024.

4.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- 2) Penerimaan pinjaman daerah dilakukan manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.
- 3) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Penerimaan Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang

lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun Anggaran 2025 dilakukan untuk pembangunan poliklinik RSUD yang akan dimulai pada Tahun 2026.

2) Penyertaan modal pemerintah daerah;

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3) Pembayaran pokok hutang;

Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

4) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Pengeluaran Pembiayaan berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung secara jelas tercantum pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023*	APBD 2024	
PEMBIAYAAN DAERAH	86.044.884.418	114.804.704.856	161.211.637.352	243.671.402.772	180.203.716.352	137.543.103.766	119.451.731.278
1. Penerimaan Pembiayaan	91.129.078.155	124.692.881.503	162.455.516.962	254.301.081.892	182.011.130.352	137.543.103.766	139.451.731.278
a. SiLPA	85.356.884.193	123.395.072.830	162.448.209.105	254.248.460.087	180.406.907.044	134.088.073.766	139.392.477.970
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	55.857.857	50.489.211	7.307.857,00	52.621.805	59.253.308	0	59.253.308
c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.716.336.105	1.247.319.462	0	0	0	0	0
d. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	1.544.970.000	3.455.030.000	0
2. Pengeluaran Pembiayaan	5.084.193.737	9.888.176.647	1.243.879.610	10.629.679.120	1.807.414.000	0	20.000.000.000
a. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	5.000.000.000	0	0	20.000.000.000
b. Penyertaan Modal Daerah	-	4.171.840.542	0	0	1.807.414.000	0	0

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023*	APBD 2024	
c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	5.084.193.737	5.716.336.105	1.243.879.610	5.629.679.120	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	86.044.884.418	114.804.704.856	161.211.637.352	243.671.402.772	180.203.716.352	137.543.103.766	119.451.731.278

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024 porsi terbesar pos penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan penghematan belanja daerah dan SiLPA BLUD. Pada penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa penerimaan retensi/jaminan pemeliharaan atas pekerjaan pada tahun berjalan yang akan dibayarkan pada pihak ketiga di tahun berikutnya. Pencairan dana cadangan digunakan untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah.

Sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran pokok utang daerah kepada Pemerintah Pusat yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Rekening pengeluaran pihak ketiga digunakan untuk membayar retensi/jaminan pemeliharaan, namun sejak Tahun Anggaran 2023 atas rekomendasi BPK-RI Retensi/Jaminan Pemeliharaan bukan lagi menjadi komponen pengeluaran pembiayaan namun menjadi Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada sisi aktiva.

4.2 Pembiayaan Non APBD

Dalam rangka meningkatkan intervensi penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung bersinergi dengan lembaga amal zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) agar bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

4.2.1 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. OPZ sendiri terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014 yang bertugas dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural Badan Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Penyaluran zakat dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dalam penyalurannya OPZ mendistribusikannya melalui program-program di setiap OPZ yang mencakup pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan bidang dakwah/advokasi selain itu penyaluran zakat juga mencakup program yang bersifat pemberdayaan dan pendayagunaan yang mencakup bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

Dalam intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung penyaluran bantuan diarahkan pada penyediaan sarana prasarana dasar seperti RTLH dan jamban, pelatihan, pemberian modal usaha, bantuan pendidikan dan kesehatan. Dalam pelaksanaan programnya OPZ berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung agar efektif, efisien dan tepat sasaran.

4.2.2 *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperkuat sinergitas program TJSLP dengan program pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut juga diatur tujuan TJSLP yaitu:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah; dan
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah.

Ruang lingkup TJSP dalam Peraturan Bupati tersebut meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah, dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut selaras dengan program pembangunan daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Sesuai dengan misi ke 3 RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu pemberdayaan melalui Kesehatan dan Pendidikan yang kemudian dijabarkan 3 (tiga) strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Temanggung merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025-2029. Dalam dokumen tersebut penanggulangan kemiskinan akan dilakukan melalui tiga strategi yaitu:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan seperti Bantuan Sosial, bantuan jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga dan program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran di masyarakat.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat seperti program padat karya, program vokasi dan Pelatihan, peningkatan akses aset produktif, akses modal dan akses penggunaan lahan, peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pemberian modal usaha pada UEP dan KUBE.
- c. Pengurangan kantong kemiskinan dengan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat melalui pembangunan jambanisasi, air minum, dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut secara efektif, efisien, tepat sasaran dan terukur harus didasari dengan kebijakan yang mendukung dan berkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang terukur dan tepat sasaran harus didasari dengan tingginya validitas data yang diperoleh dengan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi serta proses pendataan secara bottom up. Data tersebut diperoleh melalui pendekatan individu maupun keluarga yang telah diverifikasi dan divalidasi secara terintegrasi sehingga menjadi basis data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Dalam pelaksanaan tiga strategi tersebut akan implementasikan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dijabarkan dalam 7 bidang intervensi dan lebih rinci lagi akan terkonvergensi baik secara intervensi langsung maupun tidak langsung. Ke 7 intervensi tersebut yaitu:

- a. Bidang Pendidikan
- b. Bidang Kesehatan
- c. Bidang Sosial
- d. Bidang Infrastruktur Dasar
- e. Bidang Ketahanan Pangan
- f. Bidang Ketenagakerjaan
- g. Bidang Pembangunan Desa

Secara rinci program prioritas pada Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada lampiran I.

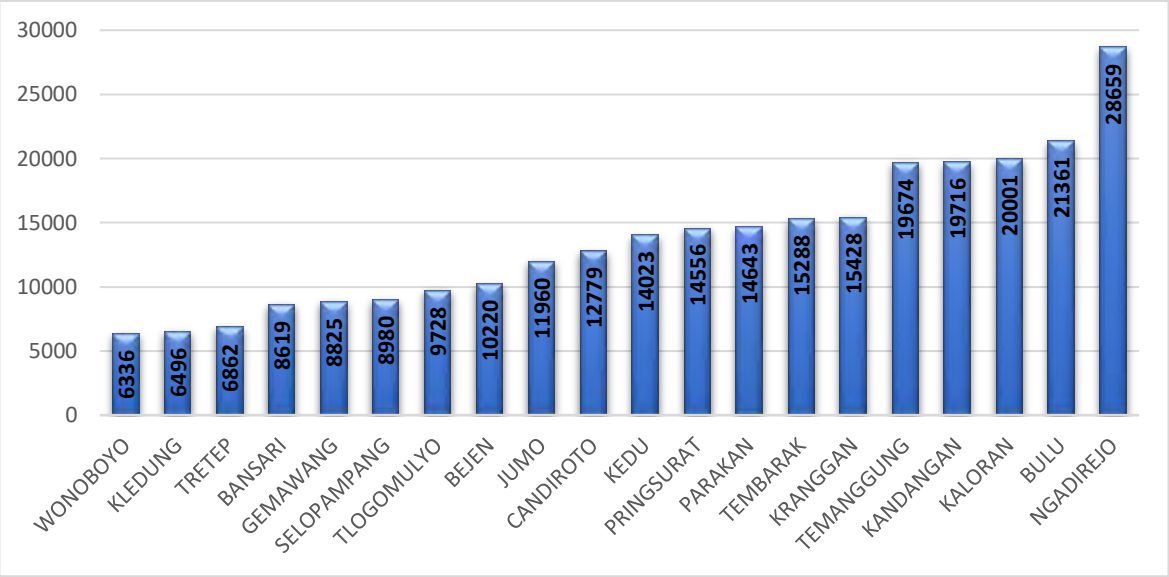


BAB V

LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam penanganan kemiskinan perlu adanya penentuan lokasi prioritas untuk memaksimalkan lokus pelaksanaan kegiatan. Penentuan lokasi prioritas dilakukan melalui analisis prioritas intervensi dan analisis keterkaitan. Wilayah intervensi dilakukan di 20 kecamatan se-Kabupaten Temanggung, dengan prioritas intervensi terutama daerah yang paling rawan berdasarkan jumlah dan prosentase kemiskinan tertinggi.

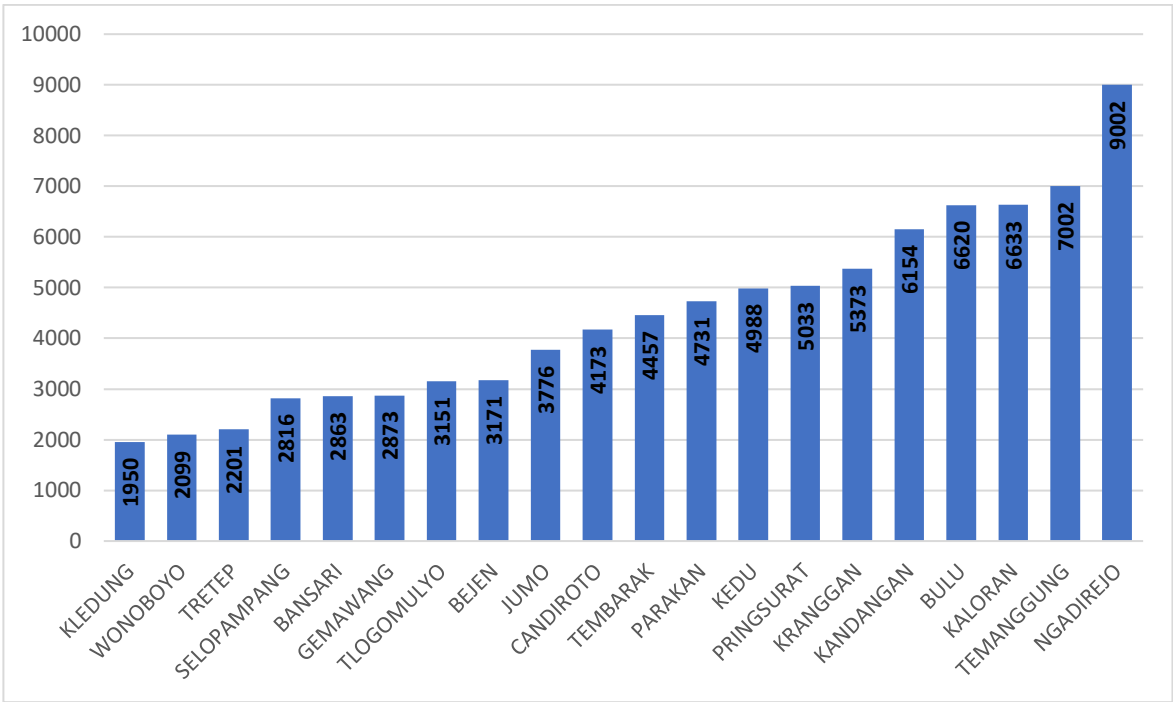
Hal yang telah dilakukan antara lain melakukan verifikasi dan validasi Data Kemiskinan Daerah (DKD) tiap semester serta sinkronisasi data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Provinsi Jawa Tengah (SIKS DJ) Modul Data Terpadu Jateng (cut off 11 Februari 2025) dengan DKD tahun 2025 . Dari hasil persandingan kedua data diatas diketahui bahwa di Kabupaten Temanggung masih terdapat penduduk miskin sebanyak 89.066 KRT (Kepala Rumah Tangga) dan 274.154 ART (Anggota Rumah Tangga). Sebaran Data ART Miskin per kecamatan berdasarkan data DT Jateng yang telah disinkronkan dengan DKD dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: DT Jateng Kabupaten Temanggung disinkronkan dengan DKD, 2025, data diolah

Gambar 5.1
Persebaran Data ART Miskin per Kecamatan

Sedangkan, sebaran Data KRT Miskin per kecamatan berdasarkan data DT Jateng yang telah disinkronkan dengan DKD dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: DT Jateng Kabupaten Temanggung disinkronkan dengan DKD, 2025, data diolah

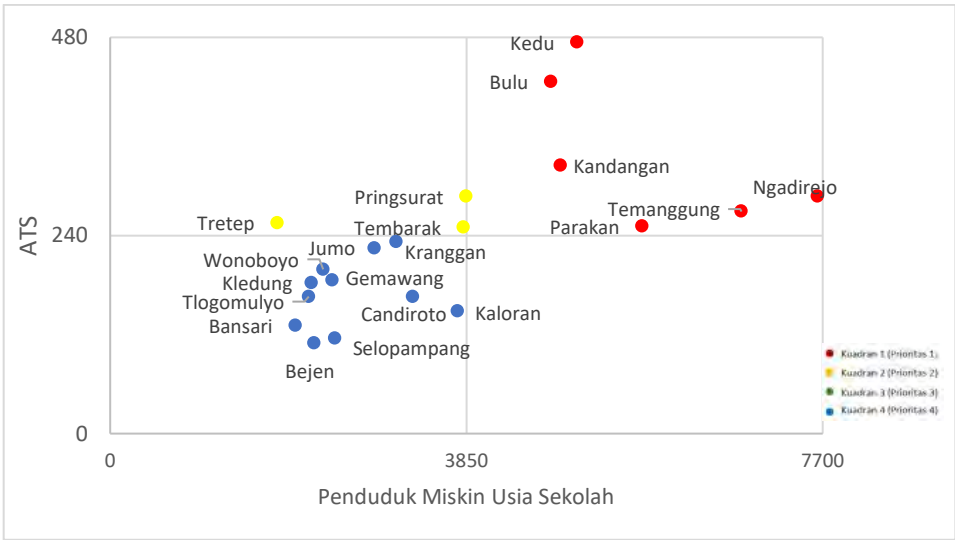
Gambar 5.2
Persebaran Data KRT Miskin per Kecamatan

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan analisis wilayah berdasarkan bidang penanggulangan kemiskinan dengan tujuan agar intervensi program/kegiatan sesuai dengan bidang penanggulangan kemiskinan dapat terfokus pada wilayah tersebut. Adapun analisis wilayah intervensi program penanggulangan kemiskinan berdasarkan bidang penanggulangan kemiskinan adalah sebagaimana berikut:

5.1 Bidang Pendidikan

a. Prioritas Wilayah Intervensi untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan

Pemetaan prioritas wilayah intervensi dilakukan dengan pendekatan demand yaitu melihat wilayah yang memiliki ATS dan penduduk miskin tinggi kemudian diberikan upaya untuk intervensi penurunan ATS. Dari pemetaan menggunakan kuadran ditemukan bahwa prioritas wilayah intervensi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: DT Jateng Kabupaten Temanggung disinkronkan dengan DKD, 2025, data diolah

Gambar 5.3
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan
Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Temanggung

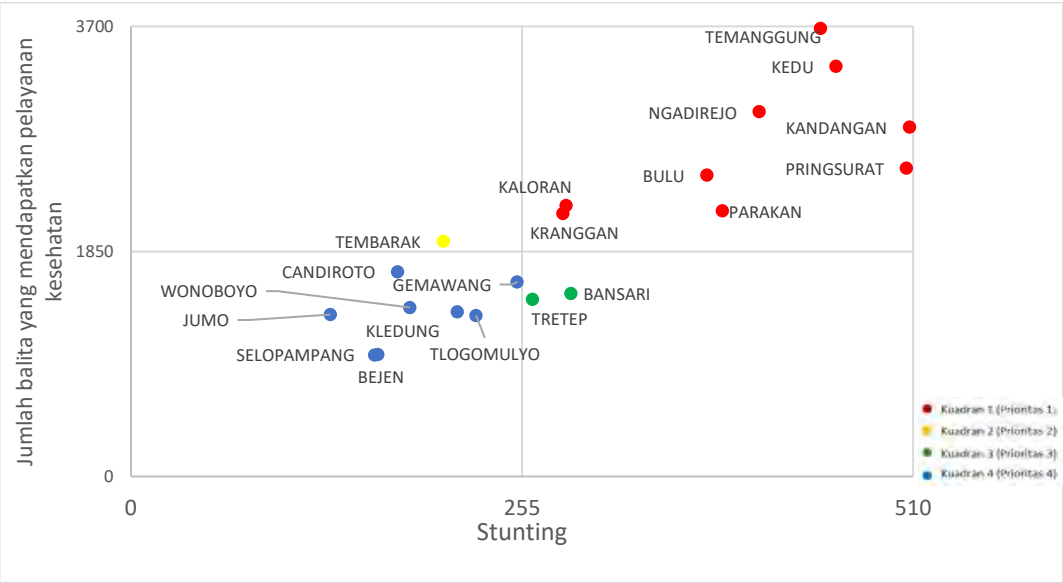
Berdasarkan analisis gambar 5.3 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan, Kecamatan Kedu, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Kandangan adalah kecamatan dengan nilai jumlah penduduk miskin dan anak tidak sekolah yang relatif besar dari kecamatan lain. Prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Temanggung terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Temanggung

Prioritas 1 (6 Kecamatan)	Ngadirejo, Temanggung, Parakan, Kedu, Bulu, Kandangan
Prioritas 2 (3 Kecamatan)	Pringsurat, Tembarak, Tretep
Prioritas 3 (0 Kecamatan)	-
Prioritas 4 (11 Kecamatan)	Kaloran, Candiroto, Kranggan, Jumo, Selopampang, Gemawang, Wonoboyo, Bejen, Bansari, Tlogomulyo, Tretep

5.2 Bidang Kesehatan
Prioritas Wilayah Intervensi untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pemetaan prioritas wilayah untuk menurunkan masalah gizi pada balita dilakukan dengan menyandingkan jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: DT Jateng Kabupaten Temanggung disinkronkan dengan DKD, 2025, data diolah

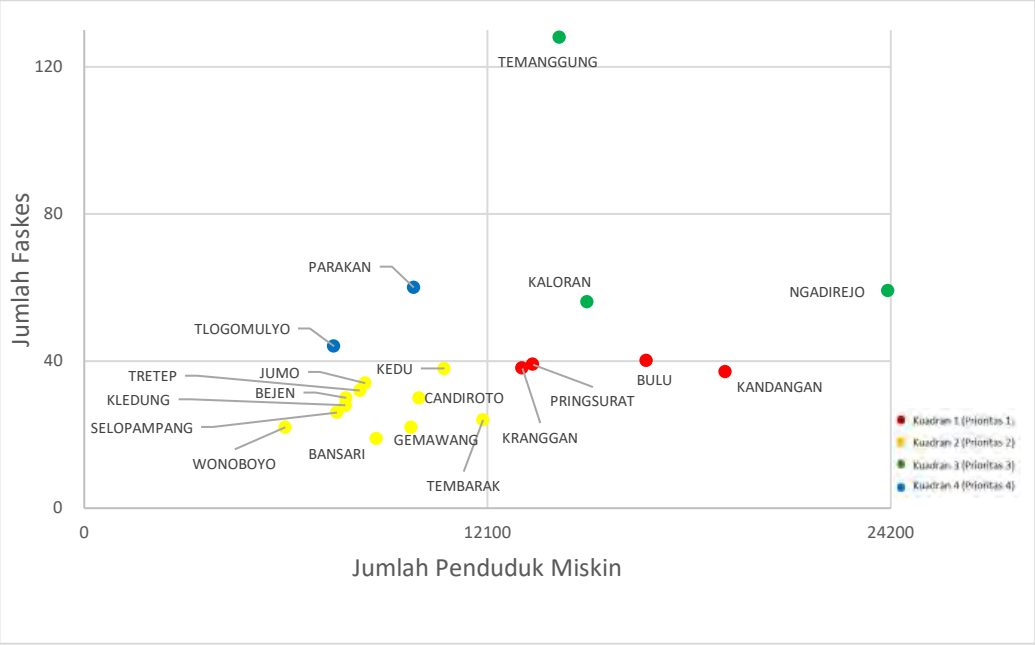
Gambar 5.4
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan analisis gambar 5.4, kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Kedu, Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat, dan Kecamatan Temanggung adalah kecamatan dengan jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan prevalensi stunting yang relatif besar dibandingkan kecamatan lain. Prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan keluarga berisiko stunting di Kabupaten Temanggung terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Temanggung

Prioritas 1 (9 Kecamatan)	Ngadirejo, Kedu, Parakan, Bulu, Kandangan, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Temanggung
Prioritas 2 (1 Kecamatan)	Tembarak
Prioritas 3 (2 Kecamatan)	Bansari, Tretap
Prioritas 4 (8 Kecamatan)	Candiroto, Jumo, Selopampang, Gemawang, Wonobojo, Bejen, Tologomulyo, Kledung

Selain pemetaan di atas, prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada ketersediaan fasilitas kesehaan dengan mempertimbangkan penduduk miskin yang memiliki kondisi ketidakmampuan dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan akses fasilitas kesehatan (faskes) yaitu dengan menyandingkan jumlah penduduk miskin dan jumlah faskes dalam 4 kuadran sebagaimana gambar berikut:



Sumber: DT Jateng Kabupaten Temanggung disinkronkan dengan DKD, 2025, data diolah

Gambar 5.5
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Ketersediaan Faskes di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan analisis gambar 5.5, kecamatan pada prioritas 1 Kecamatan Bulu, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kraanggan, dan Kecamatan Pringsurat adalah kecamatan dengan jumlah penduduk miskin yang relatif besar dan memiliki faskes yang lebih sedikit dibanding kecamatan lain. Prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan angka kematian di Kabupaten Temanggung terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Ketersediaan Faskes di Kabupaten Temanggung

Prioritas 1 (4 Kecamatan)	Bulu, Kandangan, Kraanggan, Pringsurat
Prioritas 2 (11 Kecamatan)	Bansari, Tretep, Tembarak, Candiroto, Jumo, Selopampang, Gemawang, Wonoboyo, Bejen, Kledung, Kedu



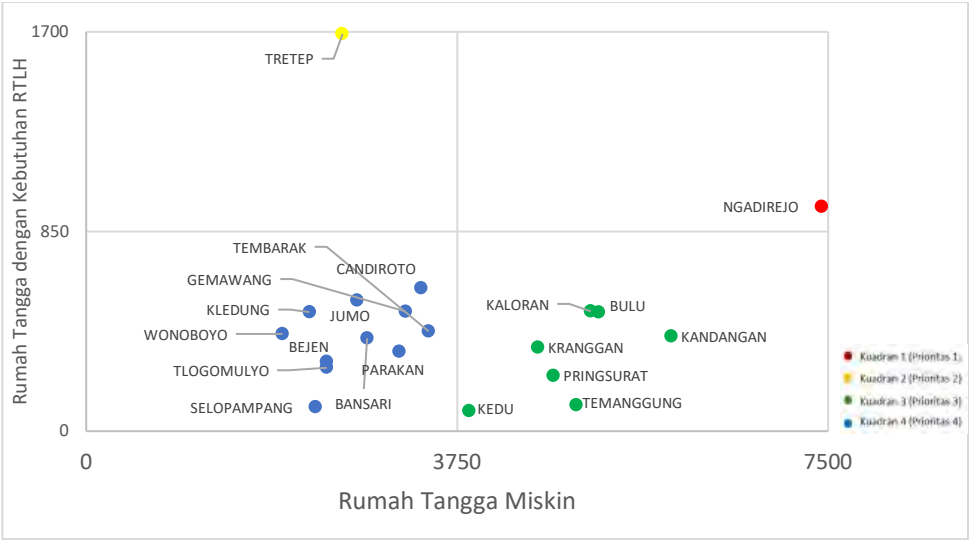
Prioritas 3 (3 Kecamatan)	Ngadirejo, Kaloran, Temanggung
Prioritas 4 (2 Kecamatan)	Tlogomulyo, Parakan.

5.3 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penentuan prioritas wilayah intervensi program penanggulangan kemiskinan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada penduduk miskin yang memiliki kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni, akses air minum, akses sanitasi, dan ketersediaan akses listrik.

a. Prioritas Wilayah Intervensi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Meningkatkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Pemetaan prioritas wilayah intervensi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni yang dilakukan dengan menyandingkan data RTLH yang dimiliki oleh rumah tangga miskin (RTM) dengan data jumlah RTM pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung dalam 4 (empat) kuadran, sebagai berikut.



Sumber: DT Jateng dengan data sandingan DKD, 2025, data diolah

Gambar 5.6
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Penanganan RTLH

Berdasarkan analisis gambar 5.6 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Ngadirejo adalah



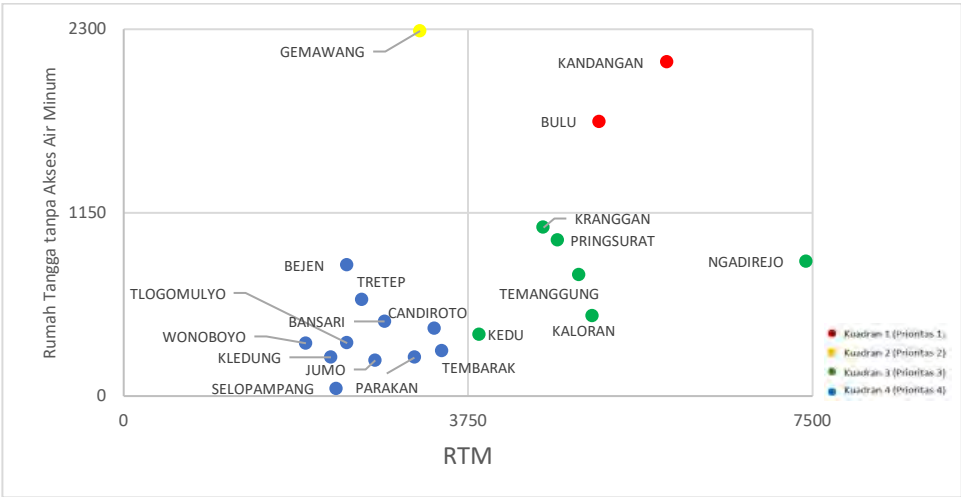
kecamatan dengan nilai jumlah rumah tangga miskin dan jumlah RTLH yang relatif besar dari kecamatan lain. Prioritas wilayah intervensi untuk penanganan RTLH di Kabupaten Temanggung terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.4
Prioritas Wilayah Intervensi Penanganan RTLH

Prioritas 1 (1 Kecamatan)	Ngadirejo
Prioritas 2 (1 Kecamatan)	Tretep
Prioritas 3 (7 Kecamatan)	Kranggan, Pringsurat, Temanggung, Kaloran, Kedu, Bulu, Kandangan
Prioritas 4 (11 Kecamatan)	Candiroto, Gemawang, Jumo, Selopampang, Wonobojo, Bejen, Tlogomulyo, Kledung, Bansari, Parakan, Tembarak

b. Prioritas Wilayah Intervensi Ketersediaan Akses Air Minum untuk Meningkatkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Pemetaan prioritas wilayah intervensi ketersediaan akses air minum bertujuan untuk meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni yang dilakukan dengan menyandingkan data rumah tangga miskin dengan RTM yang tidak memiliki akses terhadap air minum dengan data jumlah rumah tangga tidak terakses air minum pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung dalam 4 (empat) kuadran, sebagai berikut.



Sumber: DT Jateng dengan data sandingan DKD, 2025, data diolah

Gambar 5.7
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi
Ketersediaan Akses Air Minum

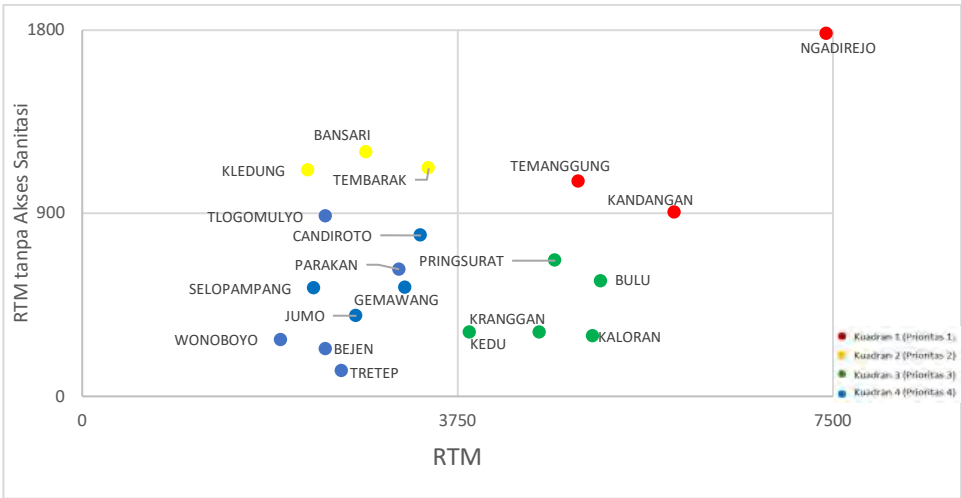
Berdasarkan analisis gambar 5.7 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kandangan adalah kecamatan dengan nilai jumlah rumah tangga miskin dan RTM tanpa akses air minum yang relatif lebih besar dari kecamatan lain. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan ketersediaan akses air minum di Kabupaten Temanggung terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5
Prioritas Wilayah Intervensi Ketersediaan Akses Air Minum

Prioritas 1 (2 Kecamatan)	Bulu, Kandangan
Prioritas 2 (1 Kecamatan)	Gemawang
Prioritas 3 (6 Kecamatan)	Kranggan, Pringsurat, Ngadirejo, Temanggung, Kaloran, Kedu
Prioritas 4 (11 Kecamatan)	Candiroto, Jumo, Selopampang, Wonoboyo, Bejen, Tlogomulyo, Kledung, Bansari, Tretep, Parakan, Tembarak

c. Prioritas Wilayah Intervensi Ketersediaan Akses Sanitasi untuk Meningkatkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Pemetaan prioritas wilayah intervensi ketersediaan akses sanitasi bertujuan untuk meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni yang dilakukan dengan menyandingkan data RTM dengan rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung dalam 4 (empat) kuadran, sebagai berikut.



Sumber: DT Jateng dengan data sandingan DKD, 2025, data diolah

Gambar 5.8
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi
Ketersediaan Akses Sanitasi

Berdasarkan analisis gambar 5.8 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Temanggung adalah kecamatan dengan nilai jumlah RTM dan jumlah rumah tangga miskin tanpa akses sanitasi yang relatif besar dari kecamatan lain. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan akses sanitasi di Kabupaten Temanggung terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.6
Wilayah Prioritas Wilayah Intervensi Ketersediaan
Akses Sanitasi

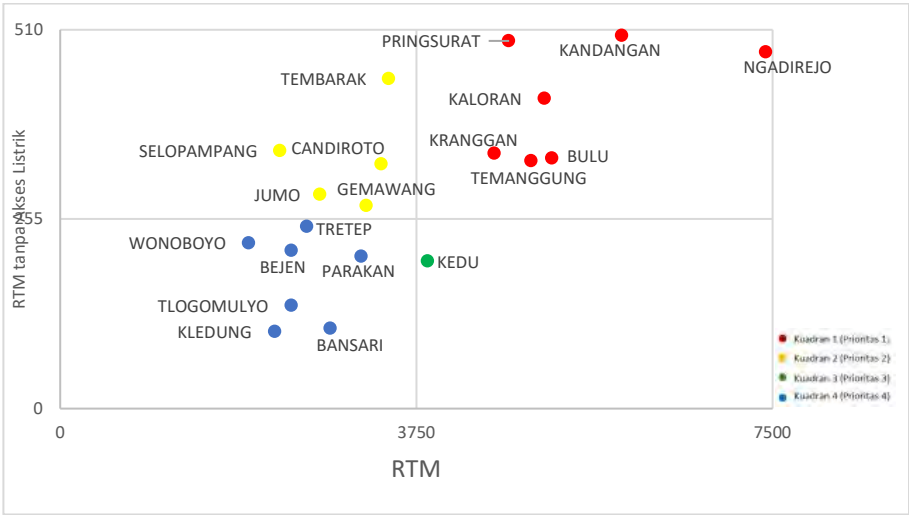
Prioritas 1 (3 Kecamatan)	Ngadirejo, Kandangan, Temanggung
Prioritas 2 (3 Kecamatan)	Tembarak, Bansari, Kledung
Prioritas 3 (5 Kecamatan)	Kedu, Krandangan, Kaloran, Bulu, Pringsurat
Prioritas 4 (9 Kecamatan)	Candiroto, Gemawang, Selopampang, Jumo, Wonoboyo, Bejen, Tlogomulyo, Parakan, Tretep

d. Prioritas Wilayah Intervensi Ketersediaan Akses Listrik untuk Meningkatkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Pemetaan prioritas wilayah intervensi ketersediaan listrik bertujuan untuk meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni yang dilakukan dengan menyandingkan data RTM



dengan rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses terhadap listrik pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung dalam 4 (empat) kuadran, sebagai berikut.



Sumber: DT Jateng dengan data sandingan DKD, 2024, data diolah

Gambar 5.9
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Ketersediaan Akses Listrik

Berdasarkan analisis gambar 5.9 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Temanggung adalah kecamatan dengan nilai jumlah RTM dan rumah tangga miskin tanpa akses listrik yang relatif besar dari kecamatan lain. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan akses listrik di Kabupaten Temanggung terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.7
Wilayah Prioritas Wilayah Intervensi Ketersediaan Akses Listrik

Prioritas 1 (7 Kecamatan)	Ngadirejo, Kandangan, Pringsurat, Kaloran, Kranggan, Bulu, Temanggung
Prioritas 2 (5 Kecamatan)	Tembarak, Selopampang, Candiroto, Jumo, Gemawang
Prioritas 3 (1 Kecamatan)	Kedu
Prioritas 4 (7 Kecamatan)	Wonoboyo, Bejen, Tlogomulyo, Kledung, Bansari, Parakan, Tretep

5.4 Bidang Pembangunan Desa

Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kemandirian Desa

Pemetaan prioritas wilayah untuk meningkatkan kemandirian desa dilakukan dengan menyandingkan desa termasuk kategori mandiri dan maju berdasarkan nilai Indeks desa membangun dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung sebagaimana Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/475 Tahun 2024 tentang Desa/Kelurahan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kemandirian desa di Kabupaten Temanggung disusun dari indikator skor Indeks Desa Membangun dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung. Kecamatan pada prioritas 1 adalah kecamatan dengan skor IDM lebih kecil dari nilai rata-rata Indeks Desa Membangun dan jumlah penduduk miskin yang relatif besar dari kecamatan lain. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kemandirian desa di Kabupaten Temanggung terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.8
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kemandirian Desa di Kabupaten Temanggung

Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Prioritas 1 (61 Desa/Kelurahan)	BEJEN	BANJARSARI
	BEJEN	KEMUNING
	BEJEN	LOWUNGU
	BEJEN	PETUNG
	BEJEN	PRANGKOKAN
	BEJEN	TANJUNGSARI
	BULU	MALANGSARI
	BULU	PUTAT
	CANDIROTO	GUNUNGPAYUNG
	CANDIROTO	SIDOHARJO
	GEMAWANG	BANARAN
	GEMAWANG	KARANGSENENG
	GEMAWANG	KREMPONG
	JUMO	JAMUSAN

Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
	JUMO	KARANGTEJO
	JUMO	KERTOSARI
	JUMO	PADURESO
	KALORAN	GEBLOG
	KALORAN	KEBLUKAN
	KANDANGAN	BALEDU
	KANDANGAN	BLIMBING
	KANDANGAN	CARUBAN
	KANDANGAN	KEDAWUNG
	KANDANGAN	MARGOLELO
	KANDANGAN	SAMIRANAN
	KANDANGAN	WADAS
	KEDU	DANUREJO
	KEDU	KARANGTEJO
	KEDU	KUTOANYAR
	KEDU	MOJOTENGAH
	KEDU	SALAMSARI
	NGADIREJO	KATAAN
	NGADIREJO	MUNGGANGSARI
	NGADIREJO	PRINGAPUS
	PARAKAN	BAGUSAN
	PARAKAN	GLAPANSARI
	SELOPAMPANG	BUMIAYU
	SELOPAMPANG	SALAMREJO
	TEMANGGUNG	GUNTUR
	TEMBARAK	BANARAN
	TEMBARAK	DRONO
	TEMBARAK	GREGES
	TEMBARAK	JRAGAN
	TEMBARAK	KRAJAN
	TEMBARAK	PURWODADI
	TLOGOMULYO	LANGGENG
	TLOGOMULYO	LEGOKSARI
	TRETEP	BENDUNGAN
	TRETEP	BOJONG
	TRETEP	BONJOR
	TRETEP	DONOROJO



Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
	TRETEP	NGLARANGAN
	TRETEP	SIGEDONG
	TRETEP	SIMPAR
	TRETEP	TLOGO
	TRETEP	TRETEP
	WONOBOYO	CEMORO
	WONOBOYO	PITROSARI
	WONOBOYO	PURWOSARI
	WONOBOYO	TAWANGSARI
	WONOBOYO	WATES
Prioritas 2 (42 Desa/Kelurahan)	BANSARI	MRANGGEN KIDUL
	BANSARI	REJOSARI
	BANSARI	TANUREJO
	BEJEN	CONGKRANG
	BULU	PAKUREJO
	BULU	TEGALREJO
	BULU	WONOSARI
	CANDIROTO	BANTIR
	CANDIROTO	CANDIROTO
	CANDIROTO	KRAWITAN
	CANDIROTO	PLOSOGADEN
	JUMO	BARANG
	JUMO	GUNUNGGEMPOL
	JUMO	KETITANG
	KALORAN	TEGOWANUH
	KANDANGAN	KEDUNGUMPUL
	KLEDUNG	CANGGAL
	KLEDUNG	KALIREJO
	NGADIREJO	BANJARSARI
	NGADIREJO	CAMPURSARI
	NGADIREJO	GEJAGAN
	NGADIREJO	KARANGGEDONG
	NGADIREJO	MANGUNSARI
	NGADIREJO	NGAREN
	PARAKAN	DEPOKHARJO
	PARAKAN	NGLONDONG
	PARAKAN	TEGALROSO



Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
	PARAKAN	WANUTENGAH
	SELOPAMPANG	BAGUSAN
	SELOPAMPANG	GAMBASAN
	SELOPAMPANG	KEBONAGUNG
	SELOPAMPANG	PLUMBON
	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG
	TEMANGGUNG	JOHO
	TEMANGGUNG	MANDING
	TEMBARAK	MENGGORO
	TEMBARAK	TEMBARAK
	TLOGOMULYO	CANDISARI
	TLOGOMULYO	LOSARI
	TLOGOMULYO	TANJUNGSARI
	TLOGOMULYO	TLOGOMULYO
	WONOBOYO	WONOCOYO
Prioritas 3 (88 Desa/Kelurahan)	BANSARI	BALESARI
	BANSARI	CANDISARI
	BANSARI	MRANGGEN TENGAH
	BANSARI	PURBOREJO
	BEJEN	DUREN
	BEJEN	KEBONDALEM
	BEJEN	LARANGAN LUWOK
	BEJEN	NGALIYAN
	BULU	BANSARI
	BULU	PAGERGUNUNG
	BULU	PASURUAN
	BULU	PENGILON
	BULU	WONOTIRTO
	CANDIROTO	CANGGAL
	GEMAWANG	KALIBANGER
	GEMAWANG	KEMIRIOMBO
	GEMAWANG	MUNCAR
	GEMAWANG	NGADISEPI
	GEMAWANG	SUCEN
	JUMO	GEDONGSARI
	JUMO	GIYONO
	JUMO	JOMBOR



Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
	JUMO	SUKOMARTO
	KALORAN	GANDON
	KALORAN	GANDULAN
	KALORAN	GETAS
	KALORAN	KALIMANGGIS
	KALORAN	KEMIRI
	KALORAN	KWARAKAN
	KALORAN	TEMPURAN
	KALORAN	TLETER
	KANDANGAN	BANJARSARI
	KANDANGAN	GESING
	KANDANGAN	KEMBANGSARI
	KANDANGAN	MALEBO
	KEDU	BANDUNGGEDE
	KEDU	CANDIMULYO
	KEDU	GONDANGWAYANG
	KEDU	KUNDISARI
	KEDU	MERGOWATI
	KEDU	NGADIMULYO
	KEDU	TEGALSARI
	KLEDUNG	JEKETRO
	KLEDUNG	PAPONAN
	KLEDUNG	TUKSARI
	KRANGGAN	GENTAN
	KRANGGAN	KEMLOKO
	KRANGGAN	KLEPU
	KRANGGAN	KRAMAT
	KRANGGAN	NGROPOH
	KRANGGAN	NGUWET
	KRANGGAN	PENDOWO
	KRANGGAN	PURWOSARI
	NGADIREJO	DLIMOYO
	PARAKAN	CAMPURSALAM
	PARAKAN	CATURANOM
	PARAKAN	MANDISARI
	PARAKAN	RINGINANOM
	PARAKAN	SUNGGINGSARI



Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
	PARAKAN	WATUKUMPUL
	PRINGSURAT	GOWAK
	PRINGSURAT	KARANGWUNI
	PRINGSURAT	KLEPU
	PRINGSURAT	KUPEN
	PRINGSURAT	PAGERGUNUNG
	PRINGSURAT	PRINGSURAT
	PRINGSURAT	SOBOREJO
	PRINGSURAT	SOROPADAN
	PRINGSURAT	WONOKERSO
	SELOPAMPANG	BULAN
	SELOPAMPANG	JETIS
	SELOPAMPANG	NGADITIRTO
	SELOPAMPANG	TANGGULANOM
	TEMANGGUNG	GILINGSARI
	TEMANGGUNG	MUDAL
	TEMANGGUNG	NAMPIREJO
	TEMBARAK	BOTOPUTIH
	TEMBARAK	GANDU
	TEMBARAK	KEMLOKO
	TEMBARAK	WONOKERSO
	TLOGOMULYO	BALEREJO
	TLOGOMULYO	GEDEGAN
	TLOGOMULYO	PAGERSARI
	TRETEP	CAMPUREJO
	TRETEP	TEMPELSARI
	WONOBOYO	PATEKEN
	WONOBOYO	PESANTREN
	WONOBOYO	TENING
Prioritas 4 (98 Desa/Kelurahan)	BANSARI	BANSARI
	BANSARI	CAMPURANOM
	BANSARI	GENTINGSARI
	BANSARI	GUNUNGSARI
	BANSARI	MOJOSARI
	BANSARI	TLOGOWERO
	BEJEN	BEJEN
	BEJEN	JLEGONG



Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
	BEJEN	SELOSABRANG
	BULU	BULU
	BULU	CAMPURSARI
	BULU	DANUPAYAN
	BULU	GANDUREJO
	BULU	GONDOSULI
	BULU	MONDORETNO
	BULU	NGIMBRANG
	BULU	PANDEMULYO
	BULU	TEGALURUNG
	CANDIROTO	BATURSARI
	CANDIROTO	KENTENGSAI
	CANDIROTO	LEMPUYANG
	CANDIROTO	MENTO
	CANDIROTO	MUNENG
	CANDIROTO	MUNTUNG
	CANDIROTO	NGABEYAN
	GEMAWANG	GEMAWANG
	GEMAWANG	JAMBON
	JUMO	JUMO
	JUMO	MOROBONGO
	KALORAN	KALORAN
	KALORAN	TEPUSEN
	KALORAN	TLOGOWUNGU
	KANDANGAN	KANDANGAN
	KANDANGAN	NGEMPLAK
	KANDANGAN	ROWO
	KANDANGAN	TLOGOPUCANG
	KEDU	BOJONEGORO
	KEDU	KEDU
	KLEDUNG	BATURSARI
	KLEDUNG	JAMBU
	KLEDUNG	KLEDUNG
	KLEDUNG	KRUWISAN
	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG
	KLEDUNG	KWADUNGAN JURANG
	KLEDUNG	PETARANGAN



Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
	KLEDUNG	TLAHAB
	KRANGGAN	BADRAN
	KRANGGAN	BENGKAL
	KRANGGAN	KRANGGAN
	KRANGGAN	PARE
	KRANGGAN	SANGGRAHAN
	NGADIREJO	GANDU WETAN
	NGADIREJO	GIRIPURNO
	NGADIREJO	GONDANGWINANGUN
	NGADIREJO	KATEKAN
	NGADIREJO	MANGGONG
	NGADIREJO	MEDARI
	NGADIREJO	NGADIREJO
	NGADIREJO	PETIREJO
	NGADIREJO	PURBOSARI
	NGADIREJO	TEGALREJO
	PARAKAN	DANGKEL
	PARAKAN	PARAKAN KAUMAN
	PARAKAN	PARAKAN WETAN
	PARAKAN	TRAJI
	PRINGSURAT	KEBUMEN
	PRINGSURAT	NGIPIK
	PRINGSURAT	NGLOROG
	PRINGSURAT	PINGIT
	PRINGSURAT	REJOSARI
	SELOPAMPANG	KACEPIT
	TEMANGGUNG	BANYUURIP
	TEMANGGUNG	BUTUH
	TEMANGGUNG	GIYANTI
	TEMANGGUNG	JAMPIREJO
	TEMANGGUNG	JAMPIROSO
	TEMANGGUNG	JURANG
	TEMANGGUNG	KEBONSARI
	TEMANGGUNG	KERTOSARI
	TEMANGGUNG	KOWANGAN
	TEMANGGUNG	LUNGGE
	TEMANGGUNG	MADURESO



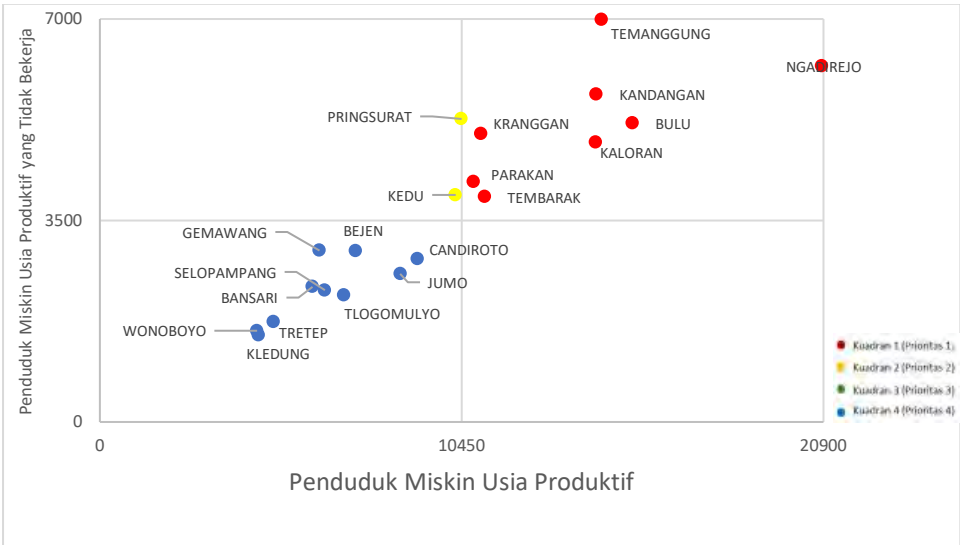
Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
	TEMANGGUNG	MUNGSENG
	TEMANGGUNG	PURWOREJO
	TEMANGGUNG	SIDOREJO
	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG DUA
	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG SATU
	TEMANGGUNG	TLOGOREJO
	TEMANGGUNG	WALITELON SELATAN
	TEMANGGUNG	WALITELON UTARA
	TEMBARAK	TAWANGSARI
	TLOGOMULYO	KEROKAN
	TLOGOMULYO	SRIWUNGU
	TLOGOMULYO	TLILIR
	WONOBOYO	KEBONSARI
	WONOBOYO	REJOSARI
	WONOBOYO	SEMEN
	WONOBOYO	WONOBOYO

Sumber: DT Jateng dengan data sandingan DKD, 2025, data diolah

Indeks Desa Membangun 2024, data diolah

5.5 Bidang Ketenagakerjaan

Analisis wilayah intervensi program penanggulangan kemiskinan pada bidang ketenagekerjaan difokuskan pada penduduk miskin yang tidak bekerja. Pemetaan prioritas wilayah untuk meningkatkan kesempatan kerja dilakukan dengan menyandingkan penduduk miskin usia produktif terhadap penduduk miskin usia produktif yang tidak bekerja di wilayah kecamatan dalam 4 kuadran sebagaimana berikut:



Sumber: DT Jateng dengan data sandingan DKD, 2025, data diolah

Gambar 5.10
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja

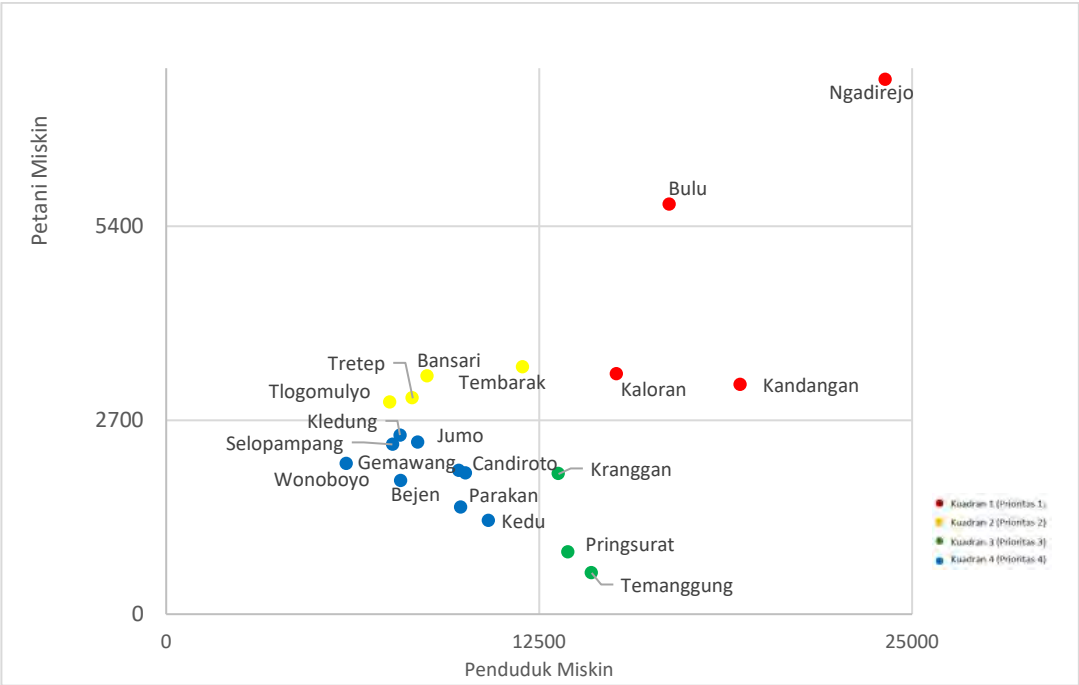
Berdasarkan analisis gambar 5.10 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Tembarak adalah wilayah dengan jumlah penduduk miskin usia produktif dan jumlah penduduk miskin usia produktif tidak bekerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kesempatan kerja di Kabupaten Temanggung terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.9
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja

Prioritas 1 (8 Kecamatan)	Ngadirejo, Temanggung, Parakan, Bulu, Kandangan, Kaloran, Kranggan, Tembarak
Prioritas 2 (2 Kecamatan)	Pringsurat, Kedu
Prioritas 3 (0 Kecamatan)	
Prioritas 4 (10 Kecamatan)	Candiroto, Jumo, Selopampang, Gemawang, Wonobojo, Bejen, Bansari, Tologomulyo, Tretep, Kledung

5.6 Bidang Pertanian
Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian

Pemetaan wilayah intervensi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bidang pertanian yang dilakukan dengan menyandingkan jumlah petani miskin terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah Kecamatan dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: DT Jateng, 2025, data diolah

Gambar 5.11
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian

Berdasarkan analisis gambar 5.11 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kaloran, dan Kecamatan Kandangan adalah penduduk miskin yang bekerja sebagai petani dengan jumlah penduduk miskin relatif tinggi. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.10
Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian

Prioritas 1 (4 Kecamatan)	Ngadirejo, Bulu, Kaloran, Kandangan
Prioritas 2 (4 Kecamatan)	Tembarak, Bansari, Tretep, Tlogomulyo
Prioritas 3 (3 Kecamatan)	Kranggan, Pringsurat, Temanggung
Prioritas 4 (9 Kecamatan)	Kledung, Selopampang, Jumo, Wonoboyo, Bejen, Gemawang, Candioto, Parakan, Kedu

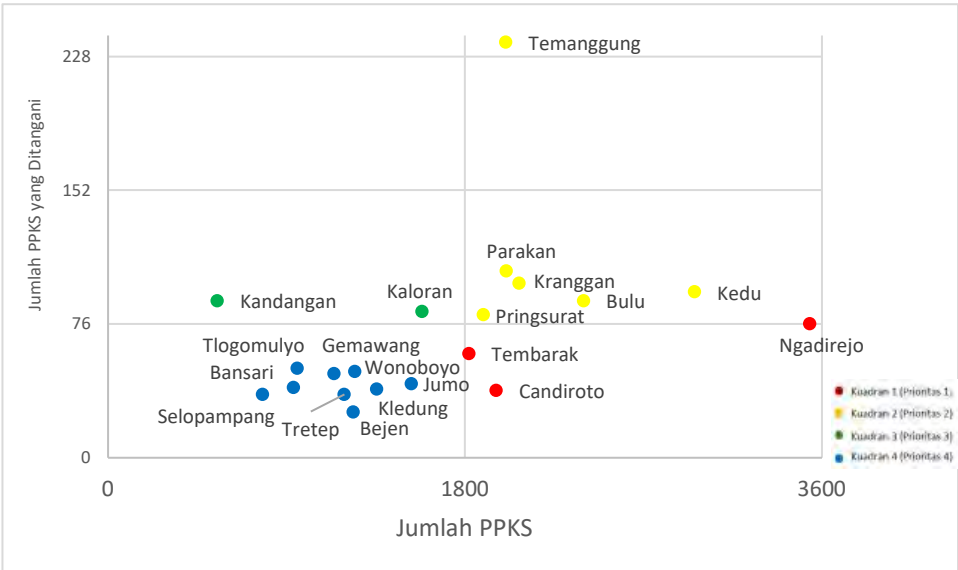
5.7 Bidang Sosial

a. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Penanganan PPKS

Pemetaan wilayah intervensi meningkatkan penanganan PPKS dilakukan dengan menyandingkan jumlah PPKS terhadap



jumlah PPKS yang ditangani di wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: DT Jateng, 2025, data diolah

Gambar 5.12
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi
Meningkatkan Pelayanan PPKS

Berdasarkan analisis gambar 5.12 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Tembarak, dan Kecamatan Candiroto memiliki jumlah PPKS yang besar dan jumlah PPKS yang ditangani relatif kecil. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.11
Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten Temanggung

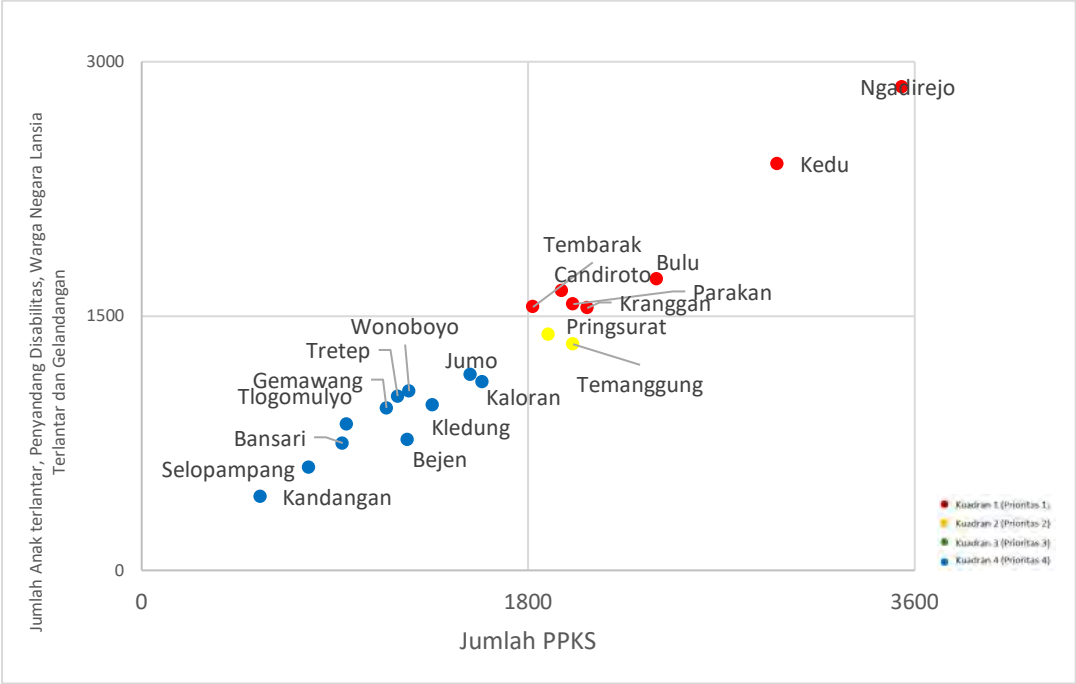
Prioritas 1 (3 Kecamatan)	Ngadirejo, Tembarak, Candiroto
Prioritas 2 (6 Kecamatan)	Temanggung, Parakan, Kranggan, Bulu, Pringsurat, Kedu
Prioritas 3 (2 Kecamatan)	Kandangan, Kaloran



Prioritas 4 (9 Kecamatan)	Tlogomulyo, Gemawang, Wonoboyo, Bansari, Jumo, Kledung, Bejen, Tretep, Selopampang
---------------------------	--

b. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Rehabilitasi Sosial

Pemetaan wilayah intervensi untuk meningkatkan Rehabilitasi sosial dilakukan dengan menyandingkan jumlah PPKS terhadap Jumlah Anak terlantar, Penyandang Disabilitas, Warga Negara Lansia Terlantar dan gelandangan di wilayah kecamatan dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: DT Jateng, 2025, data diolah

Gambar 5.13
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Rehabilitasi Sosial

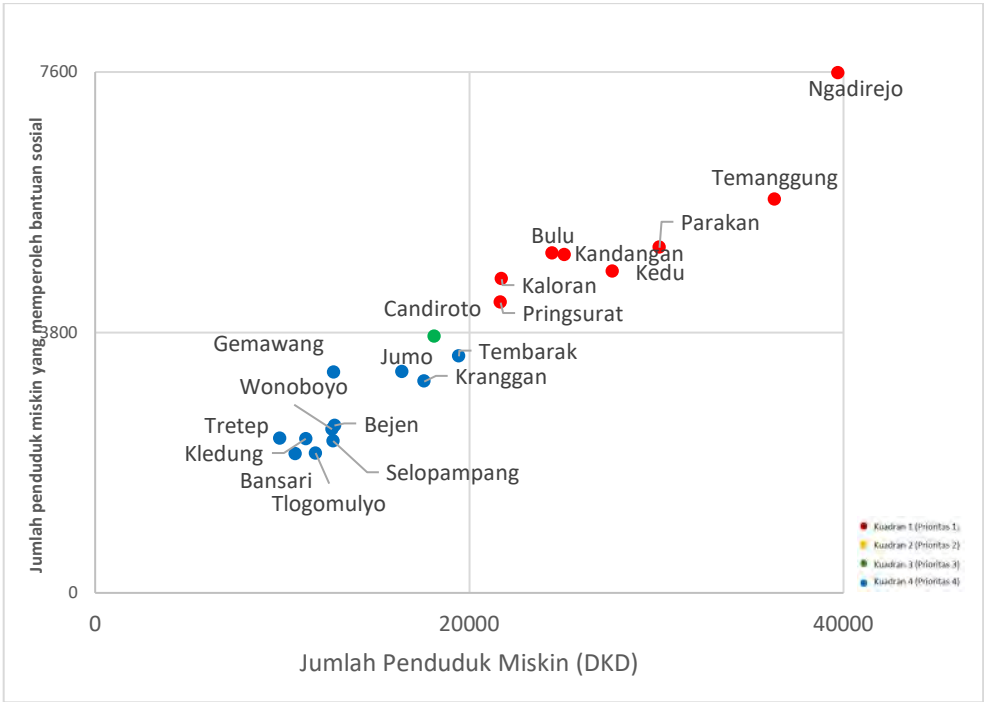
Berdasarkan analisis gambar 5.13 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Kedu, Kecamatan Bulu, Kecamatan Parakan, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Candiroto, dan Kecamatan Kranggan memiliki jumlah PPKS serta jumlah anak terlantar, penyandang disabilitas, warga Negara lansia terlantar dan gelandangan yang relatif tinggi. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.12
Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Rehabilitasi Sosial

Prioritas 1 (7 Kecamatan)	Ngadirejo, Kedu, Bulu, Parakan, Tembarak, Candirot, Kranggan
Prioritas 2 (2 Kecamatan)	Pringsurat, Temanggung
Prioritas 3 (0 Kecamatan)	-
Prioritas 4 (11 Kecamatan)	Kaloran, Jumo, Kandangan, Bejen, Kledung, Gemawang, Bansari, Tretep, Wonoboyo, Selopampang, Tlogomulyo

c. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pemetaan wilayah intervensi untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial dilakukan dengan menyandingkan jumlah penduduk miskin yang masuk ke dalam DKD terhadap jumlah penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: DT Jateng, 2025, data diolah

Gambar 5.14
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan analisis gambar 5.14 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Temanggung, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Kedu, Kecamatan Bulu,

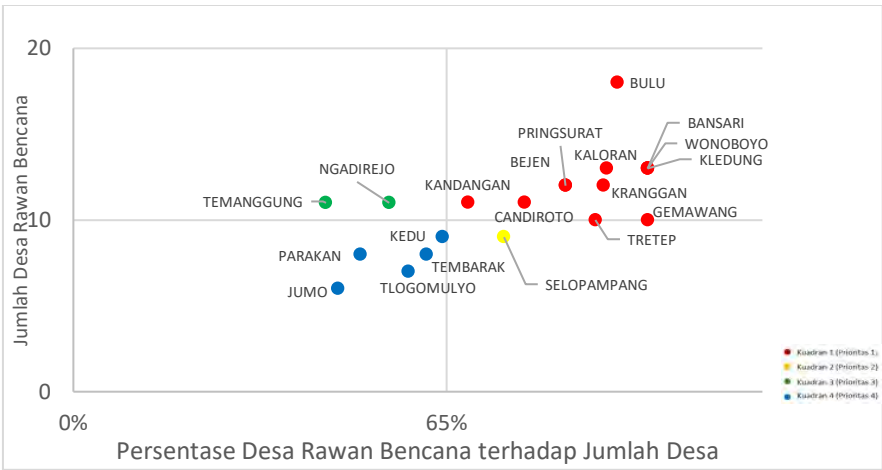
Kecamatan Parakan, Kecamatan Kaloran, Kecaamatan Pringsurat dan Kecamatan Kandangan memiliki jumlah DKD yang tinggi dan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan yang relatif tinggi. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.13
Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Prioritas 1 (8 Kecamatan)	Temanggung, Ngadirejo, Kedu, Bulu, Parakan, Kaloran, Pringsurat, Kandangan
Prioritas 2 (0 Kecamatan)	-
Prioritas 3 (1 Kecamatan)	Candirot
Prioritas 4 (11 Kecamatan)	Gemawang, Jumo, Tembarak, Kranggan, Wonobojo, Bejen, Tretep, Kledung, Selopampang, Tlogomulyo, Bansari

d. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Penanganan Bencana

Pemetaan wilayah intervensi untuk meningkatkan penanganan bencana dilakukan dengan menyandingkan persentase desa rawan bencana terhadap jumlah desa dengan jumlah desa rawan bencana per kecamatan, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: DT Jateng, 2025, data diolah

Gambar 5.15
Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Penanganan Bencana

Berdasarkan analisis gambar 5.15 dapat diketahui bahwa Kecamatan pada prioritas 1 yaitu Kecamatan Bulu, Kecamatan Bansari, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Kledung, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Bejen, dan Kecamatan Kandangan adalah kecamatan yang memiliki persentase jumlah desa rawan bencana dan jumlah desa rawan bencana yang tinggi. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan penanganan bencana terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.14
Prioritas Wilayah rioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Penanganan Bencana

Prioritas 1 (11 Kecamatan)	Bulu, Bansari, Wonobojo, Kledung, Gemawang, Candiroto, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Bejen, Kandangan
Prioritas 2 (1 Kecamatan)	Selopampang
Prioritas 3 (2 Kecamatan)	Ngadirejo, Temanggung
Prioritas 4 (5 Kecamatan)	Kedu, Tembarak, Tlogomulyo, Jumo, Parakan

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

6.1 Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program dalam capaian kinerja masing-masing indikator program. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian program/kegiatan yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan; untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi program/kegiatan. Selain itu monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan, memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan, dan dampaknya.

6.2 Alur Monitoring

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, termasuk proses penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Penanggung jawab pelaporan monitoring dan evaluasi melekat pada masing-masing Perangkat Daerah yang berperan sebagai anggota kelompok kerja TKPKD sesuai dengan Keputusan Bupati Temanggung. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan secara internal oleh Perangkat Daerah Kabupaten serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), dengan prinsip: obyektif; transparan; partisipatif; akuntabilitas; efisien, efektif, ketepatan waktu, ketersinambungan; serta berbasis pada indikator kinerja.

6.3 Tolok Ukur dan Ruang Lingkup

Tolok ukur pelaksanaan monitoring adalah rangkaian indikator kinerja program, meliputi target output dan outcome suatu program. Sedangkan tolok ukur evaluasi adalah indikator kinerja capaian program penanggulangan kemiskinan setiap tahun atau akhir dari suatu periode program. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi :

1. Obyek monitoring dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung, sejak proses perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan;
2. Sarana monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan;
3. Metode monitoring dan evaluasi, ditentukan dan dilakukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Monitoring dan evaluasi kebijakan/program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kegiatan:

1. Pengumpulan data

Data dan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan diperoleh dari:

- a. Hasil laporan rutin Perangkat Daerah pelaksana kebijakan dan program.
- b. Hasil data dari BPS Kabupaten Temanggung.
- c. Hasil pemberitaan media.
- d. Hasil laporan dari masyarakat/kelompok masyarakat

2. Pelaporan

Pelaporan; dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kemiskinan dan kinerja kebijakan/program secara obyektif dan sistematis.

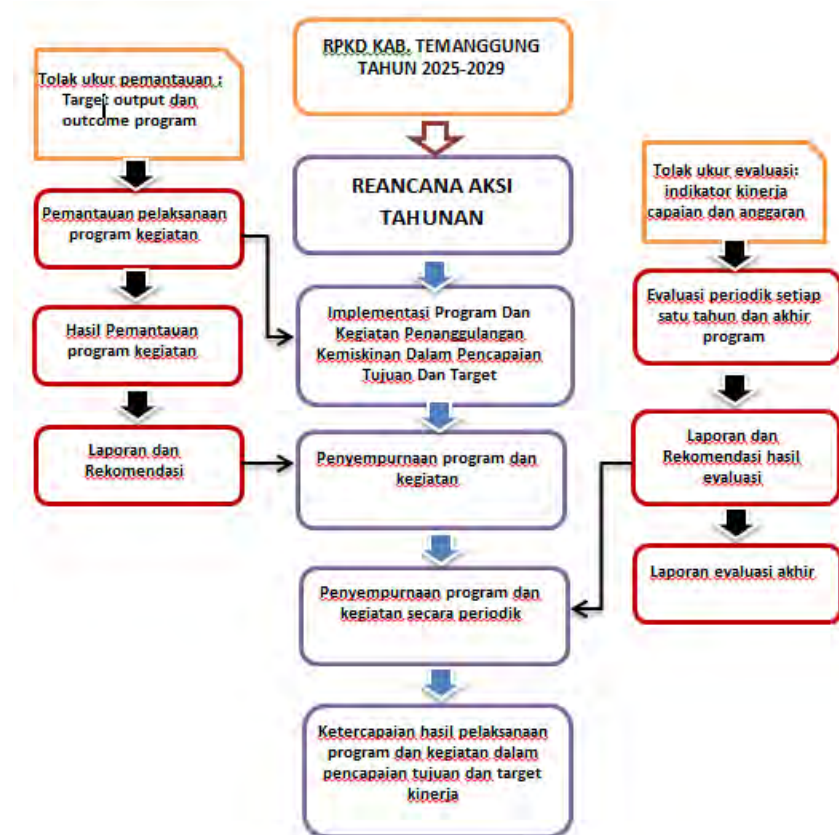
3. Pemanfaatan dan tindak lanjut

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan antara lain:

- Memberikan timbal balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,
- Melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program.
- Meningkatkan keterbukaan pengelolaan pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program.

6.4 Alur Monitoring dan Evaluasi

Diagram alur Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung.



Gambar 6.1

Alur Monev Implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung

Monitoring dan evaluasi secara garis besar melalui beberapa tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut. Tahapan yang pertama yaitu persiapan, pada tahap ini penyiapan instrumen berdasarkan program kegiatan dan indikator pada rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan yang merupakan penjabaran dari RPKD dan dilakukan secara periodik. Pada tahap pelaksanaan monitoring dilakukan berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator serta realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan secara periodik. Pada tahap pelaporan sudah terdapat ketercapaian indikator dan realisasi anggaran sehingga dapat terlihat kesesuaian dengan targetnya, hal tersebut disertai analisis tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target. Hal-hal tersebut menjadi dasar evaluasi yang dilakukan secara periodik untuk mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan serta menjadi acuan untuk memberikan rekomendasi dalam intervensi penanggulangan kemiskinan selanjutnya.

6.5 Instrumen Monitoring dan evaluasi

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibutuhkan instrument agar monitoring evaluasi dapat dilaksanakan secara terukur, terstruktur dan sistematis. Berikut adalah instrument dalam pelaksanaan monitoring:

Tabel 6.1

Matriks Monitoring

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Aktifitas Riil (sub sub keg)	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Sasaran	Kesesuaian Nilai Manfaat	Permasa- lahan (Faktor Penghambat)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Ket
						Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

- Kolom (1) : Berisi nomor
- Kolom (2) : Berisi nomenklatur program dan kegiatan yang mendukung program penanggulangan kemiskinan
- Kolom (3) : Berisi indikator kinerja program dan kegiatan yang sesuai dengan RAT
- Kolom (4) : Berisi satuan indikator kinerja program dan kegiatan
- Kolom (5) : Berisi aktifitas riil program dan kegiatan
- Kolom (6) : Berisi lokasi prioritas program dan kegiatan
- Kolom (7) : Berisi target anggaran yang telah direncanakan
- Kolom (8) : Berisi target kinerja yang telah direncanakan
- Kolom (9) : Berisi realisasi anggaran
- Kolom (10) : Berisi realisasi kinerja
- Kolom (11) : Berisi sasaran penerima manfaat program dan kegiatan
- Kolom (12) : Berisi apakah atribut kelengkapan di RAT sesuai dengan pelaksanaan
- Kolom (13) : Berisi permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang berupa faktor penyebab ketidaktercapaian target dan atau ketidaksesuaian atribut serta nilai manfaat
- Kolom (14) : Berisi rekomendasi tindak lanjut dari permasalahan

Sedangkan instrument evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2

Matriks Evaluasi

No	Program /		Satuan			Target	Realisasi	Sasaran		Permasalahan		Ketervapaian	
----	-----------	--	--------	--	--	--------	-----------	---------	--	--------------	--	--------------	--

	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Aktifitas Riil (sub sub keg	Lokasi Prioritas	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		Kesesuaian Nilai Manfaat	(Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut	(Tercapai/ Tidak tercapai	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

Kolom (1) : Berisi nomor

Kolom (2) : Berisi nomenklatur program dan kegiatan yang mendukung program penanggulangan kemiskinan

Kolom (3) : Berisi indikator kinerja program dan kegiatan yang sesuai dengan RAT

Kolom (4) : Berisi satuan indikator kinerja program dan kegiatan

Kolom (5) : Berisi aktifitas riil program dan kegiatan

Kolom (6) : Berisi lokasi prioritas program dan kegiatan

Kolom (7) : Berisi target anggaran yang telah direncanakan

Kolom (8) : Berisi target kinerja yang telah direncanakan

Kolom (9) : Berisi realisasi anggaran

Kolom (10) : Berisi realisasi kinerja

Kolom (11) : Berisi sasaran penerima manfaat program dan kegiatan

Kolom (12) : Berisi apakah nilai manfaat di RAT sesuai dengan pelaksanaan

Kolom (13) : Berisi permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang berupa faktor penyebab ketidaktercapaian target dan atau ketidaksesuaian atribut serta nilai manfaat

Kolom (14) : Berisi rekomendasi tindak lanjut dari permasalahan

- Kolom (15) : Berisi ketercapaian indikator dengan target apakah tercapai atau tidak
- Kolom (16) : Berisi dengan hal-hal lain yang belum terakomodir di dalam instrumen tetapi perlu untuk disampaikan

6.6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Temanggung dengan cakupan sebagai berikut:

- 1. Monitoring terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di setiap perangkat daerah maupun stakeholder terkait secara berkala**
- 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di setiap perangkat daerah secara berkala**
- 3. Evaluasi terhadap capaian indikator-indikator kemiskinan**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan kemudian dituangkan dalam Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan objektif, akuntabel, transparan, partisipatif dan berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk terus memperbaiki pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta sebagai salah satu urusan dalam menentukan kebijakan

BAB VII

PENUTUP

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dalam bidang penanggulangan kemiskinan dan berisi Rencana Aksi Daerah untuk kurun waktu lima tahun. RPKD Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) khususnya tujuan mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

Keberhasilan RPKD Kabupaten Temanggung sangat bergantung pada semua komitmen semua Perangkat Daerah dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Temanggung sejak proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, monitoring, dan evaluasi.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003